

SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D)

Nomor SPM : 00174/LS/LP2M/2019  
Tanggal : 29 Juli 2019  
Unit Kerja : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UNILA

Dari : Bendahara Pengeluaran  
Tanggal : 29 Juli 2019  
Nomor : 01656/UN26/SP2D/2019  
Tahun Anggaran : 2019

Klasifikasi Belanja : 5742.002.001.053.C.525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya

Bank : Bank BNI 46 Cabang Pembantu UNILA

Hendaklah memindahbukukan dari rekening nomor : 019.3922.784

Uang sebesar	Rp.	24.500.000,00
PPH	Rp.	0,00
PPN	Rp.	0,00
Jumlah diterima	Rp.	24.500.000,00

Dua Puluh Empat Jufa Lima Ratus Ribu Rupiah

Kepada : Dr. Maulana Mukhlis, S.Sos., M.IP., Jl. Soemantri Brojonegoro No 1 Raja Basa Bandar Lampung

NPWP : 08.494.585.6-323.000

No. Rek. : 0167755035 (Bpk. Maulana Mukhlis S.Sos., M.IP.)

Bank : BNI Cabang Tanjung Karang

Yaitu : Pembayaran Tahap 1 70% untuk Kegiatan Penelitian Unggulan sesuai dengan SPK nomor. 2236/UN26.21/PN/2019 tgl 3 Juli 2019, BAST nomor. 2692/UN26.21/PN/2019 tgl 4 2019, BAP nomor. 2768/UN26.21/PN/2019 tgl 5 2019

an Kuasa Pengguna Anggaran  
Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan,

Muhammad Kamal  
NIP. 196101011985031003

Bank : Bandar Lampung, tanggal seperti di atas  
Bendahara Pengeluaran UNILA,

Muhammad Ismail  
NIP. 198907062010121011

1. Putih untuk Bendahara Pengeluaran 2. Biru untuk BPP 3. Hijau untuk Bank



**SURAT PERJANJIAN (KONTRAK) PEKERJAAN  
PELAKSANAAN KEGIATAN PENELITIAN UNGGULAN**

NOMOR : 2236/UN26.21/PN/2019  
TANGGAL : 03 Juli 2019

ANTARA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
UNIVERSITAS LAMPUNG

DAN  
Dr. Maulana Mukhlis, S.Sos., M.IP. (Ketua)  
PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN PENELITIAN DENGAN JUDUL  
Desentralisasi Fiskal dan Implikasinya terhadap Kemandirian Daerah Pasca  
Pemekaran (Studi di Kabupaten Tulang Bawang, Tuba Barat, Mesuji).

FAKULTAS FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2019

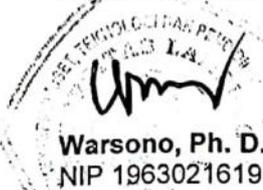
## RINGKASAN KONTRAK

Kegiatan yang dananya berasal dari DIPA BLU Universitas Lampung

1. No./Tgl.DIPA : DIPA-042.01.2.400954/2019, 05 Desember 2018
2. Kode Keg./Sub.Keg/MAK : 002.001.053.C.525119, Tahun Anggaran 2019 (Penelitian)
3. No. dan Tanggal SPK : 2236/UN26.21/PN/2019, Tanggal 03 Juli 2019
4. Nama Penanggungjawab : Dr. Maulana Mukhlis, S.Sos., M.IP./Penanggung Jawab Kegiatan Penelitian Unggulan Unila
5. Alamat Penanggungjawab : Jl.Prof. Sumantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung.
6. Nomor Pokok Wajib Pajak : 084945856323000
7. Nilai SPK/Surat Perjanjian : Rp 35.000.000,-
8. Uraian dan volume Pekerjaan : Penelitian dengan Judul "**Desentralisasi Fiskal dan Implikasinya terhadap Kemandirian Daerah Pasca Pemekaran (Studi di Kabupaten Tulang Bawang, Tuba Barat, Mesuji).**"
9. Cara Pembayaran :
  1. Kegiatan penelitian pembayaran angsuran I (satu) sebesar 70% ( dari nilai pekerjaan) atau 70% x Rp 35.000.000,- yakni sebesar Rp 24.500.000,- (*Dua Puluh Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*), setelah surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan ini ditandatangani oleh kedua belah pihak dan menyerahkan proposal-proposal kegiatan tersebut dari Pihak Kedua kepada Pihak Pertama
  2. Kegiatan penelitian pembayaran angsuran II (dua) sebesar 30% (dari nilai pekerjaan) atau 30% x Rp. 24.500.000,- yakni sebesar Rp. 10.500.000,- (*Sepuluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*), setelah pekerjaan selesai 100% dinyatakan dengan Berita Acara Serah Terima pekerjaan dan menyerahkan laporan hasil kegiatan dari Pihak Kedua kepada Pihak Pertama.
  3. Pembayaran tersebut di atas dilakukan melalui kas Badan Layanan Umum (BLU) ke Rekening Pihak Kedua pada Bank : **BNI Tanjung Karang** dengan nomor rekening **0167755995**, a.n. **Dr. Maulana Mukhlis, S.Sos., M.IP.** sebagai penanggung jawab kegiatan penelitian **UNGGULAN** Universitas Lampung.
10. Jangka waktu pelaksanaan : 126 (Seratus Dua Puluh Enam Hari) kalender terhitung tanggal 03 Juli – 05 November 2019
11. Tanggal Penyelesaian Pekerjaan : 05 November 2019
12. Jangka waktu Pemeliharaan : -  
Ketentuan Sanksi :
  1. Apabila terjadi ketelambatan pekerjaan tanpa adanya alasan yang diterima oleh pemberi pekerjaan dikenakan sanksi/denda sebesar 1/1000 (satu permil) untuk setiap hari keterlambatan dengan denda maksimal sebesar 5%, (lima persen) dari jumlah harga borongan.
  2. Segala resiko yang timbul akibat keterlambatan pekerjaan tersebut ini sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab pihak II. Maka kami sebagai pihak I dapat membatalkan SPK secara sepihak dan pihak II tidak berhak menuntut kerugian apapun dari instansi kami.

Bandar Lampung , 03 Juli 2019

Pejabat Pembuat Komitmen LPPM Universitas Lampung,

  
**Warsono, Ph. D.**  
NIP 196302161987031003



**SURAT PERJANJIAN (KONTRAK) PEKERJAAN  
 PELAKSANAAN KEGIATAN PENELITIAN UNGGULAN  
 UNIVERSITAS LAMPUNG**

NOMOR : 2236/UN26.21/PN/2019  
 TANGGAL : 03 Juli 2019

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Tiga** bulan **Juli** tahun **Dua Ribu Sembilan Belas**, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Nama : Warsono, Ph. D
- Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen LPPM Universitas Lampung
- Alamat : Jl. Prof. Soemantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung

Selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK PERTAMA**

- 2. Nama : Dr. Maulana Mukhlis, S.Sos., M.IP.
- Jabatan : Penanggungjawab Pelaksanaan Kegiatan Penelitian Unggulan dengan Judul "*Desentralisasi Fiskal dan Implikasinya terhadap Kemandirian Daerah Pasca Pemekaran (Studi di Kabupaten Tulang Bawang, Tuba Barat, Mesuji)*."
- Alamat : Jl. Prof. Soemantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung

Selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA DAN KEDUA** berdasarkan :

1. Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010; tentang pengadaan barang/jasa pemerintah
2. Undang-undang RI nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-undang nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Keppres Nomor 42 tahun 2002 jo nomor 72 tahun 2004 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 606/KMK.66/2004 tentang Pedoman Pembayaran Pelaksanaan Anggaran;
7. DIPA Universitas Lampung Nomor DIPA-042.01.2.400954/2019, tanggal 05 Desember 2018

Dengan ini menyatakan setuju dan sepakat untuk mengikat diri dalam suatu perjanjian pelaksanaan pekerjaan, dengan ketentuan dan syarat-syarat tercantum dalam pasal-pasal ini :

## PASAL 1 LINGKUP PEKERJAAN

**PIHAK PERTAMA** memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut untuk melaksanakan dan mengkoordinir kegiatan Penelitian **UNGGULAN** dengan Judul "*Desentralisasi Fiskal dan Implikasinya terhadap Kemandirian Daerah Pasca Pemekaran (Studi di Kabupaten Tulang Bawang, Tuba Barat, Mesuji)*".

## PASAL 2 BIAYA PENELITIAN

Untuk melaksanakan kegiatan Penelitian **UNGGULAN** Unila seperti dalam pasal 1 di atas, dibiayai dari Anggaran DIPA BLU Unila TA 2018 sebesar Rp 35.000.000,- (*Tiga Puluh Lima Juta Rupiah*). Mata Anggaran Kegiatan (MAK) 042.002.001.053.C.525119 Tahun Anggaran 2018. Sudah termasuk biaya Seminar, Penerbitan Publikasi Universitas.

## PASAL 3 CARA PEMBAYARAN

Pembayaran tersebut pada pasal 2 di atas dilakukan dalam 2 tahap :

1. Tahap pertama sebesar 70% dari nilai kontrak atau sebesar 70% x Rp 35.000.000,- = Rp 24.500.000,- (*Dua Puluh Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*) setelah penandatanganan kontrak oleh kedua belah pihak dan menyerahkan proposal yang disahkan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian masyarakat Universitas Lampung.
2. Tahap kedua (terakhir) sebesar 30% dari nilai kontrak atau sebesar 30% x Rp 35.000.000,- = Rp 10.500.000,- (*Sepuluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*) setelah pekerjaan dinyatakan selesai dan dinyatakan dalam berita acara penyerahan pekerjaan dan menyerahkan laporan kegiatan, sebagai berikut:
  - a. Laporan Akhir Penelitian
  - b. Laporan Penggunaan Anggaran (Keuangan) dan E-Biling Pajak.

Luaran Wajib Berupa :

- a. Satu Artikel Ilmiah Minimal di Prosidingan Internasional Conference terindeks SCOPUS atau satu artikel di jurnal nasional SINTA 4 (DOI)
- b. Diseminarkan di forum ilmiah tingkat universitas (daerah), atau tingkat nasional, atau internasional.

Pembayaran dilakukan melalui kas Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Lampung pada pihak kedua ke nomor rekening : **0167755995 Bank BNI Tanjung Karang** atas nama : **Dr. Maulana Mukhlis, S.Sos., M.IP.** Penanggungjawab kegiatan penelitian **UNGGULAN** Universitas Lampung.

## **PASAL 4**

### **JANGKA WAKTU PELAKSANAAN**

1. Jangka waktu pelaksanaan kegiatan Penelitian **UNGGULAN** Universitas Lampung tersebut dalam pasal 1 adalah 140 (seratus empat puluh) terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian ini. Laporan ini harus diserahkan **PIHAK KEDUA** selambat-lambatnya tanggal 5 November 2019 sebanyak (3) Tiga Eksemplar.
2. Apabila laporan Penelitian tidak diselesaikan tepat pada waktunya, **PIHAK KEDUA** dapat mengajukan Adendum sebanyak 1 kali saja, dan apabila **PIHAK KEDUA** berhenti/diberhentikan dari jabatan atau dipindahkan ke instansi lain, **PIHAK KEDUA** wajib mempertanggungjawabkan penggunaan dana penelitian yang telah diterima dari **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya **PIHAK PERTAMA** berhak menunjuk orang lain untuk melaksanakan pekerjaan tersebut.

## **PASAL 5**

### **SANKSI**

1. Jika **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai dengan batas Waktu pelaksanaan yang tercantum dalam pasal 4 dalam perjanjian ini maka untuk tiap hari keterlambatan **PIHAK KEDUA** wajib membayar denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai kontrak.
2. **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab penuh apabila dalam pelaksanaan pekerjaan ini tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, atau terdapat hal – hal atau temuan pemeriksaan yang mengakibatkan kerugian negara.

## **PASAL 6**

### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

1. Jika terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, pada dasarnya akan diselesaikan secara musyawarah.
2. Jika perselisihan itu tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka akan diselesaikan oleh "panitia pendamai" yang berfungsi sebagai juri/wasit yang dibentuk dan diangkat oleh kedua belah pihak yang terdiri dari:
  - Seorang wakil dari **PIHAK PERTAMA** sebagai anggota
  - Seorang wakil dari **PIHAK KEDUA** sebagai anggota
  - Seorang pihak ketiga yang ahli sebagai Ketua, yang telah disetujui oleh **PIHAK KEDUA**
3. Keputusan panitia pendamai ini mengikat kedua belah pihak, dan biaya penyelesaian perselisihan yang dikeluarkan akan ditanggung secara bersama.
4. Jika keputusan ini sebagaimana dimaksud ayat 3 pasal ini tidak dapat diterima oleh salah satu pihak, maka penyelesaian perselisihan akan diteruskan melalui pengadilan Negeri.

**PASAL 7  
LAIN-LAIN**

1. Segala sesuatu yang belum diatur dalam surat perjanjian ini yang dipandang perlu oleh kedua belah pihak akan diatur lebih lanjut dalam surat perjanjian tambahan (*Addendum*) dan merupakan perjanjian yang tidak dapat terpisahkan dari perjanjian ini.
2. Surat perjanjian ini dibuat rangkap 4 (empat) untuk Pihak Pertama dan Pihak Kedua, selebihnya diberikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan ada hubungannya dengan pekerjaan.

**PASAL 8  
PENUTUP**

1. Surat perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak di atas materai Rp 6000,- (enam ribu rupiah) pada lembar ke satu dan lembar kedua yang mempunyai kekuatan hukum sama.
2. Perjanjian ini berlaku mulai tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak.

**PIHAK KEDUA**  
Penanggungjawab Kegiatan



**Dr. Maulana Mukhlis, S.Sos., M.IP.**  
NIP 197804302008121001

**PIHAK PERTAMA**  
Pejabat Pembuat Komitmen  
UM Universitas Lampung,



**Warsono, Ph. D.**  
NIP 1963021619870310034





**SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Warsono, Ph. D.  
NIP : 196302161987031003  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen LPPM Universitas Lampung

Menyatakan dengan sesungguhnya :

1. Perhitungan tahap I sebesar 70% yang terdapat pada kegiatan Penelitian **UNGGULAN** Unila sebesar Rp 24.500.000,- (Dua Puluh Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) telah dihitung dengan benar. Sesuai kontrak Nomor : 2236/UN26.21/PN/2019, Tanggal 03 Juli 2019.
2. Apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran kegiatan Penelitian **UNGGULAN** Unila, kami bersedia menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Negara.
3. Segala akibat yang mungkin timbul dari perubahan di atas menjadi tanggungjawab kami sepenuhnya.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

Bandar Lampung, 03 Juli 2019  
Pejabat Pembuat Komitmen,

  
Warsono, Ph. D.  
NIP 196302161987031003



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
 UNIVERSITAS LAMPUNG  
**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**  
 Gedung Rektorat Lantai 5, Jalan Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145  
 Telepon (0721) 705173, Fax. (0721) 773798, e-mail : lppm@kpa.unila.ac.id  
 www.lppm.unila.ac.id

Nomor : 2236/UN26.21/PN/2019  
 Lampiran : 1 (satu) berkas  
 Perihal : Pengajuan SPP dan SPM

03 Juli 2019

Kepada Y h.  
 Wakil Rektor II  
 Universitas Lampung  
 Di Bandar Lampung

Dengan ini kami sampaikan permohonan penerbitan SPP dan SPM untuk keperluan pembayaran tahap I sebesar 70% Kegiatan Penelitian **UNGGULAN** Universitas Lampung sebesar Rp 24.500.000,- (Dua Puluh Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang dilaksanakan sesuai dengan Surat Perjanjian nomor : 2236/UN26.21/PN/2019 Tanggal 03 Juli 2019.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Penanggungjawab Kegiatan,

Dr. Maulana Mukhlis, S.Sos., M.IP.  
 NIP 197804302008121001



BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN  
 Nomor : 2692/UN26.21/PN/2019

Pada hari **Kamis** tanggal **Empat** bulan **Juli** tahun **Dua Ribu Sembilan Belas**, kami sampaikan yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Nama : Warsono, Ph. D.  
 Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Lampung  
 Alamat : Jl. Sumantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung 35145  
**Selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama**
  
- 2. Nama : Dr. Maulana Mukhlis, S.Sos., M.IP..  
 Jabatan : Penanggung Jawab Kegiatan Penelitian Unggulan  
 Alamat : Jl. Sumantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung 35145  
**Selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua**

Dengan ini menyatakan telah dilaksanakan serah terima pertama pekerjaan pelaksanaan kegiatan Penelitian **UNGGULAN** Universitas Lampung setelah Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan di tandatangani oleh kedua belah pihak dengan pembayaran dilaksanakan dalam dua angsuran yaitu pertama sebesar 70% dan kedua 30% dari nilai pekerjaan, sebagai berikut :

- 1. **Pihak Pertama** telah menerima dari **Pihak Kedua** proposal pelaksanaan kegiatan Penelitian **UNGGULAN** Universitas Lampung sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan No : 2236/UN26.21/PN/2019, Tanggal 03 Juli 2019.
- 2. **Pihak Kedua** telah menyerahkan kepada **Pihak Pertama** proposal pelaksanaan kegiatan Penelitian **UNGGULAN** Universitas Lampung sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan No : 2236/UN26.21/PN/2019 Tanggal 03 Juli 2019

Demikian berita acara serah terima pekerjaan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PIHAK PERTAMA**  
**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN**  
**LPPM UNIVERSITAS LAMPUNG**

**Warsono, Ph. D.**  
 NIP 196302161987031003

**PIHAK KEDUA**  
**PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN**

**Dr. Maulana Mukhlis, S.Sos., M.IP.**  
 NIP 197804302008121001

TAHUN ANGGARAN  
DIPA NOMOR/TANGGAL

: 2018  
: 042.01.2.400954/2018  
: Tanggal 05 Desember 2018.  
: 042.002.001.053.C.525119

MAK

---

**KWITANSI**

SUDAH DITERIMA DARI

: Pejabat Pembuat Komitmen LPPM Universitas Lampung

BANYAKNYA UANG

: Rp 24.500.000,-

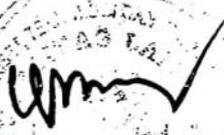
UNTUK PEMBAYARAN

: Tahap I Pekerjaan Penelitian **UNGGULAN** Universitas Lampung Tahun 2019, sesuai dengan Surat Perjanjian No.2236/UN26.21/PN/2019 Tanggal 03 Juli 2019, dan BAP No. 2768/UN26.21/PN/2019, Tanggal 05 Juli 2019.

JUMLAH

: Rp 24.500.000,-

Setuju dibayar  
Pejabat Pembuat Komitmen  
LPPM Unila,

  
Warsono, Ph. D.  
NIP 196302161987031003 ty

Bandar Lampung, 05 Juli 2019  
Yang Menerima  
Penanggungjawab Kegiatan Penelitian,



Dr. Maulana Mukhiis, S.Sos., M.IP.  
NIP 197804302008121001



**BERITA ACARA PEMBAYARAN**

Nomor : 2768/UN26.21/PN/2019

Pada hari **Jum'at** tanggal **Lima** bulan **Juli** tahun **Dua Ribu Sembilan Belas**, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Warsono, Ph. D.  
Jabatan : Pejabat Pembuat KomitmenLPPM Unila  
Alamat : Jl. Sumantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung  
**DISEBUT SEBAGAI PIHAK PERTAMA**
2. Nama : Dr. Maulana Mukhlis, S.Sos., M.IP..  
Jabatan : Penanggungjawab Kegiatan Penelitian**UNGGULAN**  
Alamat : Jl. Sumantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung  
**DISEBUT SEBAGAI PIHAK KEDUA**

Dengan ini telah melaksanakan Kegiatan Penelitian Unggulan Unila, sesuai dengan Surat Perjanjian Nomor : 2236/UN26.21/PN/2019, Tanggal 03 Juli 2019

**PIHAK KEDUA** berhak menerima pembayaran dari **PIHAK PERTAMA** sebesar 70% dari nilai kontrak atau  $70\% \times \text{Rp } 35.000.000,- = \text{Rp } 24.500.000,-$ , (Dua Puluh Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang digunakan untuk 1 kegiatan penelitian, melalui kas Badan Layanan Umum Universitas Lampung.

**PIHAK KEDUA** sepakat atas jumlah pembayaran tersebut di atas dan dibayarkan melalui Nomor rekening : **0167755995 BNI Tanjung Karang** atas nama : **Dr. Maulana Mukhlis, S.Sos., M.IP.** penanggungjawab kegiatan penelitian **UNGGULAN** Universitas Lampung.

Demikian berita acara pembayaran ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**II. PIHAK KEDUA**  
Penanggungjawab Kegiatan  
Penelitian **UNGGULAN**

**Dr. Maulana Mukhlis, S.Sos., M.IP.**  
NIP 197804302008121001

Bandar Lampung, 05 Juli 2019  
**I. PIHAK PERTAMA**  
Pejabat Pembuat Komitmen  
LPPM UNILA,

**Warsono, Ph. D.**  
NIP 196302161987031003

## SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Dr. Maulana Mukhlis, S.Sos., M.IP.
2. Alamat : Jl. Sumantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung

Berdasarkan Surat Keputusan Nomor :1587 /UN26.21/PP/2019 tanggal 21 Juni 2019 dan perjanjian kontrak Nomor : /UN26.21/PN/2019 tanggal 2 Juli 2019 mendapatkan Anggaran Penelitian dengan judul "*Desentralisasi Fiskal dan Implikasinya terhadap Kemandirian Daerah Pasca Pemekaran (Studi di Kabupaten Tulang Bawang, Tuba Barat, Mesuji).*" sebesar Rp 35.000.000,-

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Biaya kegiatan penelitian di bawah ini meliputi ;

No	Uraian	Jumlah
1	Tahap I Persiapan dan Pelaksanaan 70% x Rp 35.000.000	Rp 24.500.000
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp 24.500.000,-</b>

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1, benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan kegiatan penelitian dimaksud.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya

Bandar Lampung, 5 Juli 2019



**Dr. Maulana Mukhlis, S.Sos., M.IP..**  
NIP 197804302008121001

**LAPORAN AKHIR  
PENELITIAN UNGGULAN  
UNIVERSITAS LAMPUNG**



**DESENTRALISASI FISKAL DAN IMPLIKASINYA  
TERHADAP KEMANDIRIAN DAERAH PASCA  
PEMEKARAN  
(Studi di Kabupaten Tulang Bawang, Tuba Barat, dan Mesuji)**

**TIM PENGUSUL**

Dr. Maulana Mukhlis, M.IP

NIDN. 0030047805

Dr. Syarief Makhya, M.Si

NIDN. 0020076106

**KATEGORI PENELITIAN TERAPAN**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
2019**

**HALAMAN PENGESAHAN  
LAPORAN AKHIR  
PENELITIAN UNGGULAN UNIVERSITAS LAMPUNG**

---

Judul Penelitian : **DESENTRALISASI FISKAL DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEMANDIRIAN DAERAH PASCA PEMEKARAN (Studi di Kabupaten Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat, dan Mesuji)**

Manfaat Sosial Ekonomi : Penelitian ini memberikan manfaat sosial dan ekonomi dalam hal mewujudkan desentralisasi fiskal sebagai modal kemandirian keuangan sehingga fungsi pelayanan pemerintah dapat berjalan optimal menuju kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan akhir dari otonomi daerah

Jenis Penelitian :  penelitian dasar  penelitian terapan  
:  pengembangan eksperimental

Ketua Peneliti

a. Nama Lengkap : Dr. Maulana Mukhlis, S.Sos, M.IP  
b. NIDN : 0030047805  
c. SINTA ID : 6089500  
d. Jabatan Fungsional : Lektor  
e. Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
f. Nomor HP : 0813 68245409  
g. Alamat surel (e-mail) : maulana.mukhlis@fisip.unila.ac.id

Anggota Peneliti (1)

a. Nama Lengkap : Dr. Syarief Makhya, M.Si.  
b. NIDN : 0020076106  
c. SINTA ID : 6045889  
d. Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Jumlah mahasiswa yang terlibat : 3 (tiga) mahasiswa  
Jumlah alumni yang terlibat : 3 (tiga) alumni  
Jumlah staf yang terlibat : 1 (satu) staf  
Lokasi kegiatan : Kabupaten Tulang Bawang, Tuba Barat dan Mesuji  
Lama kegiatan : 6 (enam) bulan  
Biaya Penelitian : Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah)  
Sumber dana : DIPA BLU Universitas Lampung TA 2019

Bandar Lampung, 30 Oktober 2019

Mengetahui,  
Dekan FISIP Universitas Lampung

**Dr. Syarief Makhya**  
NIP. 19590803 198603 1 003

Ketua Peneliti

**Dr. Maulana Mukhlis, S.Sos, M.IP**  
NIP. 19780430 200812 1 001

Menyetujui,

Ketua LPPM Universitas Lampung

**Prof. Dr. Ir. Hamim Sudarsono, M.Sc**  
NIP. 19600119 198403 1002

UNIVERSITAS LAMPUNG	
11-11-2019	
231/UNT/18/Lppm/2019	
Penelitian	
ft	

**DESENTRALISASI FISKAL DAN IMPLIKASINYA TERHADAP  
KEMANDIRIAN DAERAH PASCA PEMEKARAN (Studi di Kabupaten  
Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat, dan Mesuji)**

**Maulana Mukhlis<sup>1</sup>, Syarief Makhya<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup> *Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Lampung*  
Email : [maulanamukhlis1978@gmail.com](mailto:maulanamukhlis1978@gmail.com)

**ABSTRACT**

*Theoretically, fiscal decentralization will have positive implications for economic growth, equitable development, and increased accountability and efficiency. From a government perspective, fiscal decentralization is then becoming a must-implement strategy done by the central government in order to build harmonious relations between government units both vertically and horizontally. The question emphasized in this study is that is it true that fiscal decentralization can create independence in post-expansion regions as a manifestation of performance of regional autonomy? With regard to the locus in Lampung province, such as Tulang Bawang (as the main district), Tulang Bawang Barat, and Mesuji (as expansion result). This is a descriptive study with a qualitative approach or analysis. In fact, it is proven that ten years after the expansion, the number of funds transfers from the center and economic growth in three post-expansion regions has always increased every year. However, two findings related to the relationship between fiscal decentralization and the performance of regional autonomy are found in this study. First, fiscal decentralization has been interpreted more as the submission of a sum of money to the regions so that the strategy to improve financial capacity focuses more on how much money from the center can enter the region in the form of balance funds. Second, giving authority to regions to collect sources of income in the form of local taxes and retributions tends to be more dominant for the sake of income rather than service. Therefore, even though fiscal decentralization has positive implications for economic growth in both regions (the main and expansion district), it turns out that it has not been able to realize regional independence. In a more macro context, this study has limited arguments since the performance of regional autonomy or independence is only able to be assessed on the macro-economic as well as the financial capacity side. As a matter of fact, there are more comprehensive indicators or aspects besides the two.*

**Keywords:** *fiscal decentralization; district expansion; regional autonomy.*

## ABSTRAK

Desentralisasi fiskal secara teori akan berimplikasi positif terhadap pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, serta peningkatan akuntabilitas dan efisiensi. Dalam perspektif pemerintahan, desentralisasi fiskal kemudian menjadi strategi yang wajib dijalankan oleh pemerintah pusat untuk membangun hubungan yang selaras antar unit pemerintahan baik secara vertikal maupun horizontal. Pertanyaan dalam penelitian ini adalah benarkah desentralisasi fiskal dapat mewujudkan kemandirian pada daerah-daerah pasca pemekaran sebagai wujud kinerja otonomi daerah? dengan *locus* di Provinsi Lampung, yaitu Kabupaten Tulang Bawang (sebagai kabupaten induk), Tulang Bawang Barat, dan Mesuji (hasil pemekaran). Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan atau analisa kualitatif. Secara faktual terbukti bahwa sepuluh tahun pasca pemekaran, jumlah transfer dana dari pusat maupun pertumbuhan ekonomi pada tiga kabupaten pasca pemekaran selalu meningkat setiap tahun. Namun demikian, terdapat dua temuan terkait dengan relasi antara desentralisasi fiskal dengan kinerja otonomi daerah. Pertama, desentralisasi fiskal lebih banyak dimaknai sebagai penyerahan sejumlah uang ke daerah sehingga strategi peningkatan kemampuan keuangan lebih berfokus pada seberapa besar uang dari pusat dapat masuk ke daerah dalam bentuk dana perimbangan. Kedua, pemberian wewenang kepada daerah untuk memungut sumber pendapatan dalam bentuk pajak dan retribusi daerah justru lebih dominan dilakukan demi tujuan pendapatan daripada pelayanan. Oleh karena itu, meskipun desentralisasi fiskal berimplikasi positif terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten induk maupun kabupaten pemekaran, namun ternyata belum mampu mewujudkan kemandirian daerah. Pada konteks yang lebih makro, penelitian ini memiliki keterbatasan argumentasi karena kinerja otonomi atau kemandirian daerah hanya mampu dinilai pada sisi makro-ekonomi serta sisi kemampuan keuangan. Sejatinya, terdapat indikator atau aspek yang lebih komprehensif selain keduanya.

***Kata kunci:*** desentralisasi fiskal; pemekaran kabupaten; otonomi daerah.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT; Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang karena atas anugerah-Nya, kerja keras tim peneliti untuk melakukan penelitian dan menyelesaikan laporan penelitian Skema Unggulan yang berjudul “**Desentralisasi Fiskal dan Implikasinya Terhadap Kemandirian Daerah Pasca Pemekaran (Studi di Kabupaten Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat, dan Mesuji**” ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan implikasi desentralisasi fiskal terhadap kemandirian daerah di Kabupaten Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat, dan Mesuji yakni pada aspek perkembangan Indeks Pembangunan Manusia, pertumbuhan kapasitas fiskal, penurunan ketergantungan terhadap dana perimbangan, serta penurunan *gap fiscal*; mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan desentralisasi fiskal dalam mewujudkan kemandirian daerah; serta membangun model alternatif bentuk desentralisasi fiskal yang tidak menyamaratakan posisi daerah otonom baru dengan daerah yang sudah berdiri lama.

Tim peneliti menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada Rektor Universitas Lampung, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Lampung beserta jajaran, Dekan dan para Wakil Dekan di lingkungan FISIP, Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan dan rekan-rekan dosen di Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Unila, Para narasumber penelitian yang telah berkenan menjadi narasumber dan memberikan data, serta semua pihak yang telah membantu pelaksanaan penelitian yang tidak mampu kami sebutkan satu per satu.

Akhir kata, kiranya penelitian ini memberikan manfaat baik secara teoritis dalam menata hubungan keuangan pusat dan daerah yang lebih optimal maupun praktis dalam kaitan dengan pengembangan riset-riset tentang desentralisasi fiskal. Semoga Allah SWT memberkahi usaha kita semua.

Bandar Lampung, 30 Oktober 2019  
Ketua Tim Peneliti

**Dr. Maulana Mukhlis, S.Sos, M.IP**  
NIP. 197809430 200812 1001

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>ABSTRAK</b> .....	iii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vi
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	viii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	ix

### **BAB I. PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	8
1.3. Tujuan Penelitian .....	8
1.4. Manfaat Penelitian .....	9

### **BAB II. TINJAUAN PUSTAKA**

2.1. Pemekaran Wilayah dan Iming-Iming Insentif Fiskal.....	10
2.2. Daerah Otonom Baru dan Desentralisasi Fiskal .....	12
2.3. Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi .....	14
2.4. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kesejahteraan .....	15
2.5. Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Kesejahteraan .....	16
2.6. Indikator Makro Kemandirian Daerah .....	17
2.6.1. Sisi Makro Ekonomi .....	18
2.4.2. Sisi Kesehatan Fiskal Daerah .....	21
2.7. Faktor Pendorong dan Penghambat Desentralisasi Fiskal .....	22
2.8. Peta Jalan Penelitian .....	23

### **BAB III. METODE PENELITIAN**

3.1. Tipe Penelitian .....	25
3.2. Fokus Penelitian .....	26
3.3. Sumber Data .....	28
3.4. Informan Penelitian .....	29
3.5. Teknik Pengumpulan Data .....	29
3.6. Teknik Pengolahan Data .....	30
3.7. Teknik Analisis Data .....	31
3.8. Teknik Validasi Data .....	32
3.9. Lokasi, Waktu, dan Jadwal Penelitian .....	32

### **BAB IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

4.1. Kabupaten Tulang Bawang .....	34
4.1.1. Geografis .....	34
4.1.2. Demografis .....	34

4.1.3. Perekonomian Daerah .....	39
4.1.4. Keuangan Daerah .....	44
4.1.5. Kondisi Sosial .....	46
4.2. Kabupaten Tulang Bawang Barat .....	47
4.2.1. Geografis .....	47
4.2.2. Demografis .....	47
4.2.3. Perekonomian Daerah .....	48
4.2.4. Keuangan Daerah .....	50
4.2.5. Kondisi Sosial dan Kemiskinan .....	51
4.3. Kabupaten Mesuji .....	52
4.3.1. Geografis .....	52
4.3.2. Demografis .....	53
4.3.3. Perekonomian Daerah .....	53
4.3.4. Keuangan Daerah .....	54
4.3.5. Kondisi Sosial dan Kemiskinan .....	55

## **BAB V. HASIL DAN PEMBAHASAN**

5.1. Implikasi Desentralisasi Fiskal Pada Sisi Makro Ekonomi Daerah .....	56
5.1.1. Pertumbuhan Ekonomi .....	57
5.1.2. Angka Partisipasi Angkatan Kerja .....	58
5.1.3. Indeks Pembangunan Manusia .....	59
5.1.4. Ketimpangan Antar Daerah .....	62
5.1.5. Kemiskinan .....	63
5.2. Implikasi Desentralisasi Fiskal Pada Sisi Kesehatan Fiskal Daerah .....	66
5.2.1. Kapasitas Fiskal Daerah .....	68
5.2.2. Indeks Kemampuan Rutin .....	70
5.2.3. Kesenjangan Fiskal Daerah .....	71
5.3. Faktor Pendorong dan Penghambat Desentralisasi Fiskal .....	73
5.3.1. Faktor Internal .....	74
5.3.2. Faktor Eksternal .....	75

## **BAB VI. SIMPULAN DAN SARAN**

6.1. Simpulan .....	76
6.2. Tawaran Model Asimetri Desentralisasi Fiskal .....	78
6.2. Saran .....	79

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

- Daftar riwayat hidup peneliti
- Naskah Prosiding Seminar Nasional (*publish*)
- Naskah Jurnal Nasional Terakreditasi (*accepted*)

## DAFTAR TABEL

Tabel 1	:	Jumlah Transfer DAU Tahun 2012-2017	5
Tabel 2	:	Rata-Rata Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2012-2017	5
Tabel 3	:	Persentase Jumlah Penduduk Miskin Tahun 2012-2017	5
Tabel 4	:	Jadual Pelaksanaan Penelitian	32
Tabel 5	:	Jumlah Penduduk Kabupaten Tulang Bawang Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2016	38
Tabel 6	:	Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Tulang Bawang Menurut Lapangan Usaha (2012-2016)	39
Tabel 7	:	PDRB Kabupaten Tulang Bawang Menurut Lapangan Usaha Tahun 2012-2016	41
Tabel 8	:	Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tulang Bawang 2012-2017	44
Tabel 9	:	Target dan Realisasi Dana Perimbangan Kabupaten Tulang Bawang 2012-2017	45
Tabel 10	:	Target dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2017	45
Tabel 11	:	Angka Partisipasi Kasar di Kabupaten Mesuji Tahun 2012-2016	54
Tabel 12	:	Data Pertumbuhan Ekonomi 3 (Tiga) Kabupaten Lokasi Studi	57
Tabel 13	:	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	59
Tabel 14	:	Perkembangan Nilai IPM	60
Tabel 15	:	Jumlah dan Perkembangan Penduduk Kabupaten Mesuji 2012-2016	60
Tabel 16	:	Perbandingan IPM Kab/Kota di Provinsi Lampung	62
Tabel 17	:	Kapasitas Fiskal Tiga Kabupaten Lokasi Studi Tahun Kabupaten 2015	62
Tabel 18	:	Kapasitas Fiskal Tiga Kabupaten Lokasi Studi Tahun Kabupaten 2016	62
Tabel 19	:	Kapasitas Fiskal Tiga Kabupaten Lokasi Studi Tahun Kabupaten 2017	63
Tabel 20	:	Jumlah Penduduk Miskin Tiga Kabupaten Lokasi Studi	64
Tabel 21	:	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Mesuji	65
Tabel 22	:	Rasio Derajat Otonomi Fiskal	69
Tabel 23	:	Derajat Otonomi Fiskal	69
Tabel 24	:	Rasio Kemampuan Fiskal	70
Tabel 25	:	Indeks Kemampuan Rutin	70
Tabel 26	:	Kesenjangan Fiskal Daerah	71

## DAFTAR GAMBAR/BAGAN

Gambar 1	:	Posisi Penelitian dibanding Penelitian yang Pernah Ada	7
Gambar 2	:	Hubungan Otonomi Daerah dan Kesenjangan Ekonomi antar Wilayah	20
Gambar 3	:	Peta Jalan Penelitian	24
Gambar 4	:	Diagram Alir Tahapan Penelitian	27
Gambar 5	:	Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2012-2017	35
Gambar 6	:	Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2017 (Jiwa/Km <sup>2</sup> )	36
Gambar 7	:	Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Tulang Bawang 2012-2017	36
Gambar 8	:	Jumlah Penduduk Kabupaten Tulang Bawang Menurut Jumlah Usia 2016	37
Gambar 9	:	Piramida Penduduk Kabupaten Tulang Bawang Menurut Kelompok Umur	38
Gambar 10	:	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tulang Bawang dan Provinsi Lampung Tahun 2012-2016	40
Gambar 11	:	Perkembangan Angka Melek Huruf Tahun 2013-2016	46
Gambar 12	:	Perbandingan IPM Kab. Mesuji dengan Kab/Kota di Lampung	61
Gambar 13	:	Perkembangan Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Mesuji	66

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Otonomi daerah yang mulai diterapkan di Indonesia sejak tahun 2001 dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah telah menghasilkan berbagai implikasi menyangkut aspek kewenangan unit pemerintahan, kelembagaan pemerintahan, hubungan antar pemerintahan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu implikasi penting dari pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia adalah adanya pembagian kewenangan yang lebih tegas antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam pola desentralisasi. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015) diperkuat dengan berbagai peraturan turunannya semakin menegaskan adanya pembagian kewenangan atau urusan pemerintahan tersebut.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menegaskan bahwa hanya kewenangan pada urusan politik luar negeri, pertahanan keamanan, yustisi (peradilan), keuangan (moneter dan fiskal), serta agama yang mutlak dimiliki pemerintah pusat. Selain kelima hal itu, seluruh urusan (wajib maupun pilihan) merupakan kewenangan bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota) dengan tanggung jawab penyelenggaraannya lebih banyak dimiliki oleh daerah sebagai konsekuensi dari otonomi daerah. Pembagian kewenangan ini merupakan substansi dari perubahan pola desentralisasi sebagai pilihan atas kegagalan sentralisasi yang selama 32 tahun Orde Baru dianggap sebagai biang kegagalan negara dalam menciptakan kesejahteraan dan keadilan di Indonesia.

Alasan beralihnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dari sentralisasi menuju desentralisasi melalui otonomi daerah dapat dilihat dari pendapat [Sjafrizal \(2002:16\)](#). Menurutnya sentralisasi yang berada dalam kendali pemerintah pusat ternyata telah menimbulkan permasalahan pembangunan yang sangat serius. *Pertama*, proses pembangunan daerah secara keseluruhan menjadi

kurang efisien dan ketimpangan wilayah semakin besar. Keadaan tersebut terjadi karena sistem pembangunan yang terpusat cenderung mengambil kebijakan yang seragam dan mengabaikan perbedaan potensi daerah yang sangat besar. Dengan demikian, banyak potensi daerah baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang belum dapat dimanfaatkan secara maksimal. Sementara itu, daerah yang potensi daerahnya kebetulan sesuai dengan kebijakan nasional akan bertumbuh cepat, sedangkan daerah yang potensinya tidak sesuai dengan prioritas pembangunan nasional akan cenderung tertekan pertumbuhan ekonominya. Akibatnya, ketimpangan pembangunan antar wilayah cenderung melebar yang selanjutnya cenderung pula mendorong terjadinya keresahan sosial di daerah.

*Kedua*, sistem pembangunan yang sangat terpusat menimbulkan ketidakadilan yang sangat besar dalam alokasi sumber daya nasional, terutama dana pembangunan. Keadaan tersebut terlihat dari banyaknya provinsi yang kaya sumber daya alam, tetapi tingkat kesejahteraan masyarakatnya ternyata masih sangat rendah dan ketinggalan dibandingkan dengan daerah lain. Salah satu bentuk desentralisasi kewenangan adalah pada urusan fiskal atau keuangan. Meskipun urusan fiskal sebenarnya merupakan kewenangan pemerintah pusat namun sebagai konsekuensi dari desentralisasi kewenangan kepada daerah terhadap urusan-urusan tertentu maka daerah juga diberikan kewenangan dalam urusan keuangan untuk menunjang pembangunan di daerah.

Pemberian kewenangan dimaksud kemudian disebut dengan kebijakan desentralisasi fiskal yang secara praktik diwujudkan dalam bentuk transfer dana perimbangan serta hak dan kewenangan bagi daerah untuk memungut sumber pendapatan di daerahnya. Oleh karena itu, sebagai instrumen dari otonomi daerah, kebijakan desentralisasi fiskal adalah wujud dari paradigma keselarasan hubungan pemerintah pusat dan daerah. Dalam perspektif manajemen pemerintahan, desentralisasi fiskal kemudian menjadi strategi yang wajib dijalankan oleh pemerintah pusat untuk membangun hubungan yang selaras antar unit pemerintahan baik secara vertikal maupun horizontal.

Secara teori, Mardiasmo (dalam [Nurman, 2013:3](#)) menyatakan bahwa desentralisasi fiskal diharapkan dapat memberi manfaat dalam hal: (i) mengurangi kesenjangan fiskal baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (*vertical fiscal imbalance*) maupun antar daerah yang satu dengan daerah yang lain

(*horizontal fiscal imbalance*); (ii) meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah dan mengurangi kesenjangan pelayanan publik antar daerah; (iii) meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya; (iv) peningkatan tata kelola yang transparan dan akuntabel dalam pelaksanaan kegiatan pengalokasian transfer ke daerah sehingga tepat sasaran, tepat waktu, efisien, dan adil; serta (v) mendukung kesinambungan fiskal dalam kebijakan ekonomi makro. Adapun secara praktis, menurut [Abimanyu dan Megantara \(2009:64\)](#) desentralisasi fiskal akan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Pentingnya desentralisasi fiskal paling lengkap ditegaskan oleh [World Bank \(1997a\)](#) yang memberikan argumentasi bahwa desentralisasi fiskal akan meningkatkan efisiensi ekonomi di sektor pengeluaran pemerintah dan efek dinamisnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, terdapat hubungan positif antara desentralisasi fiskal dengan pertumbuhan ekonomi dan argumentasi ini mendapatkan justifikasi yang sangat kuat melalui pengalaman banyak negara di dunia ([World Bank, 1997a](#)).

Pengaruh desentralisasi fiskal di Indonesia terhadap pertumbuhan ekonomi telah dijelaskan oleh beberapa penelitian. Penelitian [Wibowo \(2008\)](#) menegaskan bahwa desentralisasi fiskal di Indonesia selama periode 1999-2004 secara umum memberikan pengaruh positif terhadap pembangunan daerah. Hasil penelitiannya memperlihatkan bahwa era baru desentralisasi fiskal yang diluncurkan sejak tahun 2001 telah memberikan dampak yang relatif lebih baik terhadap pembangunan daerah dibandingkan dengan rezim sebelumnya. Hal ini juga diperkuat oleh pendapat [Simanjuntak \(2010:45\)](#) yang menegaskan bahwa potret perekonomian nasional dan tingkat kesejahteraan masyarakat cenderung meningkat dari tahun ke tahun sejalan dengan peningkatan sumber-sumber pendanaan daerah sebagai konsekuensi dari kebijakan desentralisasi fiskal.

Popularitas desentralisasi fiskal dan implikasi positifnya dalam pencapaian berbagai tujuan sebagaimana tersebut di atas menjadi argumen yang kemudian banyak melatarbelakangi hasrat atau keinginan untuk melakukan pemekaran wilayah. [Mardiasmo \(dalam Nurman, 2013:6\)](#) menyatakan bahwa adanya adagium bahwa “semakin banyak unit pemerintahan otonom di suatu daerah maka akan semakin besar dampaknya pada jumlah transfer dana ke daerah” menjadi salah satu asumsi atau motif utama dari keinginan untuk melakukan pemekaran wilayah.

Secara lebih detail, Amri (2000:16) menyatakan bahwa terdapat dua motif utama dari tuntutan-tuntutan masyarakat tentang perlunya pembentukan daerah otonomi baru dan disertai dengan desentralisasi fiskal, yaitu motif ekonomi untuk mendapatkan keadilan dan pemerataan serta motif politik yaitu tuntutan demokratis untuk mengakhiri sentralisasi pengelolaan keuangan oleh pemerintah pusat. Pertama adalah motif ekonomi untuk mendapatkan keadilan dan pemerataan. Selama ini daerah yang memiliki sumber daya alam yang berlimpah tidak dapat memanfaatkannya karena pajaknya diberikan kepada Pemerintah Pusat. Data tahun anggaran 1995/1996 menunjukkan bahwa 90% penerimaan pajak dan non pajak dipungut oleh Pemerintah Pusat dan hanya 10% yang diterima Pemerintah Dati I (provinsi) dan Dati II (kabupaten/kota). Namun perlu digarisbawahi bahwa tidak semua daerah kaya akan sumber daya alam. Banyak sekali daerah yang tidak memiliki *resources*, oleh karena itu dapat dimaklumi bahwa provinsi yang paling lantang berteriak otonomi adalah provinsi-provinsi dengan sumber daya alam yang berlimpah.

Kedua adalah motif politik, yaitu tuntutan demokratis untuk mengakhiri sentralisasi. Sudah menjadi rahasia umum bahwa masyarakat Indonesia, terutama yang berada di daerah, menginginkan keterlibatan yang lebih besar dalam manajemen urusan pemerintahan sehari-hari. Masyarakat di daerah mendambakan pemerintahan yang memberikan keleluasaan kepada daerah untuk mengatur dan menentukan sendiri apa yang ingin mereka lakukan dan bagaimana melakukannya karena itulah pengertian dasar dari otonomi.

Salah satu kabupaten di Provinsi Lampung yang melakukan pemekaran wilayah adalah Kabupaten Tulang Bawang. Pada tahun 2008, Kabupaten Tulang Bawang dimekarkan menjadi tiga daerah otonom baru dengan Undang Undang Nomor 49 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Mesuji dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Tulang Bawang Barat. Secara faktual, selama kurun waktu sepuluh tahun pasca pemekaran hingga tahun 2018, jumlah transfer dana perimbangan dari pemerintah pusat kepada ketiga daerah pasca pemekaran meningkat secara kuantitas setiap tahunnya. Pertumbuhan ekonomi di ketiga kabupaten ini juga menunjukkan *trend* peningkatan. Namun pada sisi lain ternyata masih menunjukkan sesuatu dampak yang tidak signifikan.

Pada Tabel 1 dan Tabel 2 terlihat bahwa implementasi desentralisasi fiskal di Kabupaten Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat, dan Mesuji telah berpengaruh positif terhadap naiknya jumlah transfer dana perimbangan (gabungan antara Dana Alokasi Umum <DAU> dan Dana Alokasi Khusus <DAK> sekaligus berimplikasi positif terhadap rata-rata pertumbuhan ekonomi selama periode lima tahun terakhir (2012-2017). Namun demikian, pada tabel 3 dapat dijelaskan bahwa meskipun terjadi penurunan persentasi jumlah penduduk miskin sebagai salah satu implikasi dari pertumbuhan ekonomi tetapi penurunan besarnya jumlah penduduk miskin pada akumulasi ketiga kabupaten hanya sebesar 0,7% atau masih di bawah rata-rata penurunan persentasi penduduk miskin di Provinsi Lampung sebesar 1,1%.

**Tabel 1.** Jumlah Transfer DAU Tahun 2012-2017

Kabupaten	Jumlah DAU (Tahun, dalam milyar rupiah)					
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Tulang Bawang	412.608	482,230	533,313	548,942	614,655	614,655
Tulang Bawang Barat	423,456	427,765	439,123	442,703	464,431	465,116
Mesuji	389,565	402,564	412,789	429,897	447,672	448,282

*Sumber : Data BPS , 2019*

**Tabel 2.** Rata-Rata Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2012-2017

Kabupaten	Rata-Rata Pertumbuhan Ekonomi (Tahun, dalam persen)					
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Tulang Bawang	5,2	5,4	5,5	5,0	5,4	5,7
Tulang Bawang Barat	5,3	5,4	5,4	4,9	5,2	5,5
Mesuji	5,7	5,7	5,7	5,4	5,1	5,3

*Sumber : Data BPS , 2019*

**Tabel 3.** Persentase Jumlah Penduduk Miskin Tahun 2012-2017

Kabupaten	Persentase Jumlah Penduduk Miskin (Tahun, dalam persen)					
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Tulang Bawang	9,4	8,0	8,9	9,7	9,6	9,6
Tulang Bawang Barat	35,7	26,7	20,2	21,8	22,3	21,8
Mesuji	7,2	6,6	6,6	8,2	8,4	8,4

*Sumber : Data BPS (diolah), 2019*

Sebenarnya penelitian mengenai desentralisasi fiskal sudah sangat banyak dilakukan. Apabila ditelaah, penelitian yang pernah dilakukan dalam kaitan dengan isu desentralisasi fiskal berfokus pada dua aspek (kategorisasi), yaitu pada aspek

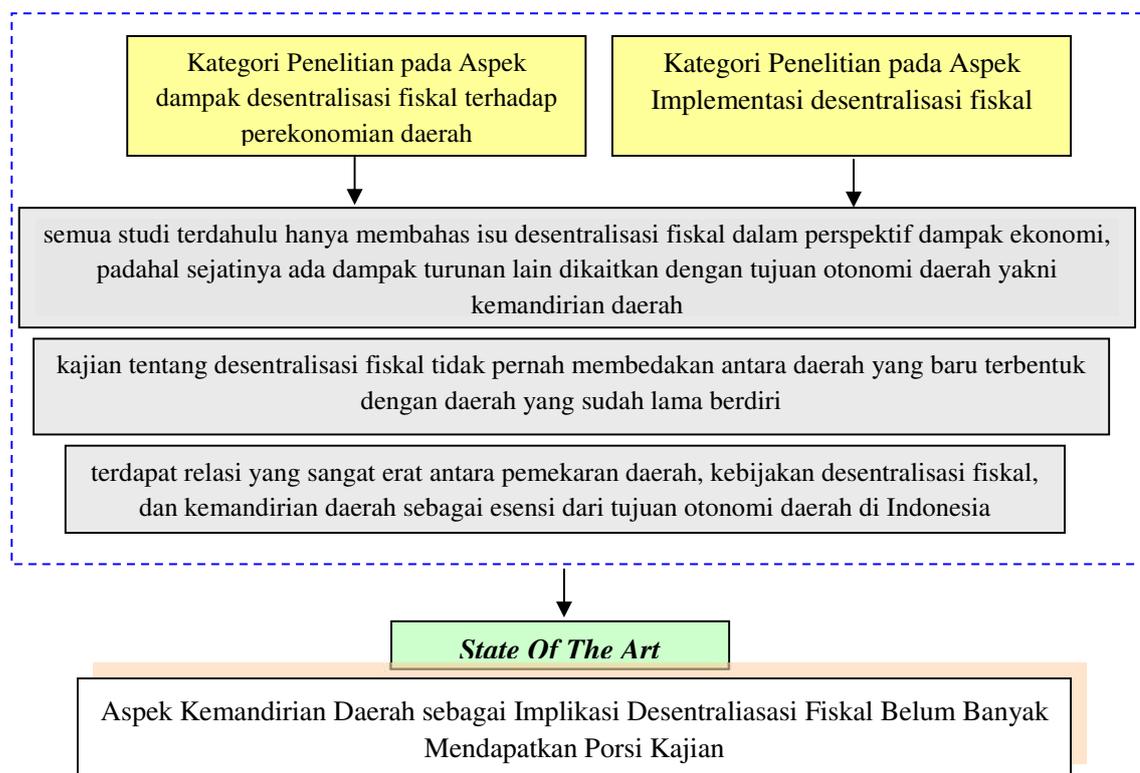
dampak desentralisasi fiskal terhadap perekonomian daerah serta pada aspek implementasi desentralisasi fiskal di suatu daerah tertentu. Pada aspek pertama, telah menarik perhatian banyak ahli internasional, seperti [Bird and Vaillancourt \(2000\)](#); [Martinez dan McNab \(2001\)](#); [World Bank \(1997a\)](#); [Bahl dan Linh \(1992\)](#); dan [Gramlich \(2003\)](#). Seluruhnya menyatakan bahwa dengan diserahkannya beberapa kewenangan kepada pemerintah daerah termasuk dalam hal pembiayaan maka pelayanan masyarakat semakin efisien dan pada gilirannya mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Kemudian juga dengan tegas dijelaskan oleh beberapa penelitian lain yang dilakukan oleh [Prud'homme \(1995\)](#), [Peterson \(1996\)](#) serta [Phillips dan Woller \(1997\)](#) untuk kasus di negara maju, serta Zang dan Zao (dalam [Saputra, 2012](#)) dalam penelitiannya di negara berkembang yang menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif antara desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah baik di negara maju maupun negara berkembang.

Adapun pada aspek kedua tentang implementasi desentralisasi fiskal di daerah tertentu, misalnya dilakukan oleh [Saputra \(2012\)](#), [Nurman \(2013\)](#), [Sumardi \(2014\)](#), [Sasana \(2015\)](#), serta [Rosdiana, dkk \(2015\)](#). Berbagai penelitian tersebut selain mengkonfirmasi adanya pengaruh positif desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi juga menyoroti tentang bagaimana desentralisasi fiskal diimplementasikan. Kendala dan faktor yang mempengaruhi keberhasilan desentralisasi fiskal menjadi rekomendasi dari sebagian riset pada kategorisasi kedua ini. Pada intinya, perdebatan tentang desentralisasi mencakup banyak isu dan dalam kaitannya dengan manajemen makroekonomi. Menurut Simanjuntak (2010, dalam [Saputra, 2012:185](#)), isu-isu kunci yang menonjol dalam kaitan dengan manajemen makroekonomi adalah pengaruh desentralisasi terhadap pertumbuhan ekonomi, pemerataan, inflasi, serta pelayanan publik.

Berdasarkan dua kategorisasi tersebut, maka penelitian ini memiliki *state of the art* yang tinggi karena terdapat *research gap* yang nyata, minimal oleh tiga argumen. *Pertama*, bahwa hampir semua studi terdahulu hanya membahas isu desentralisasi fiskal dalam perspektif dampak ekonomi atau dalam perspektif manajemen makroekonomi, padahal sejatinya ada dampak turunan lain dikaitkan dengan tujuan otonomi daerah yakni dampak atau manfaat bagi kemandirian daerah dalam perspektif manajemen pemerintahan. *Kedua*, bahwa kajian tentang desentralisasi fiskal tidak pernah membedakan antara daerah yang baru terbentuk

dengan daerah yang sudah lama berdiri, padahal dari aspek apapun daerah otonom baru tentu masih membutuhkan banyak intervensi pihak luar sehingga *locus* pada daerah otonom baru penting untuk dilakukan. *Ketiga*, terdapat relasi yang sangat erat antara pemekaran daerah, kebijakan desentralisasi fiskal, dan kemandirian daerah sebagai esensi dari tujuan otonomi daerah di Indonesia, namun demikian aspek kemandirian daerah ini belum banyak mendapatkan porsi kajian.

**Bagan 1.** Posisi Penelitian dibanding Penelitian yang Pernah Ada (*State Of The Art*)



Pada sisi urgensi penelitian, minimal terdapat empat hal penting yang melatarbelakangi pentingnya penelitian ini. *Pertama*, pemekaran daerah yang dilakukan di Kabupaten Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat, dan Kabupaten Mesuji yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat masih menunjukkan adanya tingkat kemiskinan yang berada di atas rata-rata tingkat kemiskinan Provinsi Lampung (13,14%) dan rata-rata nasional (9,82%). *Kedua*, desentralisasi fiskal yang meskipun dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi ternyata tidak berdampak signifikan pada status fiskal ketiga kabupaten. *Ketiga*, adanya *research gap* yang terjadi pada berbagai studi terdahulu bahwa pengaruh positif desentralisasi fiskal selalu hanya dilakukan terhadap dampak ekonomi,

belum ditemukan adanya riset yang mengkaji relasi antara pemekaran daerah, desentralisasi fiskal, dan kemandirian daerah sebagai esensi dari implementasi otonomi daerah di Indonesia. *Keempat*, gejala pemekaran wilayah secara nyata semakin memberatkan pemerintah pusat dalam hal peningkatan jumlah transfer dana perimbangan yang cukup besar kepada pemerintah daerah sementara pada sisi yang lain dampak terhadap kemandirian daerah serta kesejahteraan masyarakat daerah belum terbukti positif.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang serta *research gap* tersebut di atas, maka rumusan pertanyaan (*research question*) dalam penelitian ini, adalah:

- (1) Apakah desentralisasi fiskal sebagai salah satu konsekuensi dari pemekaran daerah di Kabupaten Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat, dan Mesuji berimplikasi positif terhadap kemandirian daerah pada ketiga daerah tersebut?
- (2) Faktor apa yang mempengaruhi berhasil tidaknya pelaksanaan desentralisasi fiskal dalam mewujudkan kemandirian daerah di Kabupaten Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat, dan Mesuji?
- (3) Bagaimanakah model alternatif bentuk desentralisasi fiskal yang perlu dilakukan bagi daerah otonom baru pasca pemekaran wilayah?

## 1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini dibangun atas dasar rumusan pertanyaan yang ditetapkan, yaitu untuk:

- (1) Mendeskripsikan implikasi desentralisasi fiskal terhadap kemandirian daerah di Kabupaten Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat, dan Mesuji yakni pada aspek perkembangan IPM, pertumbuhan kapasitas fiskal, penurunan ketergantungan terhadap dana perimbangan, serta penurunan *gap fiscal*.
- (2) Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan desentralisasi fiskal dalam mewujudkan kemandirian daerah.
- (3) Membangun model alternatif bentuk desentralisasi fiskal yang tidak menyamaratakan posisi daerah otonom baru dengan kabupaten/kota yang sudah berdiri lama.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Secara teori, hasil dari penelitian ini akan memberikan kontribusi pada pengembangan Ilmu Pemerintahan khususnya tentang pola hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yang ideal. Adapun secara praktis, penelitian ini akan menghasilkan temuan berupa gambaran implikasi desentralisasi fiskal terhadap kemampuannya mewujudkan kemandirian daerah sebagai tujuan utama otonomi daerah di kabupaten pasca pemekaran. Mampu atau tidaknya desentralisasi fiskal mewujudkan kemandirian daerah tentu dipengaruhi oleh faktor-faktor determinan. Temuan faktor-faktor determinan juga akan menjadi *novelty* dari penelitian ini. Akumulasi dari kedua temuan tersebut adalah tawaran model alternatif tentang perbedaan formula kebijakan desentralisasi fiskal antara daerah yang baru berdiri pasca pemekaran dengan daerah yang sudah lama terbentuk.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Pemekaran Wilayah dan Iming-Iming Insentif Fiskal**

Fenomena pemekaran daerah pasca reformasi di Indonesia sangat masif terjadi. Menurut Ketua Pansus Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemerintah Daerah dalam diskusi membedah RUU Pemda pada tahun 2014 mengatakan bahwa Pemerintah mengakui pemekaran daerah tidak terkendali. Selama kurun waktu 54 tahun (1945-1999) jumlah daerah di Indonesia hanya sebanyak 319, akan tetapi dalam kurun waktu 10 tahun desentralisasi dan otonomi daerah (1999-2009) sudah terdapat tambahan 205 DOB (daerah otonom baru). Diketahui bahwa kinerja sebagian besar DOB tersebut kurang baik, sementara DPR kembali mengusulkan penambahan 19 DOB. Dari 19 usulan pemekaran daerah tersebut, hanya lima daerah yang lolos menjadi DOB termasuk Provinsi Kalimantan Utara menjadi provinsi ke-34. Namun dalam catatan Kementerian Dalam Negeri masih terdapat usulan 33 provinsi baru dan 150 calon kabupaten/kota lagi (Kusworo, 2012, dalam [Temrini, 2014:1-2](#)).

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah menjadi pemicu terjadinya fenomena pemekaran daerah tersebut. Sejak tahun 1999 – 2009 (selama 10 tahun) telah terbentuk DOB sebanyak 7 provinsi, 164 kabupaten dan 34 kota, sehingga total terjadi penambahan 205 DOB dalam sepuluh tahun atau rata-rata 20 DOB per tahun. Tujuan dilakukan pemekaran daerah tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000 tentang Persyaratan Pembentukan Dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah. Dalam Bab II Pasal 2 UU tersebut, dinyatakan bahwa pembentukan, pemekaran, penghapusan dan penggabungan daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui: (i) peningkatan pelayanan kepada masyarakat; (ii) percepatan pertumbuhan kehidupan demokrasi; (iii) percepatan pelaksanaan pembangunan perekonomian daerah; (iv) percepatan pengelolaan potensi daerah; (v) peningkatan keamanan dan ketertiban; serta (vi) peningkatan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah.

Sementara alasan dilakukannya pemekaran daerah dijabarkan dalam bagian penjelasan PP Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan,

Penghapusan, dan Penggabungan Daerah. Pada bagian penjelasan disebutkan bahwa berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, pembentukan daerah pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Pembentukan daerah dapat berupa pemekaran dari satu daerah menjadi dua daerah atau lebih, atau penggabungan bagian daerah yang bersandingan, atau penggabungan beberapa daerah.

Dasar pertimbangan pembentukan daerah adalah berdasarkan pertimbangan kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah, dan pertimbangan lain. Diharapkan daerah otonom baru dapat mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya setempat menurut prakarsa sendiri. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka ditetapkanlah syarat-syarat dan kriteria yang dirumuskan dalam PP Nomor 129 Tahun 2000 meliputi (i) kemampuan ekonomi; (ii) potensi daerah; (iii) sosial budaya; (iv) sosial politik; (v) jumlah penduduk; (vi) luas daerah dan (vii) pertimbangan lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah.

Menurut Tenrini (2014:2-9) dari beberapa kajian tentang pemekaran daerah diketahui bahwa terdapat beberapa alasan yang menjadi dasar pengajuan usulan pemekaran daerah tersebut dan satu diantaranya adalah adanya iming-iming insentif fiskal. Adanya iming-iming insentif fiskal yang akan didapatkan merupakan alasan yang sering digunakan oleh pemegang kekuasaan untuk melakukan pemekaran daerah. Insentif fiskal tersebut antara lain adanya anggaran tersendiri dari pemerintah pusat yang terpisah dari pemerintah daerah induk. Sebagaimana diketahui daerah yang dimekarkan akan mendapatkan anggaran dari daerah induk selama 3 tahun dan mendapatkan dana dari pemerintah pusat (DAU dan DAK).

Hal ini juga dikemukakan oleh Taufiq C. Dawood (2007, dalam Tenrini, 2014:4) dimana salah satu alasan mengapa pemekaran dilakukan adalah bahwa desentralisasi dapat memberikan dana yang lebih besar untuk dapat dikelola oleh setiap pemerintah daerah (khususnya Dana Alokasi Umum). Fitrani *et al.* (2005, dalam Tenrini, 2014:6) menyatakan juga bahwa pemekaran telah membuka peluang terjadinya *bureaucratic and political rent-seeking*, yakni kesempatan untuk memperoleh keuntungan dana, baik dari pemerintah pusat maupun dari penerimaan daerah sendiri. Akan tetapi terbukanya peluang tersebut juga berisiko menimbulkan

dampak negatif yaitu karena adanya tuntutan untuk menunjukkan kemampuan menggali potensi wilayah, maka banyak daerah menetapkan berbagai pungutan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini menyebabkan terjadinya suatu perekonomian daerah berbiaya tinggi. Lebih jauh lagi timbul pula tuduhan bahwa pemekaran daerah merupakan bisnis kelompok elit di daerah yang sekedar menginginkan jabatan dan posisi. Euforia demokrasi dan partai-partai politik yang memang terus tumbuh, dimanfaatkan kelompok elit ini untuk menyuarakan "aspirasinya" mendorong terjadinya pemekaran.

Akan tetapi apabila insentif fiskal tersebut tidak dapat dikelola dengan baik maka tujuan akhir dilakukannya pemekaran daerah yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya akan sulit tercapai. Dalam kajian Bappenas bekerja sama dengan UNDP (2008) disebutkan bahwa keuangan pemerintah daerah tidak saja mencerminkan arah dan pencapaian kebijakan fiskal dalam mendorong pembangunan di daerah secara umum, tetapi juga menggambarkan sejauh mana tugas dan kewajiban yang diembankan pada pemerintah daerah (kabupaten/kota) dalam konteks desentralisasi fiskal itu dilaksanakan.

## **2.2 Daerah Otonom Baru dan Desentralisasi Fiskal**

Pengembangan otonomi pada daerah kabupaten dan kota diselenggarakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Selain birokrasi harus partisipatif, juga harus mampu mendorong terciptanya *good governance*. Perbaikan pelayanan publik oleh pemerintah daerah di era desentralisasi merupakan hal yang tidak dapat ditunda lagi karena merupakan salah satu indikator kesiapan daerah dalam menghadapi globalisasi yang sarat dengan persaingan dan liberalisme, arus impor, investasi, tenaga kerja, dan budaya, selain itu dari sisi internal perbaikan pelayanan publik yang semakin cerdas (*knowledge based society*) dan masyarakat yang semakin banyakuntutannya (*demanding community*) (Mardiasmo, 2004:45).

Desentralisasi merupakan peralihan kewenangan dari lingkungan pusat (*central government*) ke lingkungan pemerintah daerah (*local government*), untuk mengatur dan mengurus daerahnya berdasarkan kondisi riil yang mengitarinya (Kaloh, 2002:16). Dalam melaksanakan desentralisasi fiskal, prinsip (*rules*) *money*

*should follow function* merupakan salah satu prinsip yang harus diperhatikan dan dilaksanakan (Bahl, 2000:78). Artinya, setiap penyerahan atau pelimpahan wewenang pemerintahan membawa konsekuensi pada anggaran yang diperlukan untuk melaksanakan kewenangan tersebut. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam kerangka NKRI (Kumorotomo, 2008:67).

Berdasarkan uraian di atas maka urgensi dari otonomi daerah dan desentralisasi fiskal dapat dijelaskan dengan beberapa alasan sebagai berikut (Bird and Vaillancourt, 2000):

1. Sebagai perwujudan fungsi dan peran negara modern, yang lebih menekankan upaya memajukan kesejahteraan umum.
2. Hadirnya otonomi daerah dapat pula didekati dari perspektif politik. Negara sebagai organisasi, kekuasaan yang didalamnya terdapat lingkungan kekuasaan baik pada tingkat suprastruktur maupun infrastruktur, cenderung menyalahgunakan kekuasaan. Untuk menghindari hal itu, perlu pemencaran kekuasaan.
3. Dari perspektif manajemen pemerintahan negara modern, adanya kewenangan yang diberikan kepada daerah, yaitu berupa keleluasaan dan kemandirian untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya, merupakan perwujudan dari adanya tuntutan efisiensi dan efektivitas pelayanan kepada masyarakat demi mewujudkan kesejahteraan.

Bahl (2000:79) mengemukakan bahwa desentralisasi harus memacu adanya persaingan di antara berbagai pemerintah lokal untuk menjadi pemenang (*there must be a champion for fiscal decentralization*). Hal ini dapat dilihat dari semakin membaiknya pelayanan publik. Pemerintah lokal berlomba-lomba untuk memahami benar dan memberikan apa yang terbaik yang dibutuhkan oleh masyarakatnya, perubahan struktur ekonomi masyarakat dengan peran masyarakat yang semakin besar meningkatkan kesejahteraan rakyat, partisipasi rakyat setempat dalam pemerintahan dan lain-lain. Desentralisasi fiskal memang tidak secara jelas dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Namun, komponen dana perimbangan merupakan

sumber penerimaan daerah yang sangat penting dalam pelaksanaan desentralisasi. Dalam kebijakan fiskal, dana perimbangan merupakan inti dari desentralisasi fiskal.

### **2.3 Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi**

Menurut [Abimanyu dan Megantara \(2009:14\)](#) desentralisasi fiskal akan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, karena pemerintah daerah akan lebih efisien dalam produksi dan penyediaan barang-barang publik. Pengambilan keputusan pada level pemerintah lokal akan lebih didengarkan untuk menganeekaragamkan pilihan lokal dan lebih berguna bagi efisiensi alokasi.

Penelitian lain juga menghasilkan temuan bahwa desentralisasi fiskal dapat mendorong efisiensi ekonomi dan secara dinamis akan mendorong pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Para peneliti ini berargumen bahwa pengeluaran untuk infrastruktur dan sektor sosial akan efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu daerah, karena daerah mengetahui karakteristik daerahnya masing-masing. Jadi menurut pandangan ini pemerintah daerah dipercaya dapat mengalokasikan dana kepada sektor ekonomi secara efisien daripada dilakukan oleh pemerintah pusat. Namun hal tersebut tidak akan terjadi jika desentralisasi fiskal tidak berjalan secara efektif ([Martinez dan McNab, 2011:16](#)).

Argumentasi paling lengkap dibuat oleh World Bank (1997a), bahwa desentralisasi fiskal dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara langsung. Terdapat tiga mekanisme dampak desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi. Argumentasi pertama mengatakan bahwa desentralisasi fiskal akan meningkatkan efisiensi ekonomi di sektor pengeluaran pemerintah dan akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Terdapat hubungan positif antara desentralisasi fiskal dengan pertumbuhan ekonomi. Argumentasi kedua, bahwa desentralisasi akan menyebabkan instabilitas makroekonomi sehingga akan mengganggu pertumbuhan ekonomi. Terdapat hubungan negatif antara desentralisasi fiskal dengan pertumbuhan ekonomi. Argumentasi ketiga mengatakan bahwa dampak desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi akan berbeda antara negara maju dengan berkembang. Namun, argumentasi pertama lebih mendapat justifikasi yang kuat.

Di Indonesia, pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi telah dijelaskan oleh beberapa penelitian. Penelitian Wibowo (2008) menegaskan bahwa desentralisasi fiskal di Indonesia secara umum memberikan pengaruh positif terhadap pembangunan daerah selama periode 1999-2004. Hasil penelitian juga memperlihatkan bahwa era baru desentralisasi fiskal yang diluncurkan sejak tahun 2001 ternyata memberikan dampak yang relatif lebih baik terhadap pembangunan daerah dibandingkan dengan rezim desentralisasi fiskal sebelumnya. Kemudian Simanjuntak (2010:76) menegaskan bahwa potret perekonomian nasional dan tingkat kesejahteraan masyarakat cenderung meningkat sejalan dengan peningkatan sumber pendanaan daerah sebagai implikasi desentralisasi fiskal.

#### **2.4. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kesejahteraan Masyarakat**

Tujuan akhir dari kebijakan dan kegiatan ekonomi adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam hal ini pertumbuhan ekonomi yang berarti implementasi kebijakan dan perluasan kegiatan ekonomi adalah satu-satunya cara untuk meningkatkan penghasilan anggota masyarakat dan membuka lapangan kerja baru. Sementara itu, menurut Boediono (2009:29), stabilitas ekonomi adalah satu-satunya cara untuk melindungi agar penghasilan masyarakat yang kita upayakan meningkat tidak digerogeti oleh keanikan harga. Pertumbuhan ekonomi dan stabilitas ekonomi bersama-sama adalah kunci peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Hubungan pertumbuhan ekonomi dengan kesejahteraan masyarakat kemudian juga didukung dengan hipotesis "*trickle down effect*" (dampak merembes ke bawah) yang melekat pada "*growth paradigm*" yang menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang cepat akan menetes ke kesejahteraan masyarakat (pembangunan manusia) (lihat Kuncoro, 2004:116). Bhalla (1994) membawa perspektif lain yang menghubungkan antara demokrasi, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat (pembangunan manusia). Ia menemukan pengaruh positif demokrasi terhadap pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, sebuah rezim demokratik cenderung lebih melindungi *property* dan hak kontrak yang sangat penting untuk berjalannya mekanisme pasar yang didorong oleh sektor swasta. Menurut Kuncoro (2004:117) walaupun Bhalla tidak secara langsung meneliti hubungan antara

pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat (pembangunan manusia) dengan membalik sebab akibat, penemuannya mengimplikasikan hipotesis “*trickle down effect*” terhadap kesejahteraan masyarakat. Perhatiannya adalah pada daya tahan demokrasi. Ketika demokrasi berjalan dengan baik, pertumbuhan ekonomi akan berjalan dengan cepat dan akan menetes pada kesejahteraan masyarakat (pembangunan manusia).

Dalam perspektif makro ekonomi hubungan tersebut dijelaskan oleh [Mankiw \(2007: 536-537\)](#) dengan menyatakan bahwa, “dalam jangka panjang, kapasitas negara untuk memproduksi barang dan jasa menentukan standar hidup penduduknya.” Mankiw menjelaskan salah satu ukuran kesejahteraan ekonomi terbaik adalah PDB. PDB riil mengukur output barang serta jasa total perekonomian dan karena itu, kemampuan negara untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan para penduduknya. Negara dengan PDB lebih tinggi memiliki hampir segalanya lebih baik: rumah-rumah yang lebih besar, lebih banyak mobil, lebih banyak penduduk melek huruf, perawatan kesehatan yang lebih baik, harapan hidup yang lebih panjang, dan lebih banyak koneksi internet.

Berbeda dengan hipotesis “*trickle down effect*”, Barro (1991) menemukan hubungan sebab akibat antara tingkat kematian bayi dan pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi yang juga sejalan dengan teori “*human capital*”. Dengan menyusun hubungan tersebut, Barro (1991) menolak hipotesis “*trickle down effect*” yang menyatakan bahwa kesejahteraan masyarakat (pembangunan manusia) hanya dapat dicapai melalui pertumbuhan ekonomi yang cepat.

## **2.5. Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Kesejahteraan Masyarakat**

Lindahman dan Thurmaier (2002, dalam [Saputra, 2012:139](#)) meneliti tentang dampak desentralisasi fiskal terhadap kesejahteraan masyarakat yang diukur dari pencapaian masyarakat atas kebutuhan dasar (*basic needs*), yaitu pendidikan yang lebih baik dan penduduk yang sehat. Mereka menggunakan variabel desentralisasi penerimaan dan pengeluaran untuk melihat variabel desentralisasi dan *human development index* untuk melihat *basic needs*. Hasil kajian empirik menemukan bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh positif terhadap pencapaian kebutuhan dasar bagi masyarakat. Hal ini sesuai dengan argumentasi di mana

desentralisasi fiskal akan membuat pemerintah daerah lebih mengetahui apa yang menjadi keinginan dan kebutuhan masyarakatnya. Namun, walaupun desentralisasi fiskal dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, di sisi lain juga dapat menimbulkan konsekuensi yang tidak diinginkan, misalnya ketimpangan antar daerah, ketidakstabilan makroekonomi, dan sebagainya.

Di Indonesia, penelitian lain yang menjelaskan pengaruh desentralisasi fiskal terhadap kesejahteraan masyarakat diantaranya Hirawan (2007) menyatakan bahwa Indonesia mengalami perbaikan cukup signifikan dalam berbagai aspek di era otonomi daerah. Di bidang pendidikan, misalnya, dorongan pemerintah pusat untuk membangun sekolah-sekolah di setiap daerah telah meningkatkan tingkat pendaftaran (*enrollment rate*) cukup tinggi. Berbagai indikator di bidang kesehatan masyarakat juga menunjukkan adanya per-baikannya/peningkatan selama beberapa tahun terakhir; belanja publik secara riil untuk kesehatan dari tahun 2001-2006 naik hampir 100%. Juga Simanjuntak (2010) menegaskan bahwa potret perekonomian nasional dan tingkat kesejahteraan masyarakat yang cenderung meningkat dari tahun ke tahun memang sejalan dengan peningkatan sumber-sumber pendanaan daerah, karena desentralisasi fiskal.

## **2.6 Indikator Makro Kemandirian Daerah**

Tangkilisan (2007) menyebutkan bahwa ciri utama yang menunjukkan suatu daerah yang mampu otonom terlihat dari kemampuan keuangan daerah. Artinya, daerah otonom harus mempunyai kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerahnya. Ketergantungan pada pemerintah pusat harus seminimal mungkin bukan berarti harus ditiadakan tetapi PAD harus menjadi bagian sumber keuangan daerah terbesar.

Banyak pengamat cenderung mengatakan bergantung pada pemerintah pusat untuk mendapat dana merupakan hal buruk sedangkan mampu berdiri sendiri dalam keuangan merupakan hal baik. Devas (1989) berpendapat bahwa hal tersebut bukanlah yang menjadi pokok pertanyaan mengenai tingkat ketergantungan pendanaan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat tetapi sampai seberapa jauh

ketergantungan pemerintah daerah pada bantuan pemerintah pusat dalam mempengaruhi pengalokasian dana untuk untuk pilihan dan pelaksanaan proyek karena hal tersebut berpengaruh pada pembangunan jangka panjang.

### 2.6.1. Sisi Makro Ekonomi

Berdasarkan pendapat Halim (2001:679) indikator untuk menilai keberhasilan desentralisasi fiskal adalah pada aspek sisi makro-ekonomi dan sisi kesehatan fiskal. Pada aspek sisi makro-ekonomi, kinerja otonomi daerah dan dampaknya terhadap indikator kunci pembangunan dapat dinilai dari beberapa variabel, misalnya:

- pertumbuhan ekonomi
- tingkat partisipasi angkatan kerja
- kenaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
- penurunan ketimpangan antar wilayah
- pengentasan kemiskinan atau tingkat kesejahteraan

Pertumbuhan ekonomi adalah perubahan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per tahun menurut harga konstan tahun 2000, yang dinyatakan dalam satuan persen. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang amat penting dalam melakukan analisis tentang pembangunan ekonomi yang terjadi pada suatu perekonomian. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian dalam menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode waktu. Aktivitas perekonomian merupakan proses penggunaan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan suatu aliran balas jasa terhadap faktor produksi yang dimiliki oleh masyarakat. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi maka diharapkan pendapatan masyarakat sebagai pemilik faktor produksi juga akan turut meningkat.

Indikator yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi adalah tingkat pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB). Susanti (2007) merangkum beberapa alasan yang mendasari pemilihan pertumbuhan PDB sebagai indikator pertumbuhan, antara lain:

1. PDB adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh aktivitas produksi di dalam perekonomian. Hal ini berarti peningkatan PDB juga mencerminkan peningkatan balas jasa kepada faktor produksi yang digunakan dalam aktivitas produksi tersebut.

2. PDB dihitung atas dasar konsep aliran (*flow concept*). Hal ini berarti perhitungan PDB hanya mencakup nilai produk yang dihasilkan pada periode tertentu. Perhitungan ini tidak mencakup nilai produk yang dihasilkan pada periode sebelumnya. Dengan adanya konsep aliran dalam menghitung PDB maka dimungkinkan untuk membandingkan jumlah output yang dihasilkan pada tahun ini dengan tahun sebelumnya.
3. Batas wilayah perhitungan PDB adalah suatu perekonomian domestik, baik negara maupun wilayah regional tertentu. Hal ini memungkinkan untuk mengukur sejauh mana kebijaksanaan-kebijaksanaan ekonomi yang diterapkan pemerintah mampu mendorong aktivitas perekonomian domestik.

Data PDB yang digunakan adalah data PDB atas dasar harga konstan. Dengan menggunakan data harga konstan maka pertumbuhan PDB semata-mata hanya mencerminkan pertumbuhan output yang dihasilkan perekonomian pada periode tertentu karena pengaruh perubahan harga terhadap nilai PDB telah dihilangkan.

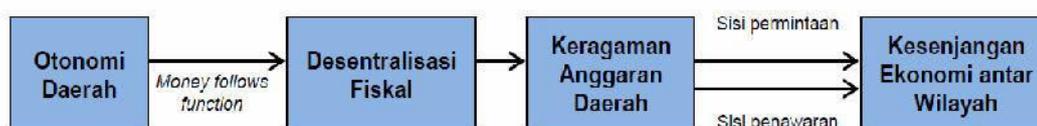
Berikutnya, perkembangan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di suatu daerah sangat dipengaruhi oleh produktifitas masyarakat (tenaga kerja) yang bekerja sehingga mengurangi tingkat pengangguran di daerah tersebut. Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) merupakan rasio antara banyaknya angkatan kerja dengan banyaknya penduduk usia kerja. TPAK dipergunakan sebagai indikator ketenagakerjaan untuk memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari merujuk pada suatu waktu dalam periode tertentu. Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja atau punya pekerjaan atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran.

Faktor ketenagakerjaan yang berimplikasi terhadap tercapainya standar hidup layak bersama dengan faktor pendidikan dan kesehatan menjadi variabel kinerja otonomi daerah berikutnya. Indikator standar hidup layak, pendidikan, dan kesehatan tersebut menjadi variabel penetapan IPM. Secara konsep, IPM merupakan indeks komposit yang dihitung sebagai rata-rata-sederhana dari tiga indeks yang menggambarkan kemampuan dasar manusia dalam memperluas pilihan-pilihan, yaitu: Indeks Harapan Hidup, Indeks Pendidikan, dan Indeks Standar Hidup Layak (Syaifullah dan Malik, 2017:25).

Pelaksanaan Otonomi Daerah dikhawatirkan membawa efek samping disparitas pendapatan antar wilayah. Hal ini disebabkan karena Otonomi Daerah membawa konsekuensi desentralisasi fiskal yang cenderung membuat anggaran antar daerah lebih beragam. Keragaman anggaran daerah berpotensi menciptakan kesenjangan ekonomi antar wilayah, karena Pemerintah Daerah akan mengutamakan kesejahteraan warganya tanpa berkewajiban mengurus kesejahteraan daerah lain. Berkaitan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia, kesenjangan ekonomi antar wilayah tentu akan kontra produktif bagi penguatan NKRI.

Secara teoretis maupun empiris di Indonesia. Disparitas anggaran yang cenderung semakin besar dapat terjadi karena pelaksanaan desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal sebagai konsekuensi dari Otonomi Daerah berdampak pada kewenangan Pemerintah Daerah yang lebih luas dalam penerimaan daerah termasuk PAD dan DBH. Komponen PAD dan DBH antar daerah sangat beragam karena potensi pajak dan sumberdaya alam antar daerah juga beragam. Daerah yang memiliki potensi pajak yang tinggi atau sumber daya alam melimpah cenderung mendapat penerimaan lebih besar. Perbedaan penerimaan antar daerah semakin lebar sejak pemberlakuan UU No. 28 Tahun 2009 karena komponen PAD bertambah dengan PBB dan BPHTB.

Secara umum, hubungan Otonomi Daerah dan kesenjangan ekonomi antar wilayah dapat dilihat pada Gambar 1. Pelaksanaan Otonomi Daerah membawa konsekuensi desentralisasi fiskal yang cenderung membuat anggaran daerah lebih beragam. Karena besar pengeluaran pemerintah tergantung dari besar penerimaan, maka keragaman penerimaan pemerintah daerah akan berdampak pada keragaman pengeluaran. Pengeluaran daerah kaya cenderung lebih besar daripada pengeluaran daerah miskin. Selanjutnya, perbedaan pengeluaran berdampak pada output yang dihasilkan, dimana output daerah kaya akan lebih tinggi daripada output daerah miskin.



**Bagan 2.** Hubungan Otonomi Daerah dan Kesenjangan Ekonomi antar Wilayah

Adapun kesejahteraan masyarakat adalah tingkat layak hidup masyarakat yang diindikasikan oleh kondisi ekonomi dan keadaan sosial masyarakat. Dalam studi ini variabel kesejahteraan masyarakat diproksi dengan data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik.

### **2.6.2. Sisi Kesehatan Fiskal Daerah**

Adapun kinerja otonomi daerah dan dampaknya terhadap kesehatan fiskal daerah sebagai tujuan desentralisasi fiskal pada sisi kesehatan fiskal dapat dilihat dari variabel:

- pertumbuhan kapasitas fiskal
- penurunan ketergantungan dana perimbangan
- penurunan *gap* atau kesenjangan fiskal

Kapasitas fiskal dimaknai secara sederhana adalah kemampuan fiskal (keuangan) di suatu daerah sehingga pertumbuhan kapasitas fiskal adalah kondisi atau *trend* kemampuan keuangan yang cenderung meningkat. Semakin tinggi tingkat derajat kemandirian daerah suatu daerah maka semakin mampu pula daerah dalam membiayai pengeluarannya sendiri tanpa bantuan dari pemerintah pusat. Analisis *trend* kemandirian keuangan daerah digunakan untuk mengetahui arah perkembangan kemandirian keuangan daerah tersebut. Apabila persentase *trend* KKD lebih dari 100%, maka telah terjadi perkembangan KKD. Semakin besar persentase *trend* KKD dari tahun ke tahun maka arah perkembangan kemandirian keuangan di suatu daerah semakin baik. Sebaliknya, bila persentase kurang dari 100% maka terjadi penurunan kemandirian keuangan di daerah tersebut.

Kapasitas fiskal akan berimplikasi pada penurunan ketergantungan dana perimbangan yaitu kondisi di mana sebuah daerah memiliki kemampuan keuangan untuk secara maksimal membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah sehingga tingkat ketergantungannya kepada pemerintah pusat semakin mengecil. Semakin tinggi kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah akan semakin tinggi kemampuan daerah untuk membiayai kemampuannya sendiri hal ini menunjukkan kinerja keuangan daerah yang positif. Jika kinerja keuangan daerah positif dapat diartikan sebagai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai kebutuhan daerah dan mendukung otonomi daerah.

Terakhir adalah *gap fiscal* atau kesenjangan fiskal yaitu selisih antara kemampuan keuangan dengan kebutuhan pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio efektivitas menggambarkan kemampuan daerah semakin baik, Semakin tinggi Rasio Kemandirian berarti tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern (terutama pemerintah pusat atau provinsi) semakin rendah dan semakin tinggi rasio desentralisasi fiskal, semakin baik kemampuan daerah dalam menjalankan tanggung jawab serta dalam menggali dan mengelola pendapatan yang dimiliki. Pembangunan daerah yang dilaksanakan secara otonom harus disertai dengan penguatan penerimaan fiskal daerah sebagai landasan bagi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Tingkat kemandirian suatu daerah dapat diukur dari kemampuan pendapatan asli daerah dalam membiayai pembangunan daerahnya. Jika suatu daerah semakin mandiri maka pendapatan asli daerah akan semakin mampu membiayai pembangunan daerahnya sendiri, sehingga dana alokasi umum kepada daerah tersebut akan semakin kecil.

## **2.7. Faktor-Faktor Pendorong atau Penghambat Desentralisasi Fiskal**

Teori implementasi kebijakan dari [Abidin \(2004:191-197\)](#) komprehensif dan realistis sebagai landasan analisis untuk membahas faktor pendorong atau penghambat desentralisasi fiskal. Teori ini dapat dirumuskan secara sederhana dengan intisari sebagai berikut:

1. Bahwa proses implementasi kebijakan (termasuk fiskal) ditentukan oleh dukungan dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.
2. Dukungan faktor internal kebijakan secara elaboratif meliputi:
  - (1). Subtansi kebijakan, bahwa suatu kebijakan dianggap berkualitas dan mampu dilaksanakan jika memiliki substansi :
    - a. tujuan, bahwa tujuan yang ingin dicapai atau alasan yang dipakai untuk membuat kebijakan itu dikatakan baik, jika tujuan itu (1) dapat dipahami atau diterima oleh akal sehat; serta (2) diinginkan atau dalam arti bahwa tujuan kebijakan itu memenuhi kepentingan orang banyak.
    - b. asumsi, bahwa asumsi yang dipakai dalam proses perumusan kebijakan itu realistis atau tidak mengada-ada.
    - c. informasi, bahwa informasi yang digunakan cukup lengkap dan benar atau tidak kadaluarsa.

- (2). Sumber daya, yaitu meliputi :
  - a. Sumber Daya Aparatur, yaitu dukungan aparat pelaksana kebijakan;
  - b. Anggaran, yaitu dukungan biaya bagi pelaksanaan kebijakan;
  - c. Sarana, yaitu dukungan peralatan dan pelaksanaan kebijakan.
3. Dukungan faktor eksternal kebijakan secara elaboratif meliputi :
  - (1) Kondisi lingkungan kebijakan, menyangkut kondisi sosial politik dan ekonomi.
  - (2) Dukungan masyarakat, yaitu dukungan masyarakat sebagai sasaran (objek) kebijakan yang diimplementasikan.

## 2.8 Peta Jalan Penelitian

Berbagai teori maupun fakta menunjukkan bahwa kebijakan desentralisasi fiskal selalu berimplikasi positif terhadap pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan peningkatan akuntabilitas serta efisiensi. Dalam perspektif pemerintahan, desentralisasi fiskal kemudian menjadi pilihan wajib bagi suatu negara untuk membangun hubungan yang selaras antar unit pemerintahan baik secara vertikal maupun horizontal. Pada konteks ini, derajat desentralisasi fiskal akan berpengaruh terhadap kemandirian suatu daerah sehingga menjadi salah satu indikator dari keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah.

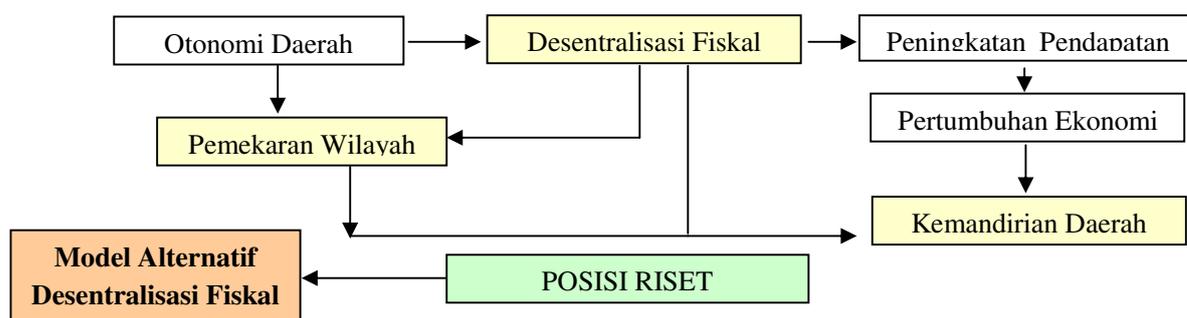
Namun demikian, terdapat tiga isu mendasar terkait dengan relasi antara otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. *Pertama*, hampir seluruh daerah memaknai desentralisasi fiskal sebagai sekadar penyerahan sejumlah uang ke daerah sehingga tuntutanannya lebih berfokus pada seberapa besar uang dari pusat dapat masuk ke daerah. *Kedua*, pemberian wewenang kepada daerah untuk memungut sumber pendapatan di daerah dalam bentuk pajak dan retribusi daerah lebih dominan dilakukan secara pragmatis demi tujuan pendapatan sebesar-besarnya, akibatnya 90% lebih Perda yang dibentuk lebih berorientasi pada motif pendapatan dibandingkan pelayanan. *Ketiga*, meskipun desentralisasi fiskal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi namun ternyata belum mampu menyelesaikan masalah disparitas keuangan antar wilayah secara tuntas.

Atas dasar itu, terdapat kesenjangan yang memerlukan kajian, bahwa meskipun desentralisasi fiskal memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi, namun benarkah desentralisasi fiskal tersebut dapat mewujudkan

kemandirian daerah, terutama bagi daerah pasca pemekaran yaitu Kabupaten Tulang Bawang (sebagai kabupaten induk), Tulang Bawang Barat, dan Mesuji (hasil pemekaran)?. Bahwa sepuluh tahun pasca pemekaran, jumlah transfer dana dari pusat serta pertumbuhan ekonomi pada tiga kabupaten tersebut selalu meningkat setiap tahun. Namun demikian, kajian tentang apakah peningkatan pertumbuhan ekonomi sebagai konsekuensi dari desentralisasi fiskal berimplikasi positif terhadap kemandirian daerah sangat relevan diketengahkan.

Hasil dari penelitian ini akan mampu memberikan peta jalan bagi lahirnya kebijakan pemerintah, terutama ketika secara praktik terbukti bahwa desentralisasi fiskal yang meski secara nyata telah berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi namun tidak mampu memberikan implikasi positif terhadap kemandirian daerah. Kajian pada daerah otonom baru atau daerah hasil pemekaran penting dilakukan karena tujuan awal pemekaran daerah sejatinya adalah kemandirian daerah.

**Bagan 3. Peta Jalan Penelitian**



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Tipe Penelitian**

Pendekatan penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan tipe evaluasi deskripsi (*evaluation and description research*) dan bersifat studi kasus yakni kasus kebijakan desentralisasi fiskal di Kabupaten Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat, dan Mesuji Lampung. Menurut [Danim \(1997:29\)](#) penelitian evaluasi ini menekankan kepada upaya membuat pertimbangan terhadap kemanfaatan kebijakan atau program dengan melakukan penjelasan (deskriptif) rasional atas evaluasi kemanfaatan kebijakan atau program tersebut. Dalam perspektif kebijakan, penelitian ini adalah penelitian atau studi evaluasi kebijakan

Penelitian tentang penilaian atau evaluasi terhadap dampak merupakan sarana yang penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan atau program dalam rangka mengetahui besaran manfaat atau keuntungan yang dihasilkan oleh kebijakan atau program tersebut. Pada dasarnya evaluasi dampak ditujukan untuk memberikan umpan balik dan membantu memperbaiki efektivitas kebijakan atau program. Informasi yang didapat dari evaluasi dampak menjadi pijakan bagi pengambilan keputusan apakah akan meneruskan, melakukan modifikasi, atau bahkan menghilangkan sama sekali suatu kebijakan atau program.

Evaluasi dampak kebijakan memberikan sumbangan dalam memperbaiki efektivitas kebijakan atau program dengan memberikan rekomendasi sekitar: (i) pencapaian tujuan, (ii) perubahan dampak secara simultan, (iii) variasi dampak di antara kelompok penerima manfaat yang berbeda, dan (iv) efektivitas program dibandingkan dengan program alternatif.

Terdapat dua pendekatan utama dalam mengukur dampak suatu kebijakan atau program yakni, "*with and without approach*" dan "*before and after approach*". Pendekatan "*with and without*" memerlukan jenis kebijakan atau program lain yang sejenis yang berfungsi sebagai pembanding. Sedangkan pendekatan "*before and after*" memerlukan kondisi sebelum dan setelah *treatment* diberikan pada kebijakan atau program bersangkutan, dalam hal ini kebijakan desentralisasi fiskal. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah

pendekatan *before and after approach*. Dalam mengukur dampak, penelitian ini tidak semata-mata mengandalkan data kuantitatif yang terukur saja namun juga menggunakan data kualitatif yang bersumber dari hasil wawancara.

Danim (1997:29-30) menambahkan bahwa kedua analisis penelitian tersebut dipastikan tidak dapat dipertentangkan karena sifatnya saling mengisi satu sama lain karena keduanya merupakan usaha untuk mengkaji masalah-masalah sosial yang fundamental dalam kaitannya untuk mengkreasi *pragmatic course of action* dalam rangka memperbaiki atau membenahi suatu masalah.

Adapun Riduwan (2002:5) menegaskan bahwa pendekatan ini mengandalkan *human instrument* dalam mengakumulasi data empirik melalui wawancara yang mendalam maupun data sekunder untuk selanjutnya dilakukan analisis induktif guna memperoleh deskripsi faktual yang utuh yang menjelaskan implikasi desentralisasi fiskal terhadap kemandirian daerah pada daerah hasil pemekaran dan daerah induk serta faktor pendorong atau penghambat atas implikasi positif maupun negatif.

### 3.2. Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada dua tujuan utama implikasi kebijakan desentralisasi fiskal terhadap kemandirian daerah serta faktor yang mempengaruhi positif-negatifnya implikasi desentralisasi fiskal. Pada aspek pertama, variabel yang dianalisis pada implikasi desentralisasi fiskal difokuskan pada dua aspek, yakni pertama pada aspek makro ekonomi, menyangkut:

- a. Pertumbuhan ekonomi pada tiga daerah lokasi studi sebagai implikasi kebijakan desentralisasi fiskal.
- b. Perkembangan angka partisipasi angkatan kerja.
- c. Penurunan ketimpangan antar wilayah yakni ketiga daerah hasil pemekaran.
- d. Pengurangan kemiskinan di daerah.

Kedua, aspek kinerja otonomi daerah dan dampaknya terhadap kesehatan fiskal daerah sebagai tujuan desentralisasi fiskal dilihat dari variabel:

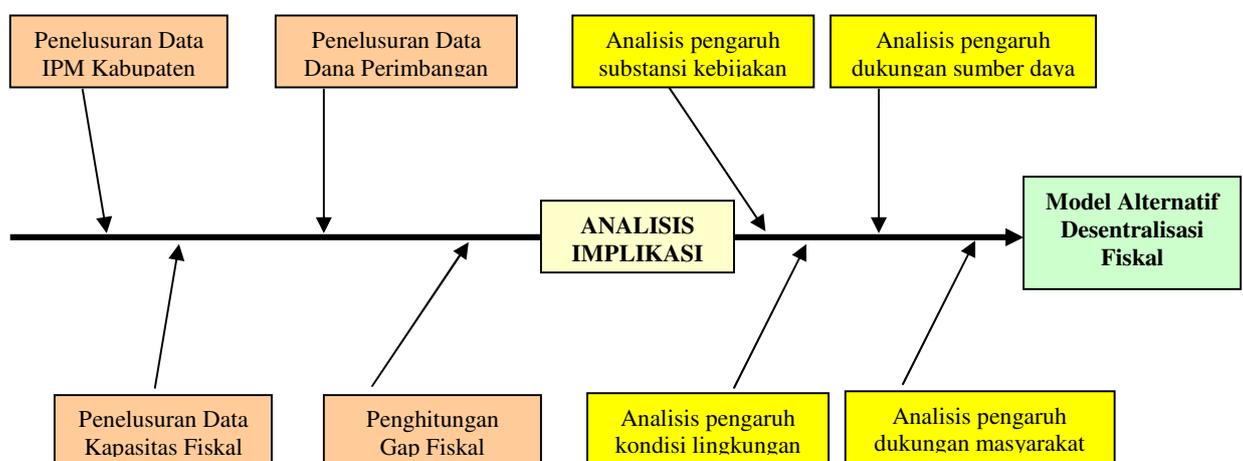
- a. Pertumbuhan kapasitas fiskal.
- b. Penurunan ketergantungan terhadap dana perimbangan.
- c. Penurunan *gap fiscal* atau kesenjangan fiskal.

Adapun untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi berhasil tidaknya desentralisasi fiskal memberikan implikasi pada kemandirian daerah difokuskan pada dua variabel, yaitu:

- a. Faktor internal, meliputi substansi kebijakan dan dukungan sumber daya.
- b. Faktor eksternal, meliputi kondisi lingkungan dan dukungan masyarakat.

Tahapan serta substansi luaran yang dilakukan dan dicapai dalam penelitian ini dapat digambarkan pada diagram tulang ikan berikut.

**Bagan 4.** Diagram Alir Tahapan Penelitian



- *Penelusuran data IPM kabupaten*, menghasilkan data perkembangan IPM di Kabupaten Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat dan Mesuji selama kurun waktu 2012-2017. Kenaikan IPM menunjukkan indikator keberhasilan makro-ekonomi dari implikasi desentralisasi fiskal., begitu pula sebaliknya.
- *Penelusuran data kapsitas fiskal*, menghasilkan data perkembangan indeks kapasitas fiskal daerah di Kabupaten Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat dan Mesuji selama kurun waktu 2012-2017. Semakin tinggi kapasitas fiskal daerah, akan menjadi implikasi positif dari desentralisasi fiskal di daerah tersebut, demikian pula sebaliknya.
- *Penelusuran data dana perimbangan*, menghasilkan perkembangan jumlah DAU yang didapatkan oleh Kabupaten Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat dan Mesuji selama kurun waktu lima tahun terakhir dan seberapa besar persentasi dana perimbangan tersebut dibanding jumlah APBD. Semakin rendah rasio dana perimbangan terhadap APBD akan menjadi indikasi dari

- keberhasilan desentralisasi fiskal, demikian pula sebaliknya.
- *Penghitungan gap fiscal*, menghasilkan data kesenjangan fiskal yang diperoleh dari perhitungan kebutuhan fiskal dikurangi dengan kapasitas fiskal. Semakin rendah *gap* fiskal di daerah tersebut maka akan menjadi indikasi dari keberhasilan desentralisasi fiskal, demikian pula sebaliknya.
  - *Analisis implikasi*, adalah simpulan awal terhadap keempat variabel penentu keberhasilan desentralisasi fiskal sehingga akan terlihat implikasi positif maupun implikasi negatif antara desentralisasi fiskal dengan kemandirian daerah.
  - Positif atau negatifnya implikasi desentralisasi fiskal terhadap kemandirian daerah selanjutnya akan dianalisis faktor-faktor yang mendorong atau menghambatnya secara internal maupun eksternal. Faktor internal meliputi substansi kebijakan dan dukungan sumber daya. Adapun faktor eksternal meliputi kondisi lingkungan dan faktor dukungan masyarakat terhadap kebijakan.
  - Model alternatif desentralisasi fiskal adalah indikator akhir dari hasil penelitian unggulan yang dilakukan ini.

### 3.3 Sumber Data

Menurut [Moleong \(2005:157\)](#) sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan yang didapat dari informan melalui wawancara, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain meskipun data-data tersebut pada penelitian ini adalah data yang mutlak harus didapatkan. Sumber data adalah benda, hal, atau orang maupun tempat yang dapat dijadikan sebagai acuan peneliti untuk melakukan pengumpulan maupun analisis data penelitian. Data dalam penelitian ini berupa data primer dan sekunder.

Data yang berkaitan dengan angka (jumlah dana perimbangan, pertumbuhan ekonomi, dan sebagainya) diperoleh dari data yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan DJAPK Subdirektorat Dana Perimbangan maupun BPS atau Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat, dan Mesuji selama periode 2012-2017. Adapun data PAD dan APBD secara umum diperoleh dari laporan realisasi APBD pada tiga kabupaten lokasi penelitian tahun anggaran 2002-2017. Sedangkan data primer diperoleh dari wawancara dengan beberapa informan

yang dipilih yaitu Kepala BAPPEDA serta Kepala BPKAD pada tiga kabupaten lokasi penelitian.

### 3.4 Informan Penelitian

Menurut Faisal (1990:78) agar lebih terbukti perolehan informasinya, maka ada beberapa kriteria yang dipertimbangkan oleh peneliti dalam menentukan informan dalam penelitian ini yaitu :

1. Subyek yang telah lama dan intensif dengan suatu kegiatan atau medan aktivitas yang menjadi sasaran atau perhatian penelitian.
2. Subyek yang masih terikat secara penuh dan aktif pada lingkungan atau kegiatan yang menjadi sasaran atau perhatian penelitian.
3. Subyek yang mempunyai cukup informasi banyak waktu dan kesempatan untuk dimintai keterangan.

Berdasarkan ketiga pertimbangan tersebut, yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah:

1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tulang Bawang (Dr. Rustam Effendi).
2. Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mesuji (Hendra, M.IP).
3. Staf keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Sobirin, S.AN).
4. Widyaiswara Keuangan Badan Pengembangan SDM Provinsi Lampung (Lukmansyah, SE., MT).
5. Kepala Bidang pada Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung (Fauzi, M.Si)
6. Staf Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Lampung (Shyntya Gugah).

### 3.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Wawancara Mendalam (*in-depth interview*)

Wawancara mendalam dalam penelitian ini dilakukan dengan jalan bertanya pada sumber-sumber data (informan yang disebutkan di atas) dengan mengajukan beberapa pertanyaan. Wawancara yang digunakan dalam penelitian

adalah wawancara terbuka dan wawancara tidak berstruktur. Wawancara terbuka adalah wawancara yang dilakukan terhadap subyek atau narasumber yang telah mengetahui makna dan tujuan dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti sehingga ketepatan penentuan informan menjadi sangat penting. Oleh karena itu, penambahan informan dalam pelaksanaan penelitian masih sangat mungkin untuk dilakukan sesuai dengan kebutuhan.

#### 4. Dokumentasi

Dalam hal ini adalah segala hal yang terkait dengan data-data lain dalam bentuk dokumen yang memiliki relevansi dengan penelitian ini yaitu seluruh hasil atau data-data kinerja keuangan daerah di Kabupaten Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat, dan Mesuji.

### 3.6. Teknik Pengolahan Data

Setelah data diperoleh dari lapangan (melalui wawancara dan dokumentasi) terkumpul maka tahap berikutnya ialah mengolah data tersebut. Adapun teknik yang digunakan dalam pengolahan data sebagaimana yang disebutkan [Moleong \(2005:92\)](#) dengan cara :

#### 1. Editing

Yaitu teknik mengolah data dengan cara meneliti kembali data yang telah diperoleh melalui wawancara maupun dokumentasi untuk menghindari kekeliruan dan kesalahan. Tahap editing yang telah dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu menyajikan hasil wawancara dan studi dokumentasi berupa kalimat-kalimat yang kurang baku disajikan dengan menggunakan kalimat baku dan bahasa yang mudah dipahami.

#### 2. Interpretasi

Interpretasi merupakan upaya untuk memperoleh arti dan makna yang lebih mendalam dan luas terhadap hasil penelitian yang sedang dilakukan dengan menggunakan bagan, tabel dan pembahasan menggunakan teori rujukan. Pembahasan hasil penelitian dilakukan dengan cara meninjau hasil penelitian secara kritis dengan teori atau pendekatan yang relevan dan informasi akurat yang diperoleh di lapangan melalui beberapa teknik pengumpulan data di atas.

### 3.7. Teknik Analisis Data

Setelah data dari lapangan diperoleh selanjutnya akan dianalisis secara deskriptif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskriptif, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Fenomena yang diteliti secara deskriptif tersebut dicari informasi mengenai hal-hal yang dianggap mempunyai relevansi dengan tujuan penelitian.

Data yang diperoleh dari wawancara mendalam maupun dari dokumentasi diolah dan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan teknik analisis yang dipaparkan oleh [Milles dan Huberman \(1992:16\)](#) dengan tiga komponen analisis yaitu :

1. Reduksi data

Yaitu sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan yang diperoleh di lapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat ditarik dan diverifikasi.

2. Penyajian data

Suatu penyajian data sebagai sekumpulan informasi yang tersusun untuk memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian-penyajian yang lebih baik merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid. Penyajian yang digunakan pada data kualitatif adalah bentuk teks naratif, berbagai jenis matrik, grafik dan bagan. Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam bentuk padu dan mudah diraih. Dalam penelitian ini penyajian data yang akan digunakan adalah bentuk teks naratif yang disertai bagan dan tabel yang isinya berkaitan dengan penelitian ini.

3. Penarikan kesimpulan

Dari permulaan pengumpulan data, peneliti mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi. Penelitian yang berkompeten akan menangani kesimpulan-kesimpulan itu dengan longgar, tetap terbuka,

dan skeptis, tetapi kesimpulan sudah disediakan, mula-mula belum jelas, kemudian lebih rinci dan mengakar dengan kokoh. Kesimpulan–kesimpulan juga diverifikasi untuk diuji kebenarannya sehingga validitas data sudah tidak diragukan lagi. Pada proses ini, peneliti menganalisis data yang telah siap dan kemudian menarik kesimpulan dari penelitian.

### 3.8. Teknik Validasi Data Hasil Penelitian

Proses validasi untuk meyakinkan data dilakukan dengan menggunakan triangulasi yakni teknik pemeriksaan keabsahan data dengan cara memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu sendiri untuk keperluan pengecekan atau data pembandingan terhadap data itu (Wiersma, dalam Sugiyono, 2007:16) menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi metode. Triangulasi sumber dipergunakan dengan cara membandingkan informasi yang didapatkan dengan sumber yang berbeda. Adapun triangulasi metode dilakukan dengan menggunakan bukan hanya satu teknik pengumpulan data yakni teknik wawancara dan dokumentasi untuk mendapatkan data yang sama.

### 3.9. Lokasi, Waktu, dan Jadwal Penelitian

Lokasi Penelitian adalah tiga kabupaten di Lampung hasil pemekaran tahun 2008 yaitu Kabupaten Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat, dan Kabupaten Mesuji. Penelitian telah dilakukan selama 6 (enam) bulan mulai Bulan Juni 2019 sampai dengan Bulan November 2019, dengan rincian tahapan penelitian dan waktu pelaksanaan sebagaimana tabel berikut.

**Tabel 4.** Jadwal Pelaksanaan Penelitian

No	Tahapan Penelitian	Bulan Ke-					
		1	2	3	4	5	6
1	Persiapan administrasi penelitian	x					
2	Penyusunan instrumen penelitian	x					
3	Survey lapangan (3 kabupaten)		x	x			
4	Penelusuran data sekunder			x	x		
5	Analisis Data Fokus 1 (implikasi desentralisasi fiskal terhadap 4 variabel)				x		
6	Survey lapangan kedua (3 kabupaten)					x	
7	Analisis Data Fokus 2 (faktor yang mempengaruhi implikasi desentralisasi fiskal)				x	x	
8	Penyusunan naskah publikasi untuk seminar					x	

No	Tahapan Penelitian	Bulan Ke-					
		1	2	3	4	5	6
	nasional						
9	Penyusunan naskah publikasi nasional untuk jurnal terakreditasi					x	
10	Penyusunan Laporan Akhir						x
11	Pembasan akhir tim peneliti						x
12	Penyusunan laporan keuangan						x

## **BAB IV**

### **GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

#### **4.1. Kabupaten Tulang Bawang**

##### **4.1.1. Geografis**

Secara geografis Kabupaten Tulang Bawang terletak antara posisi 04°08' sampai 04°41' Lintang Selatan dan 105°09' sampai 105° 55' Bujur Timur, yang terletak di bagian hilir dari dua sungai besar yaitu Way Mesuji dan Way Tulang Bawang dan bermuara di Laut Jawa yang berada di bagian timur wilayah Tulang Bawang. Mengingat letaknya yang berada di antara 0 – 10° Lintang Selatan maka Kabupaten Tulang Bawang seperti halnya daerah-daerah lain di Indonesia juga merupakan daerah beriklim tropis.



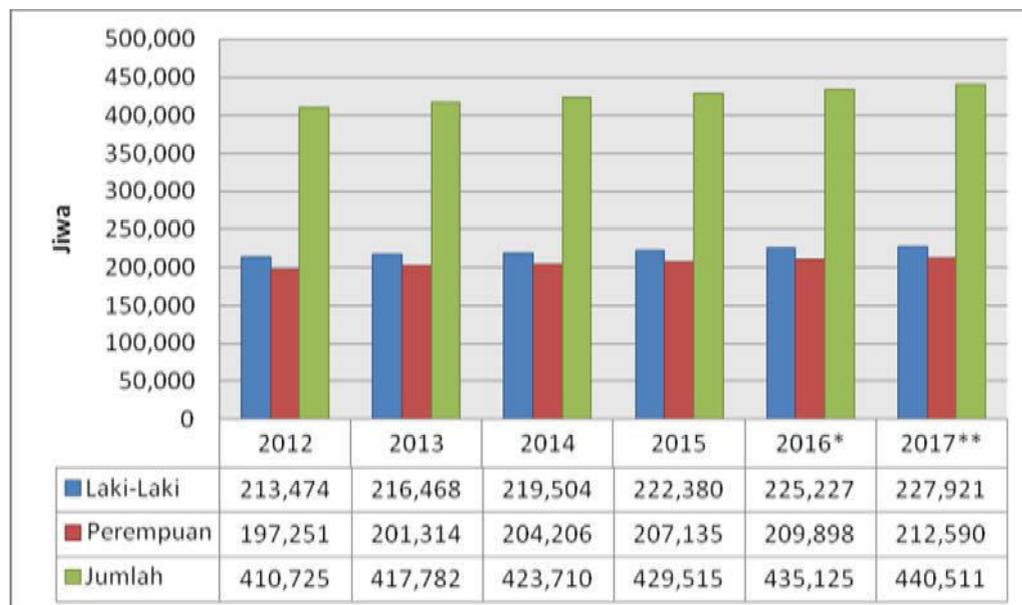
##### **4.1.2. Demografis**

Jumlah penduduk Kabupaten Tulang Bawang pada tahun 2012 menurut Badan Pusat Statistik sebanyak 410.725 jiwa dan pada tahun 2017 diperkirakan berjumlah 440.511 jiwa. Dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2012 terdapat peningkatan jumlah penduduk sebanyak 29.786 jiwa atau rata-rata pertahun bertambah sebanyak 5.957 jiwa.

Apabila dibandingkan antara jumlah penduduk dengan luas wilayah Kabupaten Tulang Bawang, dapat diketahui bahwa rata-rata kepadatan penduduk Kabupaten Tulang Bawang pada tahun 2012 sebesar 118 jiwa/Km<sup>2</sup> dan pada tahun 2017 sebesar 127 jiwa/Km<sup>2</sup>. Perkembangan jumlah penduduk Kabupaten Tulang Bawang pada tahun 2012 - 2017 sebagaimana gambar 5.

Masalah kependudukan yang meliputi jumlah, komposisi, dan distribusi penduduk merupakan masalah yang perlu diperhatikan dalam proses pembangunan. Jumlah penduduk yang besar dapat menjadi potensi, tetapi dapat pula menjadi beban dalam proses pembangunan jika berkualitas rendah.

**Gambar 5.** Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2012-2017



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tulang Bawang, 2019

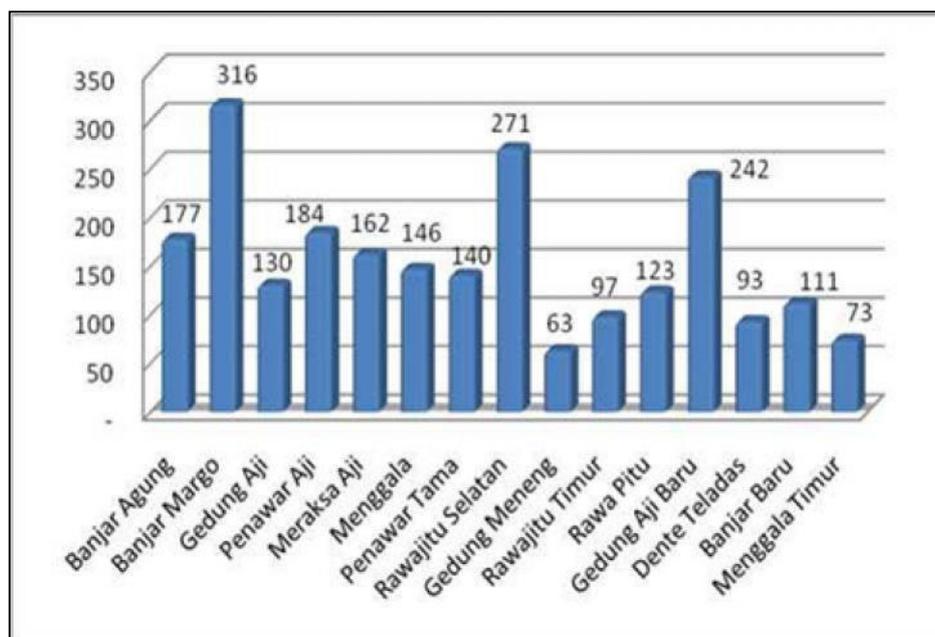
Berdasarkan data estimasi Badan Pusat Statistik jumlah penduduk Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2017 sebanyak 440.511 jiwa. Dengan luas wilayah 3.466,32 Km<sup>2</sup> berarti tingkat kepadatan penduduk mencapai 127 jiwa per Km<sup>2</sup>. Kecamatan dengan kepadatan penduduk tertinggi ada di Kecamatan Banjar Margo mencapai 316 jiwa per Km<sup>2</sup> dan kepadatan terendah di Kecamatan Gedung Meneng hanya 63 jiwa per Km<sup>2</sup>. Jumlah dan kepadatan penduduk Kabupaten Tulang Bawang terlihat dalam tabel di bawah ini. Sedangkan untuk perkembangan laju pertumbuhan penduduk tahun 2012–2017 dapat dilihat pada gambar 6.

Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Tulang Bawang tahun 2012 sampai dengan 2016 menunjukkan penurunan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2012, laju pertumbuhan penduduk sebesar 2,11 persen disbanding tahun sebelumnya, tahun 2013 meknurun menjadi 1,72 persen,



tahun 2014 menjadi 1,42 persen, tahun 2015 menjadi 1,37 persen, dan pada tahun 2016 lagi menjadi 1,31 persen sedangkan pada tahun 2017 diperkirakan menjadi 1,24 persen. Sehingga laju pertumbuhan penduduk rata- rata dari tahun 2012-2017 adalah 1,52 persen pertahun.

**Gambar 6.** Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2017 (Jiwa/Km<sup>2</sup>)



Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kab. Tulang Bawang, 2019

Sedangkan perkembangan laju pertumbuhan penduduk tahun 2012–2017 Kabupaten Tulang Bawang dapat dilihat pada gambar berikut:

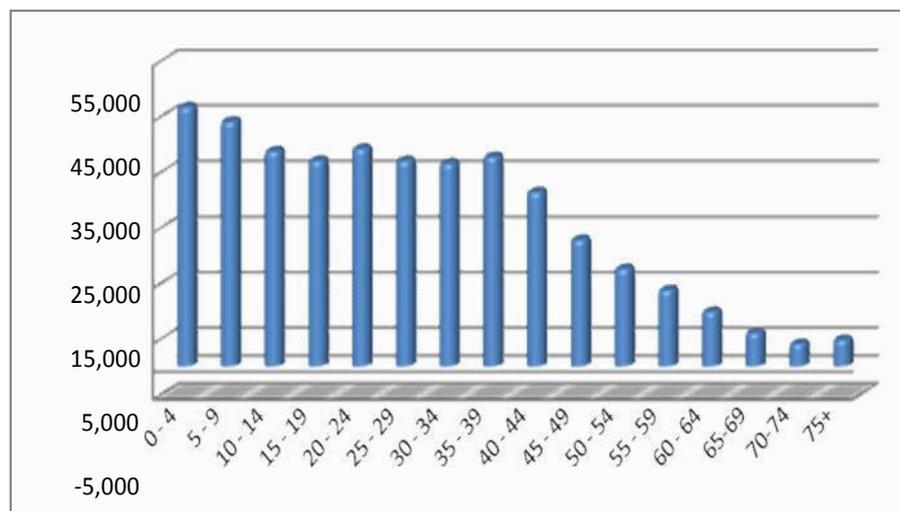
**Gambar 7.** Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Tulang Bawang 2012-2017



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kab. Tulang Bawang, 2019

Sedangkan jumlah penduduk Kabupaten Tulang Bawang tahun 2016 menurut struktur umur atau kelompok usia sebagaimana gambar 8 berikut.

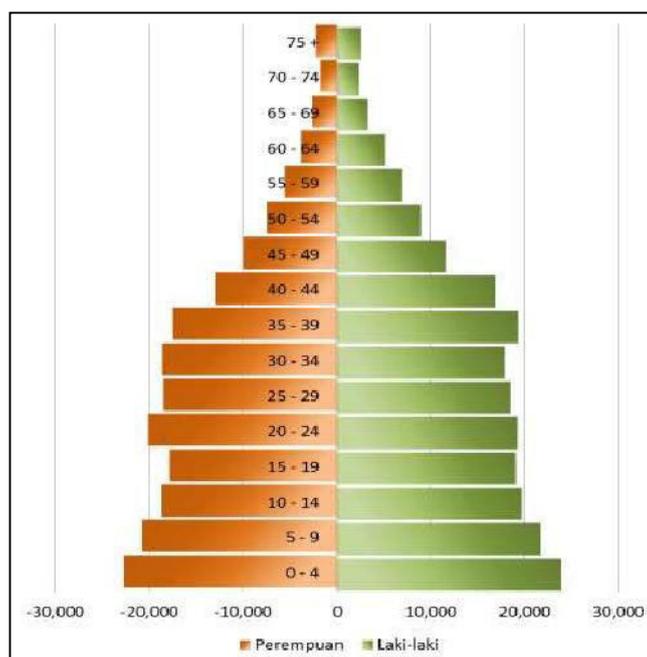
**Gambar 8.** Jumlah Penduduk Kabupaten Tulang Bawang Menurut Jumlah Usia 2016



Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kab. Tulang Bawang, 2019

Komposisi penduduk Kabupaten Tulang Bawang tahun 2015 menurut struktur usia atau kelompok umur 0 - 14 tahun (usia sekolah) sebanyak 129.895 jiwa, kelompok umur 15 - 64 tahun (usia produktif). Sebanyak 284.266 jiwa sedangkan di kelompok umur 65 tahun ke atas (usia non produktif). Sebanyak 15.354 jiwa. Hal ini menunjukkan bahwa komposisi penduduk terbanyak ada di kelompok usia produktif yaitu usia 15 - 64 tahun yang juga menggambarkan rasio beban tanggungan yang cukup rendah yaitu sebesar 33,82 %. Komposisi penduduk Kabupaten Tulang Bawang menurut struktur usia atau kelompok umur dan jenis kelamin, dapat tergambar pada piramida penduduk.

Komposisi penduduk Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2016 berdasarkan jenis Kelamin, laki-laki sebanyak 225,227 jiwa dan perempuan sebanyak 209,898 jiwa. Hal ini menunjukkan bahwa komposisi jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dari pada jumlah perempuan atau sex rasio sebesar 107,30. Komposisi penduduk Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2016 berdasarkan jenis Kelamin dapat dilihat pada tabel 5.

**Gambar 9.** Piramida Penduduk Kabupaten Tulang Bawang Menurut Kelompok Umur

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kab. Tulang Bawang, 2019

**Tabel 5.** Jumlah Penduduk Kabupaten Tulang Bawang Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2016

NO.	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Banjar Agung	20,930	19,505	40,435
2	Banjar Margo	21,464	20,003	41,467
3	Gedung Aji	7,611	7,093	14,704
4	Penawar Aji	9,845	9,175	19,020
5	Meraksa Aji	7,830	7,297	15,127
6	Menggala	25,760	24,007	49,766
7	Penawar Tama	15,096	14,068	29,164
8	Rawajitu Selatan	17,155	15,987	33,142
9	Gedung Meneng	21,020	19,589	40,608
10	Rawajitu Timur	8,804	8,205	17,009
11	Rawa Pitu	10,639	9,915	20,554
12	Gedung Aji Baru	11,776	10,974	22,750
13	Dente Teladas	32,464	30,255	62,718
14	Banjar Baru	7,574	7,058	14,631
15	Menggala Timur	7,259	6,765	14,024
	<b>Kabupaten Tulang Bawang</b>	<b>225,227</b>	<b>209,898</b>	<b>435,125</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kab. Tulang Bawang

### 4.1.3. Perekonomian Daerah

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan dari aspek kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari capaian indikator kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, serta seni budaya dan olahraga. Indikator untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah/regional dalam suatu periode tertentu yaitu pertumbuhan produk domestik regional bruto (PDRB), laju inflasi, dan kemiskinan.

#### a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap kategori dari tahun ke tahun dapat dilihat pada laju PDRB Atas Dasar Harga Konstan (riil). Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Tulang Bawang Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2012-2016 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 6.** Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Tulang Bawang Menurut Lapangan Usaha (2012-2016)

No	Lapangan Usaha	2012	2013	2014	2015*	2016**
1.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2,74	5,30	3,43	3,44	2,63
2.	Pertambangan dan Penggalian	9,90	8,07	9,47	11,90	8,83
3.	Industri Pengolahan	8,72	9,58	8,17	7,76	7,58
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	11,70	11,87	7,24	1,85	11,28
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,87	0,21	5,25	2,48	4,48
6.	Konstruksi	5,44	5,47	4,29	1,87	10,88
7.	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,90	6,93	6,08	4,78	4,43
8.	Transportasi dan Pergudangan	8,58	8,29	8,61	11,60	7,55
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,43	7,50	7,40	11,17	7,71
10.	Informasi dan Komunikasi	11,94	10,45	9,25	8,33	10,46
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	5,97	5,76	5,49	(1,18)	8,35
12.	Real Estate	8,07	7,26	8,32	6,16	8,80
13.	Jasa Perusahaan	13,02	13,42	12,90	7,26	4,57
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	4,15	6,23	7,29	3,86	2,48
15.	Jasa Pendidikan	9,37	9,58	9,66	7,38	7,38

No	Lapangan Usaha	2012	2013	2014	2015*	2016**
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,02	7,97	8,81	7,93	8.08
17.	Jasa Lainnya	4,14	3,75	5,47	8,76	5.93
<b>Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto</b>		<b>5,29</b>	<b>6.75</b>	<b>5,52</b>	<b>5,02</b>	<b>5.42</b>

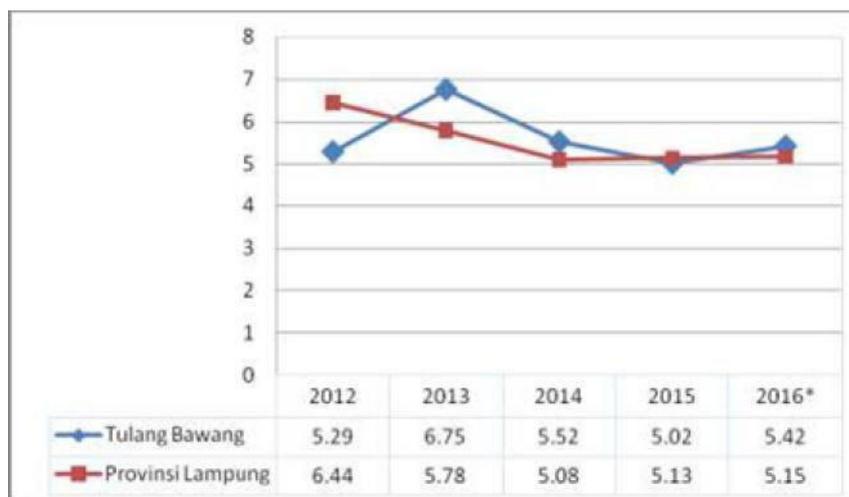
Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tulang Bawang

\*) Angka Sementara

\*\*\*) Angka Sangat Sementara

Laju pertumbuhan riil PDRB menurut lapangan usaha selama periode 2012-2016 menunjukkan pertumbuhan yang positif. Pada tahun 2016, sektor dengan pertumbuhan tertinggi adalah sektor pengadaan listrik dan gas sebesar 11,28 %, diikuti oleh sektor konstruksi 10,88 %, sektor informasi dan komunikasi 10,46 %.

**Gambar 10.** Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tulang Bawang dan Provinsi Lampung Tahun 2012-2016



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tulang Bawang

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tulang Bawang cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2012 dan 2015 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tulang Bawang lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung. Sedangkan pada tahun 2013, 2014 dan 2016 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tulang Bawang lebih tinggi jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung.

**Tabel 7.** PDRB Kabupaten Tulang Bawang Menurut Lapangan Usaha Tahun 2012-2016

Uraian	Tahun				
	2012	2013	2014	2015*	2016**
PDRB ADHB	11.837.814,93	13.262.854,82	14.939.452,52	16.194.045,00	17.992.071,46
PDRB ADHK 2010	10.827.944,73	11.559.174,33	12.199.160,21	12.811.520,10	13.505.401,04

*Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tulang Bawang*

Nilai PDRB Kabupaten Tulang Bawang selama tahun 2012-2016 dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Rata-rata peningkatan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) sebesar Rp. 1,5 Triliun per tahun. Sedangkan rata-rata peningkatan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 sebesar Rp. 0,67 triliun per tahun.

Sektor paling dominan sebagai penyumbang terbesar terhadap PDRB Kabupaten Tulang Bawang selama tahun 2012-2016 adalah sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dengan kontribusi rata-rata 42,54 persen, diperingkat kedua adalah sektor Industri Pengolahan dengan kontribusi rata-rata 20,89 persen dan ditempat ketiga adalah sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dengan kontribusi rata-rata 9,98 persen.

**b. Inflasi**

Secara umum perkembangan laju inflasi di Kabupaten Tulang Bawang selama 5 tahun terakhir mendekati angka inflasi Provinsi Lampung, dan terus mengalami penurunan pada tahun 2012 inflasi sebesar 4,23 %, pada tahun 2013 dari sebesar 4,17%, 4,11% di tahun 2014, kemudian di tahun 2015 menjadi sebesar 4,08%, dan di tahun 2016 diperkirakan menjadi sebesar 4,04%.

Berdasarkan Kajian Ekonomi Regional Bank Indonesia Secara tahunan, inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) Provinsi Lampung pada triwulan III 2017 mengalami penurunan dibandingkan triwulan sebelumnya, yakni dari 4,91%

(yoy) pada triwulan II 2017 menjadi sebesar 3,85% (yoy). Penahan laju inflasi terbesar pada triwulan III 2017 berasal dari kelompok volatile food sebagai fokus pengawasan dari Tim Kerja Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Selain itu, kelompok administered price juga terus mengalami koreksi pasca Hari Besar Keagamaan (HBKN) Idul Fitri 2017. Meskipun demikian, di saat yang sama terdapat peningkatan harga pada kelompok inti (core) akibat kenaikan biaya pendidikan di Kota Bandar Lampung di seluruh tingkatan.

Memasuki triwulan IV 2017, diperkirakan terjadi peningkatan tekanan inflasi yang didorong oleh meningkatnya harga komoditas volatile food seiring dengan puncak musim hujan yang dapat berpotensi menghambat kelancaran produksi dan distribusi pangan yang pada akhirnya akan memengaruhi jumlah pasokan. Selain itu, menjelang liburan akhir tahun, tekanan inflasi diperkirakan juga bersumber dari kelompok administered prices, yakni peningkatan tarif angkutan udara. Untuk keseluruhan tahun 2017, inflasi Lampung diperkirakan masih tetap terjaga pada kisaran target  $4\% \pm 1\%$  (yoy) dengan kecenderungan mendekati batas bawah sasaran, sejalan langkah progresif pemerintah untuk mengendalikan harga komoditas volatile.

Secara tahunan, tekanan inflasi di Provinsi Lampung pada triwulan III 2017 (September 2017) tercatat sebesar 3,85% (yoy), lebih rendah jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya (Juni 2017) yang sebesar 4,91% (yoy). Namun demikian, jika dibandingkan dengan inflasi nasional dan rata – rata inflasi Provinsi Lainnya di Sumatra sebesar masing - masing 3,72% (yoy) dan 3,63% (yoy), inflasi tahunan TW-III di Provinsi Lampung masih tercatat lebih tinggi.

Secara tahunan, menurunnya tekanan inflasi tersebut terutama bersumber dari menurunnya harga-harga komoditas pada kelompok bahan makanan utamanya pada komoditas pangan utama seperti bawang merah dan bawang putih serta pada kelompok transpor dan komunikasi yakni angkutan antar kota seiring dengan koreksi harga yang terjadi pasca HBKN (Hari Besar Keagamaan Nasional) Idul Fitri 2017. Namun demikian, sejalan dengan masuknya tahun ajaran baru, tekanan inflasi pada kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga yakni biaya sekolah di berbagai tingkat mengalami peningkatan.

Sedangkan Prospek inflasi triwulan I dan keseluruhan tahun 2018 diperkirakan dapat terkendali pada kisaran 3,5%  $\pm$ 1% (yoy), seiring kecenderungan menurunnya tekanan inflasi IHK sejak semester II 2017 yang didukung langkah progresif pemerintah untuk mengendalikan harga komoditas volatile. Faktor risiko yang diperkirakan dapat meningkatkan tekanan inflasi pada triwulan I berasal dari kelompok volatile food sejalan dengan tingginya intensitas hujan, sebaliknya siklus peningkatan produksi tanaman pangan berpotensi menimbulkan koreksi harga. Kondisi ini perlu diantisipasi dengan fokus pada upaya menjaga stabilitas harga bahan makanan guna mempertahankan daya beli rumah tangga.

c. Kemiskinan

Perkembangan garis kemiskinan di Kabupaten Tulang Bawang menunjukkan garis kemiskinan tahun 2013 sebesar Rp. 295,738,-, artinya bahwa setiap penduduk Kabupaten Tulang Bawang dengan nilai pengeluaran di bawah Rp. 295,738,- selama sebulan termasuk dalam kategori penduduk miskin. Selanjutnya garis kemiskinan meningkat pada tahun 2016 di Kabupaten Tulang Bawang menjadi Rp. 362,185,-, artinya setiap penduduk Kabupaten Tulang Bawang dengan nilai pengeluaran di bawah Rp. 362,185,- selama sebulan termasuk dalam kategori penduduk miskin.

Tingkat kemiskinan di Kabupaten Tulang Bawang 2012-2016 selalu berada di bawah Provinsi Lampung, jika dilihat dari penyebabnya, kemiskinan di Kabupaten Tulang Bawang bervariasi dapat berupa pendapatan rendah karena keterbatasan *skill* (ketrampilan), pendidikan yang tidak memenuhi kualifikasi pasar kerja, dan minimnya lapangan pekerjaan. Selain itu, evaluasi terhadap program penanggulangan kemiskinan juga dibutuhkan untuk melihat efektivitas program yang ada selama ini telah tepat sasaran. Penanggulangan kemiskinan yang tidak tepat sasaran justru akan memperparah kemiskinan dengan meningkatnya disparitas pendapatan.

#### 4.1.4. Keuangan Daerah

Berdasarkan data, rasio pendapatan daerah Kabupaten Tulang Bawang berada pada kisaran 84,97 % sampai dengan 94,68 %, atau rata-rata mencapai 91,00 %. Hal ini menggambarkan bahwa Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang sudah efektif dalam melakukan penggalan sumber- sumber pendapatan daerah, namun harus lebih dioptimalkan lagi agar semua belanja yang telah dianggarkan dapat terealisasi.

Pada tahun 2017, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tulang Bawang dalam realisasinya mampu menyumbangkan sebesar 3,16 % dari total realisasi pendapatan daerah, dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 13,97 %. Sementara porsi terbesar berasal dari dana perimbangan sebesar 74,87 % dari total pendapatan daerah dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 8,94 %, sedangkan sisanya merupakan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 21,97 % dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 34.52 %.

##### a. Pendapatan Asli Daerah

Perbandingan antara target dengan realisasi penerimaan PAD selama kurun waktu yang sama, menunjukkan rasio efektivitas PAD mencapai 55,03 % sampai 89,02 % dengan rata-rata 74,92 %.

**Tabel 8.** Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tulang Bawang 2012-2017

NO.	TAHUN	TARGET PAD (Rp)	REALISASI PAD (Rp)	RASIO EFEKTIVITAS AS
1	2012	30,702,571,288.00	23,152,050,644.45	75.41
2	2013	41,011,600,000.00	35,020,905,004.43	85.39
3	2014	27,459,724,804.00	24,444,892,153.16	89.02
4	2015	41,437,926,544.00	34,088,549,868.37	82.26
5	2016	48,000,000,000.00	26,416,719,389.70	55.03
6	2017*	55,805,847,117.00	34,823,905,372.84	62.40
Rata-rata				74,92

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (data diolah)

## b. Dana Perimbangan

Dana perimbangan yang diperoleh Kabupaten Tulang Bawang bersumber dari: Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak/Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Target dan realisasi dana perimbangan Kabupaten Tulang Bawang dari tahun 2012-2017 sebagai berikut:

**Tabel 9.** Target dan Realisasi Dana Perimbangan Kabupaten Tulang Bawang 2012-2017

NO	TAHUN	TARGE T (Rp)	REALISA SI (Rp)	Rasio Efektivitas (%)
1.	2012	532,277,983,724.00	543,876,087,761.00	102.18
2.	2013	608,647,286,148.00	593,814,060,846.00	97.56
3.	2014	687,688,869,138.00	648,985,213,794.00	94.37
4.	2015	786,194,111,000.00	749,621,353,668.00	95.35
5.	2016	1,003,515,241,000.00	861,646,583,999.00	85.86
6.	2017*	847,686,063,000.00	825,407,650,779.00	97.37
Rata-rata				95.45

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (data diolah)

## c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Dari tahun 2012-2017, total Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yang diperoleh Kabupaten Tulang Bawang sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 10.** Target dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2017

NO	TAHUN	TARGE T (Rp)	REALISASI I (Rp)	RASIO EFEKTIVITAS (%)
1.	2012	127,404,889,500.00	86,606,321,560.60	67.98
2.	2013	79,087,032,382.00	58,323,068,932.34	73.75
3.	2014	169,712,031,116.00	130,997,919,721.22	77.19
4.	2015	238,712,254,955.00	192,932,113,265.00	80.82
5.	2016	292,486,170,042.00	253,918,982,300.80	86.81
6.	2017*	327,577,755,715.00	242,213,676,272.63	73.94
Rata-rata				76.75

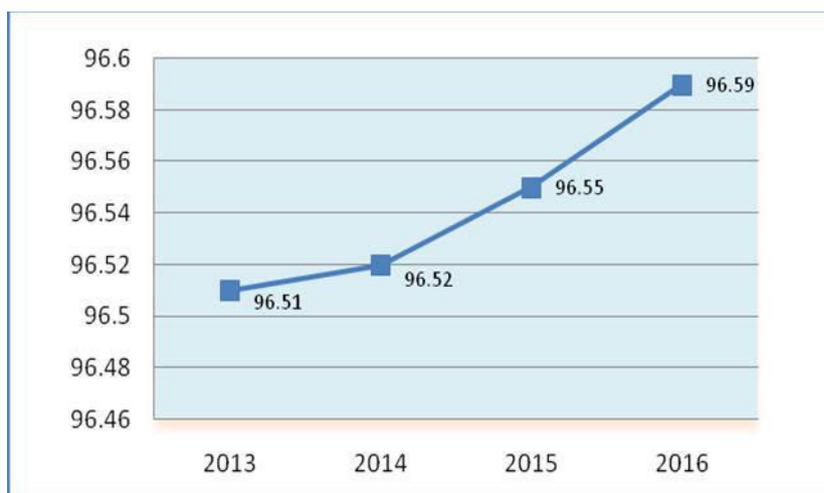
Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (data diolah)

#### 4.1.5. Kondisi Sosial

##### a. Angka Melek Huruf

Angka Melek Huruf (AMH) mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, dari 96,51% pada tahun 2013 meningkat menjadi 96,59% pada tahun 2016. Sebagian besar penduduk yang buta huruf merupakan penduduk yang termasuk dalam kelompok penduduk usia tua (55 tahun ke atas) yang memang banyak yang belum pernah mengenyam pendidikan sama sekali. Secara alamiah jumlahnya akan semakin berkurang sedikit demi sedikit akibat proses kematian.

**Gambar 11.** Perkembangan Angka Melek Huruf Tahun 2013-2016  
Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Tulang Bawang



##### b. Rata-Rata Lama Sekolah

Angka Rata-rata lama sekolah penduduk Tulang Bawang meningkat pada tahun 2016 sebesar 7,12, namun masih dibawah angka rata-rata lama sekolah Provinsi Lampung yang sebesar 7,63. Hal ini disebabkan masih adanya penduduk usia lebih dari 15 tahun yang belum menyelesaikan sekolahnya, baik melalui satuan pendidikan formal maupun non formal. Angka 7,12 menunjukkan bahwa penduduk usia lebih dari 15 tahun memiliki rata-rata belum lulus SMP/MTs atau sederajat (7,00 dalam tahun). Kecenderungan penduduk di atas antara lain yang tidak sedang menjalankan pendidikan di sekolah formal yakni di SMP/MTs, SMA/SMK/MA dan sederajatnya. Penduduk tersebut lebih cenderung bekerja

dengan ijazah terendahnya (misalnya SD), tidak melanjutkan pendidikan formal pada usianya dan tidak melanjutkan pendidikan melalui pendidikan non formal (Paket B, atau C).

c. Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar (APK) berdasarkan tingkatan sekolah yaitu tingkat SD/Paket A pada Tahun 2013 mencapai 103,25 persen sedangkan pada tahun 2016 mencapai 108,08 persen atau meningkat 4,83 persen. Tingkat SMP/Paket B meningkat 1,37 persen dari 77,48 persen pada tahun 2013 menjadi 78,85 persen pada tahun 2016. Tingkat SLTA/Paket C meningkat 11,10 % dari 46,32 persen pada tahun 2015 menjadi 57,42 % pada tahun 2016.

## 4.2. Kabupaten Tulang Bawang Barat

### 4.2.1. Geografis

Kabupaten Tulang Bawang Barat memiliki Luas Wilayah 1.201 Km<sup>2</sup> atau setara dengan 120.100 Ha, secara Hukum berdiri sejak disahkannya Undang-Undang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung pada tanggal 26 November 2008, yang terdiri dari delapan kecamatan dan 96 tiyuh dengan Ibu Kota Kabupaten berada di tiyuh panaragan. Pada tahun 2016 terbentuk Kecamatan Batu Putih yang merupakan pemekaran dari Kecamatan Gunung Terang sehingga saat ini Kabupaten Tulang Bawang Barat memiliki 9 (sembilan) kecamatan. Kecamatan terluas adalah Kecamatan Tulang Bawang Tengah dan terkecil di Kecamatan Way Kenanga.



### 4.2.2. Demografis

Aspek demografi ditujukan untuk memperoleh gambaran kondisi demografi Kabupaten Tulang Bawang Barat mencakup deskripsi mengenai (a) jumlah dan struktur umum penduduk berdasarkan jenis kelamin; (b) laju pertumbuhan penduduk ; (c) dinamika penduduk yang dipengaruhi oleh kelahiran, kematian dan perpindahan penduduk; (d) distribusi/persebaran penduduk; dan (e)

komposisi dan populasi masyarakat yang disusun secara keseluruhan atau kelompok tertentu didasarkan pada kriteria seperti pendidikan, kewarganegaraan, agama atau entitas tertentu.

Jumlah Penduduk Kabupaten Tulang Bawang Barat menurut data tahun 2016 sebanyak 266.973 jiwa tersebar di 8 kecamatan dan 96 Tiyuh/desa, dan jika dibandingkan dengan luas Kabupaten Tulang Bawang Barat seluas 1.201 km<sup>2</sup> maka didapat kepadatan penduduk Tulang Bawang Barat adalah 222 jiwa/km<sup>2</sup>.

Perkembangan jumlah penduduk selama periode 2011-2016 setiap tahun secara umum mengalami perubahan dan penyebarannya belum merata. Pada tahun 2012 jumlah penduduk sebanyak 255.833 jiwa sedangkan pada tahun 2016 jumlah penduduk menjadi 266.973 jiwa. Angka ini meningkat sebesar 5,07% dibandingkan tahun sebelumnya dengan komposisi laki-laki 136.992 jiwa dan perempuan 130.051 jiwa.

#### **4.2.3. Perekonomian Daerah**

##### **a. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi**

###### **1) Pertumbuhan PDRB**

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah besarnya produk domestik bruto (PDB) suatu daerah provinsi atau kabupaten/kota. PDRB dapat digunakan sebagai salah satu bahan evaluasi terhadap pembangunan yang telah dilaksanakan dan dapat dipakai sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah.

###### **a) Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB atas Dasar Harga Konstan**

Selama periode 2012-2016 nilai PDRB atas dasar harga konstan terus meningkat. Kontribusi setiap sektor terhadap PDRB Kabupaten Tulang Bawang Barat didominasi sektor pertanian, kehutanan, dan perkebunan. Sementara sektor pengadaan listrik dan gas merupakan penyumbang terendah dalam PDRB.

###### **b) Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB atas Dasar Harga Berlaku**

Perkembangan nilai dan kontribusi sektor dalam PDRB Kabupaten Tulang Bawang Barat atas dasar harga berlaku dari tahun 2012 hingga tahun 2016 didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Sementara sektor pengadaan listrik dan gas menjadi

sektor terendah dalam penyumbang PDRB. Selama periode 2012-2016 nilai PDRB atas dasar harga berlaku terus meningkat. Kontribusi setiap sektor terhadap PDRB Kabupaten Tulang Bawang Barat didominasi sektor pertanian, kehutanan, dan perkebunan.

- c) **Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan**  
**Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Tulang Bawang Barat** tumbuh cukup baik. Hal ini ditunjukkan dengan bertambahnya nilai PDRB yang terbentuk setiap tahunnya. Perkembangan nilai PDRB atas dasar harga berlaku dan harga konstan cenderung fluktuatif setiap tahunnya. Perkembangan yang selalu meningkat dalam PDRB atas harga berlaku terjadi pada sektor pertambangan dan penggalian, pengadaan listrik dan gas, jasa kesehatan dan kegiatan sosial, serta jasa lainnya. Sedangkan pada PDRB atas harga konstan hanya sektor jasa lainnya saja yang mengalami perkembangan yang selalu meningkat.
- d) **Produk Domestik Regional Bruto per Kapita**  
**Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)** digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat secara umum. **Produk Domestik Regional Bruto per kapita atas dasar harga berlaku (ADHB)** lebih menggambarkan pendapatan yang memungkinkan dapat dinikmati oleh penduduk. Pertumbuhan tersebut menggambarkan pendapatan yang diterima oleh penduduk semakin meningkat pula. Pada Tabel 2.15. dapat dilihat perkembangan PDRB per kapita yang selalu meningkat terutama pada ADHB pada Tahun 2011-2015.

## 2) Laju Inflasi

Inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus (continue) berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain, konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Dengan kata lain, inflasi juga merupakan proses menurunnya nilai mata uang secara kontinyu.

### 3) Indeks Gini (Gini Ratio)

Salah satu ukuran ketimpangan yang sering digunakan adalah Gini Ratio. Nilai Gini Ratio berkisar antara 0-1. Semakin tinggi nilai Gini Ratio menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi.

### 4) Persentase Penduduk di atas Garis kemiskinan

Jumlah persentase penduduk miskin di Kabupaten Tulang Bawang Barat diketahui berdasarkan data dari Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten Kota 2011-2015, sehingga dapat dihitung persentase penduduk di atas garis kemiskinan di Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tabel 2.19.), yaitu sebesar 92,89% pada tahun 2011 dan mengalami penurunan pada tahun 2015 menjadi 91,77%. Jumlah persentase penduduk di atas garis kemiskinan tertinggi pada tahun 2013 sebesar 93,69%.

### 5) Angka Kriminalitas

Angka kriminalitas yang terjadi di Kabupaten Tulang Bawang Barat berfluktuasi, pada tahun 2013 angka kriminalitas sebesar 2,16 dan pada tahun 2016 sebesar 4,27 dengan jumlah tindak pidana sebanyak 114 kasus dan merupakan angka kriminalitas tertinggi dalam kurun waktu 4 tahun terakhir.

## **4.2.4. Keuangan Daerah**

### **a. Kinerja Pelaksanaan APBD**

Realisasi pertumbuhan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat terbesar bersumber dari Lain- lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar 164,65 persen per tahun, kemudian diikuti oleh sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 50,23 persen per tahun, dan Dana Perimbangan sebesar 14,06 persen per tahun. Ditinjau dari kontribusi sumber pendapatan terhadap total pendapatan daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat selama kurun waktu 2011-2015, Pos pendapatan transfer memiliki kontribusi tertinggi yaitu rata-

rata sebesar 94,01 persen per tahun. Kemudian disusul dengan pos lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar rata-rata 4,05 persen per tahun.

Sementara itu, pos PAD memiliki kontribusi paling rendah dengan rata-rata sebesar 1,94 persen per tahun. Secara lebih rinci persentase kontribusi sumber pendapatan daerah per tahun dari tahun 2011 hingga 2015. Secara lebih rinci, sumber pendapatan transfer pemerintah pusat- dana perimbangan yang tertinggi adalah pendapatan dari dana alokasi umum (DAU), yaitu rata-rata sebesar 62,29 persen per tahun dan dana alokasi khusus (DAK) rata-rata sebesar 12,84 persen per tahun. Sementara itu, pendapatan transfer pemerintah pusat-dana perimbangan bersumber dari dana bagi hasil pajak dan dana bagi hasil bukan pajak (SDA) rata-rata sebesar 5,94 persen per tahun.

Tingginya kontribusi dana perimbangan (DAU dan DAK) terhadap total pendapatan daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat jika dibandingkan dengan tingkat kontribusi PAD mencerminkan tingginya ketergantungan daerah terhadap sumber ekstern, khususnya pemerintah pusat, atau dapat juga dikatakan bahwa kapasitas fiskal daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam posisi yang rendah. Namun begitu, untuk kontribusi dari sektor pajak dan retribusi pada perkembangannya mampu memberikan kontribusi yang tinggi untuk pendapatan daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

#### **4.2.5. Kondisi Sosial dan Kemiskinan**

##### **1. Angka Melek huruf**

Angka Melek Huruf adalah persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis huruf latin dan atau huruf lainnya. Angka Melek Huruf digunakan untuk mengetahui atau mengukur keberhasilan program-program pemberantasan buta huruf terutama di daerah pedesaan, selain itu juga untuk menunjukkan kemampuan penduduk di suatu wilayah dalam menyerap informasi dari berbagai media.

## 2. Angka Partisipasi Kasar

APK untuk jenjang SD pada tahun 2013 sebesar 122,05 berarti bahwa untuk jenjang SD jumlah siswa yang sekolah melebihi jumlah penduduk usia sekolah SD dimana hal ini disebabkan pada sekolah SD siswa ada yang berusia kurang dari 7 tahun tetapi ada pula yang melebihi 12 tahun. Pada tahun 2014 mengalami penurunan menjadi 114,74. Demikian pula bagi SMP, dapat dilihat bahwa APK pada tahun 2013 sebesar 71,02 naik pada tahun 2014 menjadi 88,73. APK SMA pada tahun 2013 sebesar 59,02 dan pada tahun 2014 kemudian nilai APK SMA menjadi 64,78 atau meningkat sebesar 5,76 dari tahun 2013. Hal ini bisa terjadi karena pada penduduk usia SMA justru mengalami penurunan.

## 3. Porsentase Penduduk diatas Garis Kemiskinan

Jumlah persentase penduduk miskin di Kabupaten Tulang Bawang Barat diketahui berdasarkan data dari Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten Kota 2011-2015, sehingga dapat dihitung persentase penduduk di atas garis kemiskinan di Kabupaten Tulang Bawang Barat, yaitu sebesar 92,89% pada tahun 2011 dan mengalami penurunan pada tahun 2015 menjadi 91,77%. Jumlah persentase penduduk di atas garis kemiskinan tertinggi pada tahun 2013 sebesar 93,69%.

## 4.3. Kabupaten Mesuji

### 4.3.1. Geografis

Kabupaten Mesuji, dengan ibu kota Wiralaga Mulya, terletak dalam wilayah Provinsi Lampung dan terbentuk sebagai hasil pemekaran dari Kabupaten Tulang Bawang. Secara yuridis formal, Kabupaten Mesuji terbentuk sejak diberlakukannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung. Secara geografis wilayah Kabupaten Mesuji terletak pada  $3^{\circ}45'$  –  $4^{\circ}40'$  arah Utara-Selatan dan  $106^{\circ}15'$  –  $107^{\circ}00'$  arah Timur-Barat.



Luas Kabupaten Mesuji sesuai dengan Undang-undang pembentukannya yaitu 2.184 km<sup>2</sup> dan Kabupaten Mesuji memiliki 105 desa.

#### **4.3.2. Demografis**

Berdasarkan Kecamatan Dalam Angka, jumlah penduduk Kabupaten Mesuji tahun 2012 adalah 191.221 jiwa, tahun 2013 sebanyak 192.759 jiwa, dan dalam Sensus Penduduk tahun 2014 sebanyak 194.282 jiwa, dengan laju pertumbuhan penduduk selama kurun waktu 5 tahun (2012—2016) sebesar 1%. Berdasarkan sensus penduduk tahun 2015, jumlah penduduk Kabupaten Mesuji adalah 195.682 jiwa, dan jumlah keluarga 69.896 KK.

#### **4.3.3. Perekonomian Daerah**

Pada tahun 2016 pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh kategori Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 10,93 persen. Adapun kategori-kategori lainnya berturut-turut mencatat pertumbuhan yang positif, diantaranya kategori Informasi dan Komunikasi mencatat sebesar 9,60 persen, kategori Transportasi dan Pergudangan sebesar 9,53 persen, kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 8,64 persen, kategori Pertambangan dan Penggalian sebesar 8,39 persen, kategori Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 7,69 persen, kategori Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial sebesar 7,32 persen, Kategori Industri Pengolahan sebesar 7,24 persen, kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 5,66 persen, kategori Real estate sebesar 5,45 persen, kategori Lainnya sebesar 5,27 persen, Kategori Jasa Pendidikan sebesar 4,30 persen, kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 3,78 persen, kategori Konstruksi 2,99 persen, kategori Jasa Perusahaan sebesar 2,85%, kategori Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 1,94%, dan kategori Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 0,40%.

Pada tahun 2016, PDRB per kapita Mesuji mencapai Rp. 41.209.034,85 dengan pertumbuhan sebesar 10,26 persen. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Mesuji tiap tahunnya semakin meningkat. Hal ini diperoleh karena adanya upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah baik pembangunan-pembangunan yang dilakukan pada sektor infrastruktur maupun sektor lainnya, sehingga masyarakat dapat merasakan manfaatnya baik secara langsung maupun tidak langsung.

#### 4.3.4. Keuangan Daerah

Pengukuran kinerja pendapatan APBD dilaksanakan dengan mengukur sumber pendapatan. Struktur pendapatan Daerah Kabupaten Mesuji terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain- Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Dalam kurun waktu tahun 2012-2016 sumber utama pendapatan terbesar berasal dari pendapatan transfer dengan angka pertumbuhan rata-ratanya mencapai 13,29%. Berurutan kemudian penopang pendapatan dari PAD sebesar 39,11% dan terakhir dari lain-lain pendapatan yang sah sebesar 95,84%. Dari data tersebut rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah setiap tahunnya sebesar 13,18%. Dari sudut pandang capaian kinerja perrincian obyek, secara rata-rata dalam kurun waktu tahun 2012-2016 kontribusi pendapatan daerah terbesar berasal dari Pendapatan Transfer yang sebesar 98,61%, selanjutnya berasal dari PAD sebesar 3,01% dan Pendapatan lain-lain yang sah sebesar 1,39%.

#### 4.3.5. Kondisi Sosial dan Kemiskinan

##### 4.3.5.1 Kondisi Sosial

##### 1. Angka Partisipasi Kasar

APK digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. APK Kabupaten Mesuji Tahun 2012 – 2016 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 11.** Angka Partisipasi Kasar di Kabupaten Mesuji Tahun 2012-2016

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
Angka Partisipasi Kasar (APK)					
a. APK SD/MI	93.7	95.12	94.4	95.3	95.44
b. APK SLTP/MTs	94.80	94.60	94.10	94.90	98.11
c. APK SMU	34.20	42.80	70.90	96.08	96.13

*Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Mesuji 2017*

#### **4.3.5.2. Kemiskinan**

Perkembangan tingkat kemiskinan Kabupaten Mesuji dari tahun 2012 – 2016, meskipun secara garis besar terus meningkat namun pada tahun 2016 mulai menampakan penurunan. Pada tahun 2012 tingkat kemiskinan di Kabupaten Mesuji sebesar 7,69%, mengalami penurunan sampai sebesar 5,81% pada tahun 2013, namun mengalami kenaikan sampai tahun 2015 menjadi 8,20%, kemudian mengalami penurunan menjadi 8,00% pada tahun 2016. Dengan demikian, analisis efektivitas tingkat kemiskinan Kabupaten Mesuji pun capaiannya membaik dari tahun 2015 sampai tahun 2016.

## **BAB V**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **5.1. Implikasi Desentralisasi Fiskal Pada Sisi Makro Ekonomi Daerah**

Hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan daerah yang secara formal diatur dalam Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Daerah dan secara praktik diwujudkan dalam bentuk transfer dana perimbangan serta hak dan kewenangan memungut sumber pendapatan di daerah disebut sebagai desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal dan otonomi daerah berikutnya menjadi konsep yang selalu seiring sejalan; dalam artian bahwa pelaksanaan otonomi daerah salah satunya diwujudkan dalam bentuk desentralisasi fiskal dan sebaliknya bahwa tingginya derajat desentralisasi fiskal akan menjadi indikator dari keberhasilan otonomi daerah.

Desentralisasi fiskal adalah pilihan wajib bagi suatu negara untuk membangun pola hubungan yang baik dan selaras antara unit pemerintahan baik secara vertikal maupun horizontal. Secara vertikal, hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah akan berjalan harmonis apabila daerah merasa bahwa kewenangan untuk mencari sumber pendanaan di daerah selaras atau sesuai dengan urusan pemerintahan yang diembannya. Adapun secara horizontal, desentralisasi fiskal yang adil yang diberikan oleh pemerintah pusat akan meniadakan kesenjangan (*disparitas*) yang terlalu lebar antar satu daerah dengan daerah lain, baik antar provinsi maupun antar kabupaten/kota dalam satu wilayah provinsi.

Secara teori, salah satu indikator keberhasilan pembangunan daerah adalah jumlah penduduk miskin, dalam artian bahwa penurunan jumlah penduduk miskin adalah indikasi dari keberhasilan pembangunan, begitu pula sebaliknya bahwa kenaikan jumlah penduduk miskin adalah indikasi dari kegagalan pembangunan. Oleh karena itu, jumlah penduduk miskin adalah salah satu ukuran dampak akhir dari penyelenggaraan pemerintahan. Dengan demikian maka analisis tentang keberhasilan pembangunan daerah tidak bisa hanya dibahas dalam konteks dampak namun juga terkait pada aspek penyebab atau pendorongnya. Dalam konteks ini, implementasi desentralisasi fiskal berada pada posisi penyebab atau pendorong keberhasilan otonomi daerah dimaksud.

Sebagai tujuan atau dampak antara, desentralisasi fiskal adalah salah satu strategi utama untuk mendorong terwujudnya kemampuan keuangan daerah sehingga daerah mampu untuk menyelenggarakan pembangunan dan pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan dengan maksimal. Berikutnya sekaligus jalan untuk mewujudkan kemandirian daerah sebagai tujuan akhir dari pelaksanaan otonomi daerah. Dalam konteks tersebut maka terdapat relasi yang sangat erat antara desentralisasi fiskal dan kemandirian daerah sehingga sejatinya desentralisasi fiskal harus mampu meningkatkan kemandirian daerah bukan hanya pada aspek pertumbuhan ekonomi semata.

### 5.1.1. Pertumbuhan Ekonomi

Pada aspek sisi makro-ekonomi, kinerja otonomi daerah dan dampaknya terhadap indikator kunci pembangunan di Kabupaten Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat, dan Mesuji akan dinilai dari beberapa variabel, yaitu pertumbuhan ekonomi, peningkatan angka partisipasi angkatan kerja, kenaikan IPM, penurunan ketimpangan, serta pengentasan kemiskinan.

Data pada tabel 12 menunjukkan persentase pertumbuhan ekonomi, tabel 13 menunjukkan peningkatan tingkat partisipasi angkatan kerja, tabel 14 dan 16 menggambarkan perkembangan nilai IPM dan perbandingannya dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Lampung, sedangkan tabel berikutnya menggambarkan jumlah penduduk miskin di tiga lokasi studi, yaitu Kabupaten Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat, dan Mesuji dalam kurun waktu tiga tahun terakhir (2015-2017).

**Tabel 12.** Data Pertumbuhan Ekonomi 3 (Tiga) Kabupaten Lokasi Studi

Kabupaten	2015	2016	2017
Tulang Bawang	5,0	5,4	5,7
Tuba Barat	4,9	5,2	5,5
Mesuji	5,4	5,1	5,3

*Sumber: Data BPS, 2019*

Berdasarkan tabel 15 dapat terlihat bahwa rata-rata pertumbuhan ekonomi selama kurun waktu tiga tahun terakhir di tiga kabupaten adalah 5,2%. Apabila dihitung tiap tahun terjadi peningkatan rata-rata yaitu 5,1% (2015), meningkat menjadi 5,2% (2016) dan 5,5% (2017). Namun demikian ketimpangan terjadi di

Kabupaten Mesuji di mana pertumbuhan ekonomi justru mengalami penurunan dari 2015 ke 2016. Data Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kabupaten Mesuji tahun 2017-2022 menjelaskan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan setiap sektor ekonomi di Mesuji mencakup sektor pertanian; pertambangan dan penggalan; industri pengolahan; listrik, gas, dan air bersih; konstruksi; perdagangan, restoran dan hotel; pengangkutan dan komunikasi; lembaga keuangan; dan jasa-jasa lainnya. Sektor pertanian memberikan kontribusi sangat besar sehingga dengan kondisi harga-harga komoditi perkebunan terutama kelapa sawit dan karet yang tidak stabil selama kurun waktu tahun 2015-2016 menjadi salah satu penyebab menurunnya tingkat pertumbuhan ekonomi meskipun kembali mengalami *trend* positif pada tahun 2017.

Fakta ketidakmampuan Mesuji sebagai daerah otonom baru meningkatkan pertumbuhan ekonomi tentu membantah pendapat Abimanyu dan Megantara (2009) bahwa desentralisasi fiskal akan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, karena pemerintah daerah akan lebih efisien dalam produksi dan penyediaan barang-barang publik.

Adapun peningkatan pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Kabupaten Tulang Bawang dan Tulang Bawang Barat selain juga selaras dengan pendapat Abimanyu dan Megantara (2009) di atas, juga mengkonfirmasi argumentasi yang dibuat oleh World Bank (1997a), bahwa desentralisasi fiskal dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara langsung. Terdapat tiga mekanisme dampak desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi salah satunya bahwa desentralisasi fiskal akan meningkatkan efisiensi ekonomi di sektor pengeluaran pemerintah dan efek dinamis tersebut akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, terdapat hubungan positif antara desentralisasi fiskal dengan pertumbuhan ekonomi.

### **5.1.2. Angka Partisipasi Angkatan Kerja**

Berikutnya, perkembangan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sangat dipengaruhi oleh produktifitas tenaga kerja yang bekerja sehingga mengurangi tingkat pengangguran. Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) merupakan rasio antara banyaknya angkatan kerja dengan banyaknya penduduk usia kerja. TPAK

dipergunakan sebagai indikator ketenagakerjaan untuk memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari merujuk pada suatu waktu dalam periode tertentu. Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja atau punya pekerjaan atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Gambaran TPAK pada tiga kabupaten dijelaskan pada tabel 13.

**Tabel 13.** Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Kabupaten	2015	2016	2017
Tulang Bawang	63,13	65,35	67,17
Tuba Barat	72,33	67,95	68,17
Mesuji	42,27	43,63	44,07

*Sumber: RPJMD Kabupaten, diolah.*

Gambaran pada tabel 13 menjelaskan bahwa terjadi kesenjangan yang cukup lebar antara kabupaten satu dengan kabupaten lainnya dalam hal TPAK. Sekali lagi, Kabupaten Mesuji -sebagaimana terjadi pada tingkat pertumbuhan ekonomi- memiliki TPAK paling rendah sehingga terdapat angka pengangguran paling tinggi di antara dua kabupaten lainnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingginya pengangguran di Kabupaten Mesuji terdiri atas pengangguran terbuka baik sukarela (mereka yang tidak mau bekerja karena mengharapkan pekerjaan yang lebih baik) maupun secara terpaksa (mereka yang mau bekerja tetapi tidak memperoleh pekerjaan) serta kategori setengah menganggur yaitu mereka yang bekerja lamanya (hari, minggu, musiman) kurang dari yang mereka kerjakan.

### 5.1.3. Indeks Pembangunan Manusia

Faktor ketenagakerjaan yang berimplikasi terhadap tercapainya standar hidup layak bersama dengan faktor pendidikan dan kesehatan menjadi variabel kinerja otonomi daerah berikutnya. Indikator standar hidup layak, pendidikan, dan kesehatan tersebut menjadi variabel penetapan IPM. Secara konsep, IPM merupakan indeks komposit yang dihitung sebagai rata-rata-sederhana dari tiga indeks yang menggambarkan kemampuan dasar manusia dalam memperluas pilihan-pilihan, yaitu: Indeks Harapan Hidup, Indeks Pendidikan, dan Indeks Standar Hidup Layak (Syaifullah dan Malik, 2017).

Perkembangan nilai IPM pada tiga kabupaten lokasi penelitian sebagaimana terlihat pada tabel 14 berikut.

**Tabel 14.** Perkembangan Nilai IPM

Kabupaten	2015	2016	2017
Tulang Bawang	66,08	66,74	67,35
Tuba Barat	63,01	63,77	64,58
Mesuji	59,79	60,72	61,10

*Sumber : Data BPS , 2019*

Berdasarkan tabel 14 dapat dijelaskan bahwa kondisi ini adalah kondisi yang memang paling ideal dan harus terwujud di mana kabupaten induk memiliki tingkat IPM paling baik dibandingkan dengan kabupaten hasil pemerkanan. Berbeda dengan data pada tabel 4 dan tabel 5 yang mengalami kondisi abnormal di mana kabupaten hasil pemerkanan justru lebih baik dibanding kabupaten induk, pada tabel 6 terlihat bahwa kabupaten induk memiliki nilai IPM paling tinggi dibandingkan dua kabupaten hasil pemekaran. Namun demikian, dalam skala Provinsi Lampung, ketiga kabupaten ini belum mampu beranjak dari lima kabupaten terendah di Provinsi Lampung.

Keberhasilan pembangunan sangat didukung oleh tingkat partisipasi penduduk dalam kegiatan pembangunan tersebut. Penduduk dapat bertindak sebagai subjek maupun objek dalam pembangunan. Berdasarkan data RPJMD Kabupaten Mesuji 2017-2022, jumlah penduduk Kabupaten Mesuji tahun 2012 adalah 191.221 jiwa, tahun 2013 sebanyak 192.759 jiwa, dan tahun 2014 sebanyak 194.282 jiwa, dengan laju pertumbuhan penduduk selama kurun waktu 5 tahun (2012-2016) sebesar 1%. Lebih jelas mengenai jumlah perkembangan penduduk di Kabupaten Mesuji sebagaimana terlihat pada Tabel 15.

**Tabel 15.** Jumlah dan Perkembangan Penduduk Kabupaten Mesuji 2012-2016

No	Kecamatan	2012	2013	2014	2015	2016	Kenaikan/
1.	Way Serdang	41.567	42.490	42.719	43.096	43.437	1,11%
2.	Sp. Pematang	23.869	24.450	24.709	25.055	25.387	1,55%
3.	Panca Jaya	15.6	15.659	15.650	15.698	15.730	0,16%
4.	Tanjung Raya	34.956	35.313	35.526	35.865	36.172	0,86%
5.	Mesuji	20.306	20.413	20.398	20.453	20.489	0,22%
6.	Mesuji Timur	30.309	30.509	30.552	30.700	30.820	0,42%
7.	Rawajitu Utara	24.586	23.925	24.728	24.815	24.878	0,32%
	<b>Jumlah</b>	<b>191.221</b>	<b>192.759</b>	<b>194.282</b>	<b>195.682</b>	<b>196.913</b>	<b>0,66%</b>

Secara kuantitatif, persentase kenaikan jumlah penduduk Kabupaten Mesuji hanya 0,66% per tahun atau lebih kecil jika dibandingkan persentase kenaikan jumlah PAD maupun TPD dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mesuji selama 2014-2017. Dalam konteks ini, seharusnya kesenjangan fiskal daerah setiap tahun harus selalu menurun karena salah satu variabel dalam penetapan kebutuhan fiskal daerah adalah jumlah penduduk. Topik ini, belum banyak peneliti yang melakukannya sehingga relasi antara kenaikan TPD dengan kenaikan jumlah penduduk sama sekali belum pernah dikaji.

Pada aspek kependudukan, variabel yang biasa dipakai untuk menilai kesejahteraan sebagai implikasi desentralisasi fiskal adalah pada aspek Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Secara konsep, IPM merupakan indeks komposit yang dihitung sebagai rata-rata-sederhana dari tiga indeks yang menggambarkan kemampuan dasar manusia dalam memperluas pilihan-pilihan, yaitu: Indeks Harapan Hidup, Indeks Pendidikan, dan Indeks Standar Hidup Layak.

Berdasarkan tabel 17 dapat dijelaskan bahwa sebenarnya telah terjadi kecenderungan kenaikan IPM setiap tahunnya, namun demikian jika dibandingkan dengan data-data IPM dari lima belas kabupaten/kota di Provinsi Lampung, IPM Kabupaten Mesuji yang hanya 61,10 berada pada posisi paling akhir. Ini artinya, kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Mesuji pada aspek pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan adalah paling rendah di Provinsi Lampung, di bawah rata-rata IPM provinsi sebesar 67,65 maupun rata-rata IPM secara nasional sebesar 70,18, sebagaimana terlihat pada gambar 12 berikut.



**Gambar 12.** Perbandingan IPM Kab. Mesuji dengan Kab/Kota di Lampung

#### 5.1.4. Ketimpangan Antar Daerah

Ketimpangan antar daerah, dapat dianalisis melalui data Kapasitas fiskal Daerah. Kapasitas fiskal daerah merupakan gambaran kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui penerimaan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (tidak termasuk Dana Alokasi Khusus, dana darurat, dana pinjaman lama, dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk membiayai pengeluaran tertentu) untuk membiayai tugas pemerintahan setelah dikurangi belanja pegawai dan dikaitkan dengan jumlah penduduk miskin.

**Tabel 16.** Perbandingan IPM Kab/Kota di Provinsi Lampung

No.	Kabupaten/Kota	2014	2015	2016
1	Kota Metro	74,98	75,10	75,45
2	Kota Bandar Lampung	74,34	74,81	75,34
	<b>INDONESIA</b>	<b>68,90</b>	<b>69,55</b>	<b>70,18</b>
3	Lampung Tengah	67,07	67,61	68,33
4	Pringsewu	66,58	67,55	68,26
5	Lampung Timur	66,42	67,10	67,88
	<b>LAMPUNG</b>	<b>66,42</b>	<b>66,95</b>	<b>67,65</b>
6	Tulang Bawang	65,83	66,08	66,74
7	Lampung Selatan	63,75	65,22	66,19
8	Lampung Utara	64,89	65,20	65,95
9	Way Kanan	64,32	65,18	65,74
10	Lampung Barat	63,54	64,54	65,45
<b>11</b>	<b>Tanggamus</b>	<b>62,67</b>	<b>63,66</b>	<b>64,41</b>
12	Tulang Bawang Barat	62,46	63,01	63,77
13	Pesawaran	61,70	62,70	63,47
14	Pesisir Barat	59,76	60,55	61,50
15	Mesuji	58,71	59,79	60,72

**Tabel 17.** Kapasitas Fiskal Tiga Kabupaten Lokasi Studi Tahun 2015

No	Kabupaten	IKF	Kategori
1	Kabupaten Mesuji	1,24	Tinggi
2	Kabupaten Tulang Bawang	0,04	Rendah
3	Kabupaten Tulang Bawang Barat	0,76	Sedang
<b>4</b>	<b>Provinsi Lampung</b>	<b>0,24</b>	<b>Rendah</b>

Sumber: *jdi.h.kemenkeu.go.id* tahun 2015

**Tabel 18.** Kapasitas Fiskal Tiga Kabupaten Lokasi Studi Tahun 2016

No	Kabupaten	IKF	Kategori
1	Kabupaten Mesuji	1,08	Tinggi
2	Kabupaten Tulang Bawang	0,45	Rendah
3	Kabupaten Tulang Bawang Barat	0,72	Sedang

No	Kabupaten	IKF	Kategori
4	Provinsi Lampung	0,39	Rendah

Sumber: *jdih.kemenkeu.go.id* tahun 2016

**Tabel 19.** Kapasitas Fiskal Tiga Kabupaten Lokasi Studi Tahun Kabupaten 2017

No	Kabupaten	IKF	Kategori
1	Kabupaten Mesuji	0,54	Rendah
2	Kabupaten Tulang Bawang	0,69	Rendah
3	Kabupaten Tulang Bawang Barat	0,55	Rendah
4	Provinsi Lampung	0,56	Sedang

Sumber: *jdih.kemenkeu.go.id* tahun 2017

Berdasarkan data peta kapasitas fiskal dari tahun 2015 hingga 2017 menunjukkan Indeks Kapasitas Fiskal (IKF) Provinsi Lampung cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hasil yang fluktuatif justru terjadi pada IKF Kabupaten Mesuji, Tulang Bawang, dan Tulang Bawang Barat yang mengalami penurunan setiap tahunnya. Kabupaten Mesuji misalnya, ditahun 2015,2016, dan 2017 berturut-turut IKF kabupaten tersebut adalah 1,24 (Tinggi), 1,08 (Tinggi), dan 0,54 (Rendah). Kabupaten Tulang Bawang data tahun 2015,2016, dan 2017 IKF kabupaten tersebut mengalami kenaikan meskipun masih berada dalam level rendah yaitu secara berturut-turut; 0,04 (Rendah), 0,45 (Rendah), dan 0,69 (Rendah). Sedangkan Kabupaten Tulang Bawang Barat data tahun 2015,2016, dan 2017 IKF kabupaten tersebut mengalami penurunan yaitu secara berturut-turut; 0,76 (Sedang), 0,72 (Sedang), dan 0,55 (Rendah).

### 5.1.5. Kemiskinan

Variabel terakhir menyangkut kinerja otonomi daerah pada aspek atau sisi makro-ekonomi adalah jumlah penduduk miskin. Penurunan jumlah penduduk miskin adalah indikasi dari peningkatan kesejahteraan di daerah bersangkutan, demikian pula sebaliknya. *Trend* berkurangnya jumlah penduduk miskin setiap tahun pada tiga kabupaten lokasi penelitian menunjukkan keberhasilan desentralisasi fiskal dalam mewujudkan tujuannya dan begitu pula sebaliknya. Tabel 23 di bawah ini menunjukkan persentase jumlah penduduk miskin di Kabupaten Tulang Bawang, Tuba Barat, dan Mesuji selama kurun waktu tiga tahun terakhir.

**Tabel 20.** Jumlah Penduduk Miskin Tiga Kabupaten Lokasi Studi

Kabupaten	2015	2016	2017
Tulang Bawang	10,25	10,20	10,15
Tuba Barat	8,23	8,40	7,80
Mesuji	8,20	8,00	8,00

Sumber: RPJMD Kabupaten, diolah.

Pada tabel 23 keunikan justru terjadi ketika kabupaten induk (Kabupaten Tulang Bawang) memiliki jumlah penduduk miskin terbesar dibanding dua kabupaten lainnya hasil pemekaran. Hal tersebut sangat tidak sebanding dengan tingginya IPM yang dimiliki oleh Kabupaten Tulang Bawang. Posisi Kabupaten Mesuji, dalam variabel jumlah penduduk miskin justru relatif paling rendah dibandingkan dua kabupaten lainnya meskipun pertumbuhan ekonomi kabupaten ini paling rendah dibanding dengan dua kabupaten lainnya.

Berdasarkan hasil estimasi antara desentralisasi fiskal terhadap kesejahteraan masyarakat, menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh positif (0,228) terhadap kesejahteraan masyarakat atau dapat dikatakan bahwa semakin tinggi desentralisasi fiskal, semakin tinggi kesejahteraan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis ketiga yang menyatakan “desentralisasi fiskal berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat” dapat diterima. Hasil studi ini mendukung teori *fiscal federalism* dan temuan empiris di-antaranya Lindahman dan Thurmaier (2002), serta penelitian yang dilakukan di Indonesia seperti Soesilowati, *ed.* (2005), Hirawan (2007) dan Simanjuntak (2010). Hal ini sesuai dengan argumentasi di mana desentralisasi fiskal akan membuat pemerintah daerah lebih mengetahui apa yang menjadi keinginan dan kebutuhan masyarakatnya.

Pemberian otonomi daerah melalui de-sentralisasi fiskal dan kewenangan daerah memberikan keleluasaan kepada daerah dalam melaksanakan pembangunan daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan desentralisasi Pemerintah Daerah lebih mengetahui apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan masyarakat lokal (*local needs and local demand*) sehingga *service delivery* semakin responsif dan mampu mengantarkan masyarakat menjadi lebih sejahtera.

Kasus Kabupaten Mesuji unik jika analisis difokuskan pada upaya menjelaskan implikasi dari desentralisasi fiskal terhadap pengentasan kemiskinan dan/atau pengurangan pengangguran. Secara teori, perkembangan pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh produktifitas tenaga kerja yang bekerja sehingga dapat

mengurangi tingkat pengangguran yang dapat dinilai dari Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). TPAK merupakan rasio antara banyaknya angkatan kerja dengan banyaknya penduduk usia kerja yang kemudian dipergunakan sebagai indikator ketenagakerjaan untuk memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari merujuk pada suatu waktu dalam periode tertentu. Semakin besar TPAK berarti semakin rendah tingkat pengangguran pada penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) di daerah tersebut, demikian pula sebaliknya.

**Tabel 21.** Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Mesuji

Kabupaten	2015	2016	2017	Rerata
Mesuji	42,27	43,63	44,07	43,32

*Sumber: RPJMD Kabupaten Mesuji 2017-2022, diolah.*

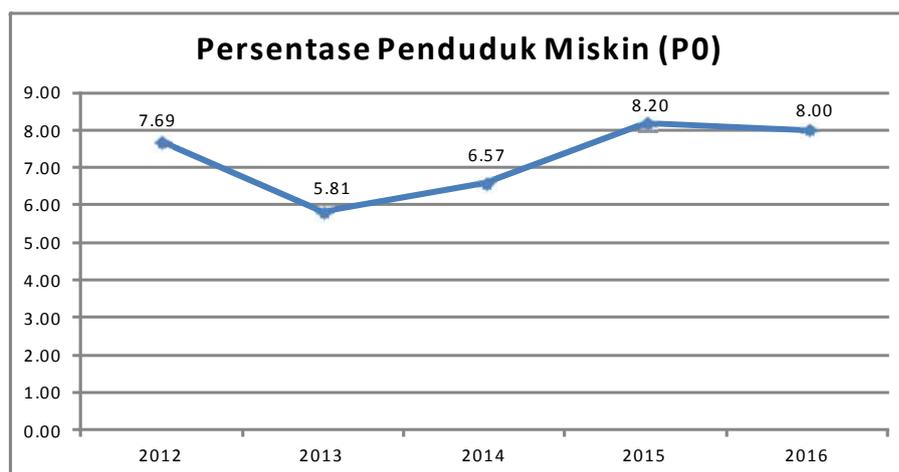
Gambaran pada tabel 21 menjelaskan bahwa rata-rata TPAK di Kabupaten Mesuji hanya 43,32% yang berarti hanya sebanyak 43% dari jumlah angkatan kerja atau penduduk berusia lebih dari 15 tahun di Kabupaten Mesuji yang bekerja secara tetap. 67% nya berada pada tiga kemungkinan, yaitu pekerja tidak tetap, pencari kerja, serta pengangguran.

Pada aspek lainnya, perkembangan tingkat kemiskinan Kabupaten Mesuji dari tahun 2012-2016 meskipun secara garis besar terus meningkat namun pada tahun 2016 mulai menampakkan penurunan. Pada tahun 2012 tingkat kemiskinan di Kabupaten Mesuji sebesar 7,69% mengalami penurunan sampai sebesar 5,81% pada tahun 2013, namun mengalami kenaikan kembali sampai tahun 2015 menjadi 8,20%, kemudian mengalami penurunan kembali menjadi 8,00% pada tahun 2016. Dengan demikian, analisis efektivitas tingkat kemiskinan Kabupaten Mesuji pun capaiannya semakin membaik setiap tahun yang terjadi sejak tahun 2015 sebagaimana terlihat dalam gambar 13.

Analisis tentang kemiskinan, juga dapat dinilai dari indeks kedalaman kemiskinan sebagai ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Pada tahun 2014 Indeks kedalaman kemiskinan (P1) Kabupaten Mesuji sebesar 0,77%, angka tersebut berada dibawah indeks P1 nasional yaitu sebesar 1,75% dan juga jauh dibawah

indeks P1 Provinsi Lampung sebesar 2,3%. Dengan indeks P1 0,77% (<5%) angka ini memperlihatkan bahwa kemiskinan di Kabupaten Mesuji lebih mudah ditanggulangi mengingat hanya sedikit selisihnya antara pengeluaran penduduk miskin dengan garis kemiskinan.

**Gambar 13.** Perkembangan Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Mesuji



Sumber: RPJMD Kabupaten Mesuji 2017-2022, diolah.

Indeks kedalaman kemiskinan (P1) pada tahun 2010 mencapai angka 1,06. Angka ini pada tahun 2014 menurun sebesar 0,29 hingga menjadi 0,77. Selama periode 2010-2014 penurunan rata-rata indeks kedalaman kemiskinan per tahun sebesar 0,06. Perkembangan indeks P1 penurunannya tidak konsisten, periode 2010-2013 mengalami penurunan sebesar 0,46 yaitu dari angka 1,06 pada tahun 2010 menurun sampai angka 0,6 pada tahun 2013, namun pada tahun 2014 mengalami kenaikan hingga mencapai angka 0,77. Hal ini sejalan dengan kenaikan angka garis kemiskinan periode tahun 2010 – 2014 yaitu sebesar 35,20% sehingga menyebabkan beban masyarakat semakin berat dan berdampak juga pada peningkatan tingkat kemiskinan periode tahun 2013-2014 yaitu dari 5,81 pada tahun 2013 menjadi 6,57 pada tahun 2014.

## 5.2. Implikasi Desentralisasi Fiskal Pada Sisi Kemandirian Fiskal Daerah

Dalam rangka menjalankan fungsi-fungsi dan kewenangan yang diekspresikan dalam wujud kebutuhan fiskal, setiap daerah memiliki dan dibekali kapasitas keuangan. [Mardiasmo \(1999:11\)](#) mengemukakan bahwa salah satu aspek dari pemerintah daerah yang harus diatur secara hati-hati adalah masalah

pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. Anggaran daerah atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan instrumen kebijakan, anggaran daerah menduduki posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas pemerintah daerah. Anggaran Daerah seharusnya dipergunakan sebagai alat untuk menentukan besarnya pendapatan dan pengeluaran, alat bantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, alat otoritas pengeluaran di masa yang akan datang. Ukuran standar untuk evaluasi kinerja serta alat koordinasi bagi semua aktivitas diberbagai unit kerja.

Penentuan besarnya penerimaan/pendapatan dan pengeluaran/belanja daerah tidak terlepas dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Anggaran mempunyai kegunaan pokok yaitu sebagai pedoman kerja, sebagai alat pengkoordinasian kerja serta sebagai alat pengawasan kerja. Dengan melihat kegunaan pokok dari anggaran tersebut maka pertumbuhan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat berfungsi sebagai: pertama fungsi perencanaan, dalam perencanaan APBD adalah penentuan tujuan yang akan dicapai sesuai dengan kebijaksanaan yang telah disepakati misalnya target penerimaan yang akan dicapai, jumlah investasi yang akan ditambah, rencana pengeluaran yang akan dibiayai.

Kedua, fungsi koordinasi anggaran berfungsi sebagai alat mengkoordinasikan rencana dan tindakan berbagai unit atau segmen yang ada dalam organisasi, agar dapat bekerja secara selaras ke arah tercapainya tujuan yang diharapkan. Ketiga, fungsi komunikasi jika yang dikehendaki dapat berfungsi secara efisien maka saluran komunikasi terhadap berbagai unit dalam penyampaian informasi yang berhubungan dengan tujuan, strategi, kebijaksanaan, pelaksanaan dan penyimpangan yang timbul dapat teratasi. Keempat, fungsi motivasi anggaran berfungsi pula sebagai alat untuk memotivasi para pelaksana dalam melaksanakan tugas-tugas yang diberikan untuk mencapai tujuan. Kelima, fungsi pengendalian dan evaluasi, anggaran dapat berfungsi sebagai alat-alat pengendalian yang pada dasarnya dapat membandingkan antara rencana dengan pelaksanaan sehingga dapat ditentukan penyimpangan yang timbul dan penyimpangan tersebut sebagai dasar evaluasi atau penilaian prestasi dan sekaligus merupakan umpan balik pada masa yang akan datang.

Pelaksanaan otonomi daerah merupakan proses yang memerlukan keterlibatan segenap unsur dan lapisan masyarakat, serta memberikan kekuasaan

bagi pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah sehingga peran pemerintah adalah sebagai katalisator dan fasilitator karena pihak pemerintahlah yang lebih mengetahui sasaran dan tujuan pembangunan yang akan dicapai. Sebagai katalisator dan fasilitator tentunya membutuhkan berbagai sarana dan fasilitas pendukung dalam rangka terlaksananya pembangunan secara berkesinambungan. Anggaran belanja rutin merupakan salah satu alternatif yang dapat merangsang kesinambungan serta konsistensi pembangunan di daerah secara keseluruhan menuju tercapainya sasaran yang telah disepakati bersama. Oleh sebab itu, kegiatan rutin yang akan dilaksanakan merupakan salah satu aspek yang menentukan keberhasilan pembangunan di daerah.

Kemandirian fiskal daerah menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) seperti pajak daerah, retribusi dan lain-lain. Karena itu otonomi daerah dan pembangunan daerah bisa diwujudkan hanya apabila disertai kemandirian fiskal yang efektif. Ini berarti bahwa pemerintahan daerah secara finansial harus bersifat independen terhadap pemerintah pusat dengan jalan sebanyak mungkin menggali sumber-sumber PAD seperti pajak, retribusi dan sebagainya.

Kinerja otonomi daerah dan dampaknya terhadap kemandirian fiskal daerah sebagai tujuan desentralisasi fiskal dapat dilihat dari variabel rasio pertumbuhan kapasitas fiskal, tingkat penurunan ketergantungan dana perimbangan, serta penurunan kesenjangan atau celah fiskal.

### **5.2.1. Kapasitas Fiskal Daerah**

Dalam rangka menjalankan fungsi-fungsi dan kewenangan-kewenangannya yang diekspresikan dalam wujud kebutuhan fiskal tersebut, setiap daerah memiliki dan dibekali kapasitas keuangan. Secara umum, yang dimaksud dengan kapasitas fiskal daerah adalah kemampuan pemerintah daerah untuk menghimpun pendapatan berdasarkan sumber-sumber yang dimilikinya

Secara konsep, yang dimaksud dengan kapasitas fiskal daerah adalah kemampuan pemerintah daerah untuk menghimpun pendapatan berdasarkan sumber-sumber yang dimilikinya atau disebut dengan derajat otonomi fiskal. [Munir \(2004:27\)](#), menjelaskan bahwa salah satu ciri yang menunjukkan sebuah daerah

mampu mandiri atau berotonomi terletak pada kemampuan keuangan daerahnya. Dengan demikian, daerah otonom harus memiliki hak atau kewenangan serta kemampuan untuk menggali sumber keuangan sendiri, mengelola, serta menggunakannya untuk mampu membiayai penyelenggaraan pemerintahan di daerahnya. Salah satu tolak ukur kemampuan keuangan daerah ditunjukkan dalam skala interval Derajat Otonomi Fiskal (DOF) sebagaimana tabel 22. Berdasarkan tabel 25 dapat dijelaskan bahwa apabila persentase jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) lebih dari 50% dibanding total pendapatan daerah, maka DOF daerah tersebut sangat baik, interval 40,01 s.d 50% maka kemampuan keuangan daerah tersebut baik, dan seterusnya.

**Tabel 22.** Rasio Derajat Otonomi Fiskal

<b>PAD/TPD (%)</b>	<b>Kemampuan Keuangan</b>
0,00 - 10,00	Sangat Kurang
10,01 – 20,00	Kurang
20,01 – 30,00	Sedang
30,01 – 40,00	Cukup
40,01 – 50,00	Baik
>50,01	Sangat baik

*Sumber: Munir & Tangkilisan, 2004.*

Penilaian atau penghitungan terhadap jumlah PAD di Kabupaten Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat dan Mesuji dibandingkan atau dibagi dengan total pendapatan daerah pada kurun waktu tahun anggaran 2015-2017 didapatkan data DOF sebagaimana tabel 26. Data pada tabel 23 ini menunjukkan bahwa Kabupaten Tulang Bawang Barat memiliki kemampuan keuangan kurang karena hanya memiliki DOF rata-rata 15,3%, sedangkan kabupaten induk (Tulang Bawang, sebesar rata-rata hanya 3,09%) dan Kabupaten Mesuji (rata-rata 4,45% justru termasuk kabupaten dengan kemampuan keuangan daerah kategori sangat kurang.

**Tabel 23.** Derajat Otonomi Fiskal

Kabupaten	2015	2016	2017
Tulang Bawang	3,45	2,31	3,52
Tuba Barat	10,52	12,85	22,79
Mesuji	3,67	4,86	4,84

*Sumber: BPS, data diolah, 2019.*

### 5.2.2. Indeks Kemampuan Rutin

Berikutnya, pada variabel kedua yaitu penurunan ketergantungan dana perimbangan dapat dinilai dari keadaan di mana jumlah PAD lebih besar daripada bantuan dari pemerintah pusat yang terdiri atas DAU, DAK, dana bantuan provinsi, serta dana pinjaman (jika ada). Apabila jumlah PAD lebih besar daripada bantuan dari pemerintah pusat maka ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat semakin kecil. Dalam bahasa lain, Semakin rendah ketergantungannya, maka derajat desentralisasi fiskal semakin tinggi (Simanjuntak, 2010). Menurut Purba (2012), relasi antara kemampuan keuangan dengan hubungan pemerintah pusat dengan daerah seperti yang ditunjukkan pada tabel 24 berikut.

**Tabel 24.** Rasio Kemampuan Fiskal

<b>Kemampuan keuangan</b>	<b>Rasio Kemandirian %</b>	<b>Pola hubungan</b>
Rendah sekali	0-25	Instruktif
Rendah	25-50	Konsultatif
Sedang	50-75	Partisipatif
Tinggi	75-100	Delegatif

*Sumber: Purba, 2012.*

Berdasarkan penghitungan terhadap jumlah PAD di Kabupaten Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat dan Mesuji dibandingkan atau dibagi dengan total pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan pemerintah pusat dan provinsi pada kurun waktu tahun anggaran 2015-2017 didapatkan data kemampuan daerah sebagaimana tabel 28. Data pada tabel 25 menunjukkan bahwa seluruh kabupaten lokasi penelitian ini memiliki kemampuan fiskal yang rendah sekali karena jauh di bawah 25%.

**Tabel 25.** Indeks Kemampuan Rutin

Kabupaten	2015	2016	2017
Tulang Bawang	4,81	3,16	5,04
Tuba Barat	3,63	2,66	3,38
Mesuji	4,73	5,07	6,50

*Sumber: BPS, data diolah, 2019.*

### 5.2.3. Kesenjangan Fiskal Daerah

Terakhir, variabel kesenjangan fiskal atau celah fiskal adalah selisih antara kebutuhan fiskal daerah dikurangi dengan kapasitas fiskal yang dimiliki daerah (Simanjuntak, 2010). Tabel 26 maupun 28 di atas keduanya menunjukkan bahwa jika dibandingkan dengan kebutuhan daerah, kemampuan keuangan daerah ketiga kabupaten ini masih sangat jauh sehingga tingkat ketergantungan daerah kepada bantuan keuangan pusat sangat tinggi sebagaimana terlihat pada tabel 26. PAD yang jumlahnya sangat rendah di bawah kebutuhan fiskal bahkan jauh di bawah kebutuhan untuk membiayai belanja rutin mengindikasikan bahwa celah fiskal pada ketiga kabupaten ini sangat tinggi. Artinya, ketergantungan keuangan dari Kabupaten Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat dan Mesuji kepada pemerintah pusat sangat tinggi sehingga derajat desentralisasi fiskal pada ketiga kabupaten ini sangat rendah.

**Tabel 26.** Kesenjangan Fiskal Daerah

Kabupaten	2015	2016	2017
Tulang Bawang	93,19	96,84	94,96
Tuba Barat	96,27	97,44	96,62
Mesuji	95,17	94,93	94,50

*Sumber: BPS, data diolah, 2019*

Data pada tabel 29 menunjukkan bahwa ketergantungan keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat, maupun Kabupaten Mesuji sangat tinggi seluruhnya di atas 93% pada kurun waktu tiga tahun terakhir. Artinya, kemampuan PAD yang dimiliki ketiga kabupaten tersebut tidak akan mungkin sanggup membiayai seluruh kebutuhan pembangunan daerah.

Setiap daerah (*subnation*) mesti menyediakan pelayanan publik minimum (*vital*) kepada masyarakat yang berada di wilayahnya, tanpa memandang apakah mereka itu penduduk tetap atau pendatang. Banyak daerah yang menanggung banyak beban tanggung jawab fiskal, seperti misalnya daerah yang memiliki banyak penduduk miskin, ataupun daerah dengan proporsi penduduk usia sekolah (6-18 tahun) tinggi. Lalu, daerah-daerah dengan wilayah amat luas dan penduduk tersebar misalnya, mesti menanggung beban pengeluaran per kapita yang amat tinggi untuk konstruksi dan pemeliharaan jalan. Ini semua mencerminkan besarnya kebutuhan

fiskal karena biaya dalam penyediaan jasa pelayanan publik menjadi tinggi ataupun cakupan dari program-program yang mesti dilaksanakan oleh daerah melebar. Jadi, pada dasarnya kebutuhan fiskal adalah kebutuhan daerah untuk membiayai semua pengeluarannya dalam rangka menjalankan fungsi dan kewenangan daerah menyediakan pelayanan publik (*expenditure needs*).

Untuk menghitung atau mengukur kebutuhan fiskal yang sebenarnya dari suatu daerah bukanlah hal yang mudah. Persoalan biasanya muncul karena ketidaklengkapan data, ataupun kekaburan beberapa fungsi dari pemerintah daerah yang bersangkutan. Pada garis besarnya, ada dua pendekatan yang digunakan dalam mengukur kebutuhan fiskal suatu daerah. Pendekatan pertama membagi pengeluaran dari pemerintah daerah atas berbagai kategori berbeda, dan memperkirakan kebutuhan pemerintah yang bersangkutan terhadap masing-masing kategori. Jumlah seluruh kebutuhan dari masing-masing kategori ini merupakan kebutuhan fiskal dari daerah bersangkutan. Namun cara ini sangat membutuhkan data dan informasi yang relatif lengkap dan akurat. Ini masih sulit untuk dipenuhi terutama di negara-negara berkembang. Oleh karena itu, perkiraan kebutuhan fiskal biasa dilakukan lewat pendekatan yang lebih sederhana tanpa harus melibatkan banyak variabel dan mengurangi kebutuhan informasi yang substansial.

Pada saat yang sama, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal lebih dimaknai oleh *stakeholders* di daerah sebagai sekadar penyerahan sejumlah uang ke daerah sehingga berbagai strategi yang ditempuh lebih dominan pada upaya agar jumlah DAU maupun DAK dapat semakin besar masuk di daerah. Dalam bahasa lainnya, para pengelola keuangan daerah lebih berfokus pada seberapa besar jumlah uang dari pusat dapat masuk ke daerah sehingga orientasi intensifikasi perolehan pendapatan daerah melalui peningkatan dana perimbangan lebih dominan dibanding strategi inovasi pada upaya peningkatan PAD baik pada sektor pajak maupun retribusi daerah.

Selain itu, pemberian wewenang kepada daerah untuk memungut sumber pendapatan dalam bentuk pajak dan retribusi daerah dominan dilakukan secara pragmatis demi tujuan pendapatan daripada pelayanan. Indikasinya tercermin dalam bentuk lebih dari 50% Peraturan Daerah (Perda) yang dihasilkan di tiga kabupaten ini adalah Perda yang berimplikasi kepada tercapainya target pendapatan dari sektor pajak dan retribusi daerah pada berbagai urusan atau kewenangan tertentu.

### 5.3. Faktor Pendorong dan Penghambat Desentralisasi Fiskal

Dari perspektif manajerial maupun kondisional bagi studi kebijakan publik, teori implementasi kebijakan dari [Abidin \(2004:24\)](#) sangat komprehensif dan relevan dipergunakan sebagai landasan analisis dalam menilai faktor penyebab atau penghambat implementasi kebijakan publik. Menurutnya, implementasi kebijakan publik (salah satunya kebijakan desentralisasi fiskal) dapat dinilai faktor yang mempengaruhinya dengan intisari teoritik sebagai berikut:

1. Bahwa proses implementasi kebijakan (termasuk kebijakan fiskal) ditentukan oleh dukungan dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi substansi kebijakan dan dukungan sumber daya, sedangkan faktor eksternal meliputi kondisi lingkungan dan dukungan masyarakat.
2. Dukungan faktor internal kebijakan secara elaboratif meliputi:
  - (1). Subtansi kebijakan, bahwa suatu kebijakan dianggap berkualitas dan mampu dilaksanakan jika memiliki substansi:
    - d. tujuan, bahwa tujuan yang ingin dicapai atau alasan yang dipakai untuk membuat kebijakan itu dapat dikatakan baik jika tujuan itu dapat dipahami atau diterima oleh rasionalitas akal sehat serta tujuan itu diinginkan atau memenuhi kepentingan orang banyak atau kepentingan masyarakat.
    - e. asumsi, bahwa asumsi yang dipakai dalam proses perumusan kebijakan itu realistis atau tidak mengada-ada.
    - f. informasi, bahwa informasi yang digunakan cukup lengkap dan benar atau tidak kadaluwarsa. Kebijakan yang didasarkan pada informasi yang kurang lengkap adalah tidak tepat.
  - (2). Sumber daya, yaitu meliputi:
    - d. sumber daya aparatur, yaitu dukungan aparat pelaksana kebijakan.
    - e. anggaran, yaitu dukungan biaya bagi pelaksanaan kebijakan.
    - f. sarana, yaitu dukungan peralatan dan pelaksanaan kebijakan.
3. Dukungan faktor eksternal kebijakan yang secara elaboratif meliputi dua kondisi, yaitu:
  - (1) Kondisi lingkungan kebijakan, menyangkut kondisi sosial politik dan ekonomi.

- (2) Dukungan masyarakat, yaitu dukungan masyarakat sebagai sasaran (objek) kebijakan yang diimplementasikan.

Merujuk pada pendapat [Abidin \(2004:24\)](#) tersebut di atas secara sederhana dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan desentralisasi fiskal dan implikasinya terhadap pencapaian tujuan kemandirian, pengentasan kemiskinan, dan kesejahteraan akan dianalisis dalam dua faktor utama yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi substansi kebijakan dan dukungan sumber daya, sedangkan faktor eksternal adalah meliputi kondisi lingkungan dan dukungan masyarakat.

### **5.3.1. Faktor Internal**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam konteks substansi kebijakan dapat dinyatakan bahwa kebijakan desentralisasi fiskal merupakan kebijakan yang berkualitas dan sejatinya harus mampu dilaksanakan minimal oleh dua argumentasi. *Pertama*, bahwa tujuan yang ingin dicapai atau alasan yang dipakai untuk membuat kebijakan desentralisasi fiskal dapat dikatakan sangat baik karena seluruh tujuan dari kebijakan ini dapat dipahami atau diterima oleh rasionalitas akal sehat maupun memenuhi unsur yang diinginkan atau kepentingan masyarakat secara luas. *Kedua*, bahwa asumsi dan informasi yang digunakan dalam proses perumusan kebijakan desentralisasi fiskal sangat lengkap, benar, dan realistis karena telah didasarkan pada perhitungan terhadap kemampuan keuangan daerah maupun kemampuannya dalam memenuhi seluruh kebutuhan fiskal daerah dalam memenuhi keberfungsian fungsi pemerintahan.

Pada aspek sumber daya, yaitu meliputi sumber daya aparatur yaitu dukungan aparat pelaksana kebijakan, anggaran yaitu dukungan biaya bagi pelaksanaan kebijakan serta sarana mencakup dukungan peralatan dan pelaksanaan kebijakan di daerah, terlihat masih sangat lemah salah satunya disebabkan oleh rendahnya IPM secara makro maupun rendahnya kemampuan keuangan saat ini. Indeks kemampuan rutin dari APBD Kabupaten Mesuji juga sangat rendah sehingga total pendapatan daerah sebagian besar masih terkonsentrasi untuk membiayai belanja rutin atau gaji pegawai daripada dipergunakan untuk membiayai

pelaksanaan pembangunan yang secara langsung berdampak pada pertumbuhan ekonomi.

### **5.3.2. Faktor Eksternal**

Pada aspek dukungan faktor eksternal kebijakan yang secara elaboratif meliputi kondisi lingkungan kebijakan menyangkut kondisi politik dan ekonomi serta dukungan masyarakat sebagai sasaran kebijakan, secara umum tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Satu-satunya aspek yang memiliki pengaruh sangat signifikan terhadap kemampuan keuangan Kabupaten Mesuji adalah menyangkut kondisi sosial kabupaten ini yang dalam beberapa tahun terakhir terjadi banyak konflik di masyarakat. Secara faktual, aspek ini memberi dampak pada keengganan investor untuk berinvestasi di Kabupaten Mesuji sehingga potensi pendapatan daerah tidak dapat meningkat secara signifikan. Kondisi ini sangat mempengaruhi jumlah PAD (kemampuan daerah) yang kenaikannya tidak signifikan dibanding jumlah dana perimbangan (transfer pusat ke daerah).

## **BAB VI**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **6.1. Simpulan**

Kinerja otonomi daerah sebagai implikasi pelaksanaan desentralisasi fiskal sejatinya harus menunjukkan hasil yang linier antar satu variabel dengan variabel berikutnya. Dalam aspek makro-ekonomi, variabel peningkatan pertumbuhan ekonomi harus berdampak positif terhadap peningkatan partisipasi angkatan kerja atau penurunan tingkat pengangguran, linier dengan nilai indeks pembangunan manusia, dan terakhir berimplikasi pada penurunan jumlah penduduk miskin. Pada aspek kesehatan fiskal, kabupaten induk idealnya harus memiliki keunggulan pada aspek kinerja dan kemampuan keuangan karena kabupaten induk memiliki tanggung jawab untuk melakukan pembinaan kepada kabupaten hasil pemekaran.

Hasil temuan penelitian disandingkan dengan idealitas konsep tersebut menghasilkan kesimpulan penelitian ini, sebagai berikut:

1. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), maupun Total Pendapatan Daerah (TPD) di Kabupaten Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat, dan Mesuji selalu mengalami peningkatan, namun jika disandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung secara rata-rata maupun secara nasional terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi pada ketiga kabupaten ini justru mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan jumlah PAD, DAU, maupun TPD sebagai wujud desentralisasi fiskal tidak selalu memberikan implikasi positif terhadap pertumbuhan ekonomi, dalam konteks simpulan ini Kabupaten Mesuji dapat dijadikan sebagai contoh nyata ketidakmampuan desentralisasi fiskal dalam mewujudkan pertumbuhan ekonominya.
2. Pada aspek kesejahteraan, jika dibandingkan dengan data IPM dari lima belas kabupaten/kota di Provinsi Lampung, IPM Kabupaten Mesuji berada pada posisi paling rendah di Provinsi Lampung di bawah rata-rata IPM provinsi maupun rata-rata IPM nasional. Kabupaten Tulang Bawang berada pada posisi IPM paling baik diantara dua kabupaten lain hasil pemekaran. Namun demikian,

- Kabupaten Tulang Bawang sebagai kabupaten induk justru memiliki persentase jumlah penduduk miskin yang paling tinggi dibandingkan dua kabupaten lain hasil pemekaran kabupaten ini. Hal tersebut sangat tidak sebanding dengan tingginya IPM yang dimiliki oleh Kabupaten Tulang Bawang. Oleh karena itu, terjadi ketimpangan cukup signifikan pada ketiga kabupaten pada lokasi penelitian dibandingkan dengan kabupaten lain di Provinsi Lampung.
3. Pada aspek kemampuan keuangan kurun waktu tiga tahun terakhir pada indikator derajat otonomi fiskal, Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat, dan Mesuji hanya memiliki rasio kemampuan rata-rata sebesar 4,33%. Artinya, kemampuan PAD Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat, dan Mesuji Mesuji untuk dapat membiayai seluruh kebutuhan daerah hanya sebesar 4,33% sehingga terjadi kesenjangan sebesar 95,67%. Hal ini menunjukkan bahwa kapasitas fiskal Kabupaten Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat, dan Mesuji selama tiga tahun terakhir masuk kategori sangat kurang sehingga derajat ketergantungannya kepada level pemerintahan di atasnya menjadi sangat tinggi.
  4. Kinerja otonomi daerah di kabupaten induk (Kabupaten Tulang Bawang) ternyata tidak lebih baik dibanding dua kabupaten lainnya (Tulang Bawang Barat dan Mesuji), bahkan Kabupaten Tulang Bawang Barat sebagai daerah pemekaran justru memiliki keunggulan pada tiga variabel pada aspek sisi makro-ekonomi serta dua indikator pada aspek kesehatan fiskal terutama pada derajat otonomi fiskal. Meskipun Kabupaten Tulang Bawang (kabupaten induk) memiliki *trend* pertumbuhan ekonomi dan peningkatan IPM paling baik di antara dua kabupaten hasil pemekaran, namun kelebihan dua indikator di kabupaten ini tidak beriringan dengan berkurangnya jumlah pengangguran serta penurunan persentase jumlah penduduk miskin.
  5. Terdapat faktor-faktor yang dapat mendukung sehingga implikasi desentralisasi fiskal terhadap kemandirian daerah, kemiskinan, dan kesejahteraan dapat tercapai. Faktor tingginya akuntabilitas informasi dan asumsi sebagai basis penghitungan kapasitas keuangan maupun tingkat penerimaan yang tinggi baik oleh pemerintah daerah maupun oleh pemerintah pusat terhadap pentingnya desentralisasi fiskal adalah modal utama. Hanya saja, aspek sumber daya

aparatur di daerah maupun derajat kemampuan anggaran untuk terbebas dari beban pembiayaan rutin masih menjadi faktor penghambat utama di Kabupaten Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat, dan Mesuji sehingga implementasi desentralisasi fiskal belum mampu mencapai idealitas tujuan yang diharapkan.

Berdasarkan lima temuan tersebut, secara argumentatif dapat disimpulkan bahwa implementasi desentralisasi fiskal di Kabupaten Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat dan Mesuji selama sepuluh tahun pasca pemekaran belum memberikan implikasi positif terhadap ketercapaian idealitas tujuan dari kebijakan ini. Dalam arti lain, relasi yang harus terbangun antara desentralisasi fiskal dengan kemandirian daerah, pengurangan kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat belum merupakan hubungan yang selalu sejalan karena meskipun desentralisasi fiskal telah memberikan kontribusi peningkatan kemampuan keuangan relatif lebih tinggi, namun derajat ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat tidak semakin menurun.

## **6.2. Tawaran Model Asimetri Desentralisasi Fiskal**

Pemberian otonomi yang berbeda atas satu daerah atau wilayah dari beberapa daerah merupakan praktik penyelenggaraan pemerintahan yang cukup umum ditemui dalam pengalaman pengaturan politik di banyak negara. Pengalaman ini berlangsung baik di dalam bentuk negara kesatuan yang didesentralisasikan maupun dalam format pengaturan bentuk negara federatif. Dalam khasanah ilmu politik dan pemerintahan, pola pengaturan yang tidak sebanding atau berbeda antar wilayah ini disebut sebagai desentralisasi asimetris (*asymmetrical decentralization*).

Konsep desentralisasi asimetris berkembang dari konsep tentang *asymmetric federation* yang diperkenalkan oleh Charles Tarlton pada tahun 1965 (Tillin, 2006: 46-48). Menurut Tillin, terdapat dua jenis *asymmetric federation*, yakni *de facto dan de jure asymmetry*. Jenis pertama merujuk pada adanya perbedaan antar daerah dalam hal luas wilayah, potensi ekonomi, budaya dan bahasa, atau perbedaan dalam otonomi, sistem perwakilan atau kewenangan yang timbul karena adanya perbedaan karakteristik wilayah dimaksud. Sedangkan asimetri kedua merupakan produk konstitusi yang didesain secara sadar untuk mencapai tujuan tertentu. Hal ini

berhubungan dengan alokasi kewenangan dalam besaran yang berbeda, atau pemberian otonomi dalam wilayah kebijakan tertentu kepada daerah tertentu saja.

Menurut Tim Asistensi Kementerian Keuangan bidang desentralisasi Fiskal (TADF), asimetri diartikan sebagai perbedaan status di antara unit-unit dalam suatu negara federal atau negara yang terdesentralisasi berdasarkan konstitusi atau ketentuan hukum lainnya. Desentralisasi asimetris dalam bentuk otonomi khusus merupakan perwujudan desentralisasi yang disesuaikan dengan karakteristik daerah sehingga tidak disamaratakan secara general penerapannya pada seluruh daerah di dalam suatu negara. Ada beberapa negara di dunia yang menerapkan status otonomi khusus terhadap wilayah di negaranya. Sebagai contoh dapat diambil dari pengalaman Kanada dalam mengatur keistimewaan Quebec dalam kesatuannya dengan Federasi Kanada; Mindanao dalam kesatuan politiknya dengan Filipina; Sami Land dalam kesatuannya dengan Norwegia; dan Cina yang membuat kesepakatan dengan Inggris untuk menetapkan status Hongkong sebagai *special administrative region* pada tahun 1997 (TADF, 2012).

Di Indonesia, dalam kaitan dengan desentralisasi asimetris telah dilakukan kepada daerah dengan status otonomi khusus, misalnya Papua, Nangroe Aceh Darussalam, serta Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Kewenangan khusus tersebut salah satunya juga termasuk dalam hal kewenangan fiskal atau keuangan. Dalam konteks ini, maka asimetri desentralisasi fiskal adalah bagian tak terpisahkan dari asimetri desentralisasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Adapun bentuk asimetri desentralisasi fiskal secara khusus tidak dilakukan atas dasar atas baru atau lamanya sebuah daerah otonom terbentuk atau berdiri.

### **6.3. Saran**

Berdasarkan temuan dan simpulan hasil penelitian, perlu dibangun kebijakan baru tentang model hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah misalnya dengan pengembangan teori asimetri desentralisasi fiskal. Diperlukan model alternatif tentang bagaimana desentralisasi fiskal diterapkan dengan basis kondisi daerah otonom (baru berdiri atau sudah lama terbentuk) sehingga tujuan otonomi daerah yakni kemandirian daerah benar-benar

dapat diwujudkan melalui kebijakan desentralisasi fiskal ini. Oleh karena itu, saran ini akan berimplikasi pada aspek regulasi maupun teoritik yaitu perlunya penataan ulang tentang aturan perundang-undangan mengenai kebijakan fiskal bagi daerah serta riset mengenai asimetri desentralisasi fiskal.

Namun demikian, menilai kinerja otonomi daerah serta kemandirian daerah ternyata tidak cukup hanya dengan menggunakan pendekatan keuangan dengan aspek makro-ekonomi maupun aspek kesehatan fiskal daerah. Dalam perspektif ini, desentralisasi fiskal sejatinya hanya merupakan salah satu parameter untuk menilai kemandirian daerah maupun kinerja otonomi daerah, baik di daerah yang sudah lama terbentuk maupun daerah otonom baru hasil pemekaran wilayah. Oleh karena itu, saran ini akan berimplikasi pada aspek akademik yaitu perlunya penelitian-penelitian lain dengan fokus kajian aspek lain selain sisi makro-ekonomi dan sisi keuangan daerah sehingga implikasi desentralisasi fiskal bagi daerah dapat dijelaskan secara lebih komprehensif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Said Zainal. (2004). *Kebijakan Publik*. Jakarta: Yayasan Pancur Siwah.
- Abimanyu, A. dan Megantara, A. (2009). *Era Baru Kebijakan Fiskal; Pemikiran, Konsep dan Implementasi*, Penerbit Kompas, Jakarta: Penerbit Kompas.
- Aliasuddin dan Dawood, Taufiq C. (2008). *Pertumbuhan Ekonomi Dan Pengeluaran Pemerintah*. Makalah disampaikan pada Seminar Universitas Syiah Kuala, Universitas Bengkulu dan Universiti Kebangsaan Malaysia. Banda Aceh, 27-28 Oktober 2008. Fakultas Ekonomi, Universitas Syiah Kuala Darussalam-Banda Aceh.
- Amri, P, D. (2000). *Dampak ekonomi dan politik UU No. 22 dan 25 Tahun 1999 Tentang Otonomi Daerah*. Jakarta: CSIS Working Paper Series.
- Bahl, R. W. & Linh, J. (1992). *Urban finance in development countries*. New York: Oxford University Press.
- Bird, R. M., and Vaillancourt, F. (2000). *Fiscal Decentralization in Developing Countries*, United Kingdom : Cambridge University Press.
- Bird, R. M., Ebel, R., & Wallich, C. (1995). *Decentralization of the socialist state: Intergovernmental finance in transition economics*. Washington DC: World Bank.
- Boediono. (2009). *Ekonomi Indonesia Mau Ke Mana? (Kumpulan Esai Ekonomi)*. Jakarta: KPG (Kepustakaan Populer Gramedia) Bekerjasama dengan Freedom Institute.
- Danim, Sudarwan. (1997). *Pengantar Studi Penelitian Kebijakan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Faisal, Sanapiah. (1990). *Penelitian Kualitatif: Dasar Dasar dan Aplikasi. Edisi 1, Cetakan 1*. Malang: Yayasan Asih Asuh Asah.
- Gramlich, E. (1993). A Policy Maker's Guide to Fiscal Decentralization. *National Tax Journal*, Volume XLVI, hal. 229-235.
- Halim, Abdul. (2001). *Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta: UPP YKPN.
- Kaloh, J. (2002). *Mencari bentuk Otonomi Daerah*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Kumorotomo, W. (2008). *Desentralisasi Fiskal : Politik dan Perubahan Kebijakan 1994-2004*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Kuncoro, M. (2004). *Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang*. Jakarta: Erlangga.

- Mankiw, N. G., (2007). *Makroekonomi* (edisi keenam), terjm. Jakarta: Erlangga.
- Mardiasmo. 2004. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta : BPFE Universitas Gadjah Mada.
- Martinez, V. J. M., & McNab, R. (2001). Fiscal decentralization, economic growth, and democratic governance. *Working Paper*.
- Miles, Matthew B dan A.M. Huberman. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. Universitas Jakarta: Indonesia Press.
- Moleong, J, Lexy. (2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Munir, Dasril (2004). Analisis Transformasi Struktural dan Basis Ekonomi Daerah. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan UNS*, Volume 1 Nomor 1 Juli 2004, hal 15-27.
- Nurman, Muhammad Andry. (2013). Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Disparitas Pendapatan Regional Di Indonesia Tahun 2001-2008. *Jurnal Organisasi dan Manajemen*, Volume 9, Nomor 1, Maret 2013, halaman 1-20
- Pemerintah Kabupaten Mesuji. (2017). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2017-2022*. Brabasan: BAPPEDA Kabupaten Mesuji.
- Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang. (2017). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2017-2022*. Menggala: BAPPEDA Kabupaten Tulang Bawang.
- Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat. (2017). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2017-2022*. Panaragan: BAPPEDA Kabupaten Tulang Bawang Barat.
- Peterson, G. E. (1996). *Decentralization in Latin America: Learning through experience*. Washington DC: World Bank.
- Prud'homme, R. (1995). On the danger of decentralization. *Working Paper*.
- Riduwan. (2002). *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Rosdiana, Dewi, Suhendra E. Susi, dan Pasaribu R.B.F. (2015). Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Dan Ketimpangan Pendapatan Di Pulau Jawa Tahun 2009-2013. *Prosiding PESAT (Psikologi, Ekonomi, Sastra, Arsitektur & Sipil)* Vol. 6, Oktober 2015. Universitas Gunadarma - Depok - 20-21 Oktober 2015.
- Saputra, Bambang. (2012). Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kesejahteraan Masyarakat. *JAAI* Volume 16 No. 2, Desember 2012, halaman 185–199.

- Sasana, Hadi. (2015). Dampak Implementasi Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Stabilitas Harga di Provinsi di Indonesia. *Media Ekonomi Dan Manajemen*, Volume. 30 No. 1 Januari 2015.
- Sjafrizal. (2012). Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Regional Wilayah Indonesia Bagian Barat. *Jurnal Bulletin Prisma*, Vol 1 Tahun 2012, hal 16-21.
- Simanjuntak, R. A. (2010). Desentralisasi Fiskal dan Manajemen Makroekonomi: Urgensi Suatu *Grand Design* di Indonesia. *Majalah Prisma*, 29(3), hal. 35-57.
- Sumardi. (2014). Determinan Efektivitas Pengaruh Kebijakan Desentralisasi Fiskal Terhadap Kemampuan Keuangan Daerah Serta Dampaknya Pada Pertumbuhan Ekonomi Daerah. *Journal of Rural and Developmen*, Volume V No. 2 Agustus 2014. halaman 147-166.
- Sugiyono. (2007). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan RD*. Bandung: Alfabeta
- Syaifullah, Ahmad dan Malik, Nazaruddin. (2017). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Dan Produk Domestik Bruto Terhadap Tingkat Kemiskinan di ASEAN-4. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, Volume 1 Jilid 1/2017, Hal. 107 – 119
- Tenrini, Rita Helbra. (2014). *Pemekaran Daerah: Kebutuhan atau Euforia Demokrasi*. Makalah pada Pusat Kebijakan APBN BKF Republik Indonesia.
- Wibowo, P. (2008). Mencermati dampak desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. *Jurnal Keuangan Publik*, 5(1), hal. 55-83.
- World Bank. (1997a). *The World Development Report*. New York: Oxford University Press.

**LAMPIRAN  
DAFTAR RIWAYAT HIDUP  
KETUA TIM PENELITI**



**A. Data Identitas Diri**

1	Nama Lengkap (dengan gelar)	<b>Dr. MAULANA MUKHLIS, S.Sos, M.IP</b>
2	Jenis Kelamin	Laki Laki
3	Jabatan Fungsional	Lektor
4	Pangkat	Penata Tk I / III-d
5	NIP	19780430 200812 1001
6	NIDN	0030047805
7	Tempat dan Tanggal Lahir	Raman Aji, Lampung Timur, 30 April 1978
8	Alamat e-mail	maulanamukhlis1978@gmail.com
9	Nomor Telepon/HP/WA	0813 68245409 (WA/HP) 0721 7692056 (rumah) 0816 413529 (HP)
10	Alamat Kantor	Gedung D Lantai 1. Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Lampung. Jalan Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Gedong Meneng Kota Bandar Lampung
11	Lulusan yang Telah dihasilkan	S-1 : 36 orang S-2 : 02 orang S-3 : -
12	Mata Kuliah yang diampu	1. Kebijakan Publik (Pengantar) : S-1 2. Politik Lingkungan : S-1 3. Manajemen Proyek & <i>Procurement</i> : S-1 4. Analisis Kebijakan Publik : S-1 & S-2 5. Manajemen Lingkungan : S-2 6. Manajemen Pembangunan : S-2 7. Kebijakan dan Isu Desentralisasi : S-2 8. Politik Keuangan Daerah : S-2 9. Analisis Negara & Masyarakat Sipil : S-2

**B. Riwayat Pendidikan**

	S-1	S-2	S-3
Nama Perguruan Tinggi	Universitas Lampung	Universitas Lampung	Universitas Padjadjaran
Bidang Ilmu (Jurusan)	Ilmu Pemerintahan	Magister Ilmu Pemerintahan	Doktor Ilmu Pemerintahan)
Tahun Masuk/Tahun	1996 - 2001	2007 - 2009	2015 - 2018

	S-1	S-2	S-3
Lulus			
Kota, Negara	Bandar Lampung, Indonesia	Bandar Lampung, Indonesia	Bandung, Indonesia
Judul Skripsi/ Thesis/Disertasi	Perilaku Politik Ulama NU Lampung di PKB, PKNU, dan Partai SUNNI Pasca Reformasi 21 Mei 1998	Analisis Kebijakan dalam Perencanaan Pembangunan Kota Baru Lampung	Dinamika <i>Collaborat-ive Governance</i> Dalam Kebijakan Pemindahan Pusat Pemerintahan Provinsi Lampung 2004-2016
Nama Pembimbing/ Promotor	Hertanto, M.Si. Ph. D Dr. Suwondo, M.A.	Dr. Suwondo, MA Dr. Syarief Makhya	Prof. Nasrullah N., MA Mudiyati R, MA, Ph.D Dr. Neneng Yani, M.Si.

**C. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir**  
(Bukan Skripsi, Tesis, maupun Disertasi)

No	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah
1	2011	Model Alternatif Otonomi Daerah dalam Membangun Hubungan Pemerintah Pusat-Provinsi dan Kabupaten/Kota (Studi di Provinsi Lampung)	DP2M DIKTI	85 juta
2	2011	Rekomendasi Model Sinergisitas Kebijakan Pemerintah dan Dunia Usaha dalam Upaya Mempercepat Program Pengentasan Kemiskinan	DIPA FISIP UNILA	5 juta
3	2011	Evaluasi Efektifitas Pelaksanaan dan Rekomendasi Model Regulasi Pemerintah Dalam Mengatur <i>Coorporate Social Responsibility (CSR)</i> di Provinsi Lampung	DIPA UNILA	5 juta
4	2012	Dampak Kebijakan Pembangunan Kota Baru Lampung Terhadap Perubahan Sosial Budaya Masyarakat	DIPA FISIP UNILA	5 juta
5	2012	Analisis Persepsi dan Aspirasi <i>Stakeholders</i> Terhadap Rasionalitas Isu Kebijakan Dalam	DIPA UNILA	5 juta

No	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah
		Kebijakan Pembangunan Kota Baru Lampung		
6	2013	Rekomendasi Kebijakan Untuk Rencana Aksi Daerah Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak di Provinsi Lampung	DIPA UNILA	10 juta
7	2014	Analisis Isu Kebijakan dalam Pengembangan Kelembagaan Pemerintah (Studi di BP4K Kabupaten Pesawaran)	DIPA FISIP UNILA	6 juta
8	2014	Pemetaan Cluster dalam Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Berdasarkan Perpres Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Studi di Kota Bandar Lampung)	DIPA UNILA	10 juta
9	2015	Analisis Efisiensi Penggunaan Keuangan Negara dalam Pelaksanaan <i>E-Procurement</i> di Universitas Lampung Tahun Anggaran 2013 dan 2014	DIPA UNILA	11 juta
10	2018	Analisa Kritis atas Konsep <i>Collaborative Governance</i> (Studi Kasus Kebijakan Pemindahan Pusat Pemerintahan Provinsi Lampung)	DRPM Kemenristekdikti	55 juta
11	2019	Pengembangan Model Kolaborasi Deradikalisasi Agama Berbasis Pondok Pesantren Nahdlatul Ulama Di Provinsi Lampung (Tahun Ke-1)	DRPM Kemenristekdikti	148 juta
12	2019	Desentralisasi Fiskal dan Implikasinya terhadap Kemandirian Daerah Pasca Pemekaran (Studi di Kabupaten Tulang Bawang, Tuba Barat, dan Mesuji)	DIPA UNILA	35 juta
13	2019	Kedaulatan Desa: Studi Penyusunan Rencana Pembangunan Desa di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan	DIPA FISIP UNILA	20 juta
14	2020	Pengembangan Model Kolaborasi	DRPM	211 juta

No	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah
	<i>(lanjutan)</i>	Deradikalisasi Agama Berbasis Pondok Pesantren Nahdlatul Ulama Di Provinsi Lampung (Tahun Ke-2)	Kemenristekdikti	

#### D. Pengalaman Pengabdian kepada Masyarakat (Dalam 5 Tahun Terakhir)

No	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah
1	2009	Pendidikan Pemilih dan Pemantauan Pemilu Presiden 2009 Bagi Pemilih Pemula dan Pemilih Perempuan di Kabupaten Way Kanan	DP2M Dikti	50 juta
2	2009	Optimalisasi Kinerja Aparatur Pemerintah Dalam Pelayanan Publik di Kabupaten Pesawaran	DIPA PNBPU Unila	3,5 juta
3	2009	Peningkatan Kesadaran dan Partisipasi Politik Pemilih Pemula di Desa Cipadang Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran	DIPA PNBPU Unila	3,5 juta
4	2010	Penyuluhan Pemanfaatan Koperasi Sebagai Salah Satu Kelembagaan Tingkat Desa dalam Pengelolaan PLTMH di Desa Pesawaran Indah Kec. Padang Cermin	DIPA PNBPU Unila	3,5 juta
5	2010	Sosialisasi Strategi Penguatan Lembaga Keuangan Mikro Dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Desa di Desa Pesawaran Indah Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran	DIPA PNBPU Unila	3,5 juta
6	2010	Pendidikan Politik Pemilih Pemula Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 di SMA Bina Mulya Gadingrejo	DIPA PNBPU Unila	3,5 juta
7	2010	Penyuluhan Tata Cara Penyusunan Peraturan Desa (Perdes) di Desa Sidomakmur Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung Selatan	DIPA PNBPU Unila	3,5 juta
8	2011	Sosialisasi Pentingnya Profil Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Bagi Aparatur Desa dan Kader Posyandu di Kecamatan Kota Gajah – Lampung Tengah	DIPA PNBPU Unila	3,5 juta
9	2011	Sosialisasi Mekanisme dan Prosedur	DIPA PNBPU Unila	3,5 juta

No	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah
		Pemekaran Desa dan Pemekaran Kecamatan di Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran	Unila	
10	2011	Pendampingan Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kesejahteraan Sosial Bagi Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) di Kabupaten Pesawaran	DIPA PNB Unila	5,0 juta
11	2012	Pendampingan Penyusunan Rencana Tindak Integrasi Kebijakan Lingkungan Dalam Kurikulum Pendidikan Dasar Bagi Para Guru SD & SMP di Kota Bandar Lampung	DIPA PNB Unila	3,5 juta
12	2013	Sosialisasi Pendidikan Integritas dan Anti Korupsi Bagi Kepala SMP dan MTs di Kabupaten Tulang Bawang Barat	DIPA PNB Unila	5,0 juta
13	2014	Pendampingan Penyusunan Visi Misi Sekolah Berbasis Kebijakan Lingkungan Bagi Kepala SD di Bandar Lampung	DIPA PNB Unila	3,0 juta
14	2019	Pelatihan Penguatan Kapasitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Upaya Penguatan Demokrasi Desa di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan	DIPA FISIP	10 juta
15	2019	Pendampingan Transformasi Kelompok Wanita Tani (KWT) Menuju Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) di Kecamatan Punggur	DIPA UNILA	20 juta

#### E. Publikasi Ilmiah dalam Jurnal (5 Tahun Terakhir)

No	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Volume/Nomor/Tahun
1	Transformasi Kelembagaan Kecamatan (Dilema Antara Tuntutan dan Batas Kewenangan)	Jurnal Ilmu Hukum "FIAT JUSTISIA" Tahun 2011	Vol. 5 No. 2 (Mei 2011) ISSN : 1878-1586 Penerbit FH Unila Hal. 282-371 <a href="#">Mandiri</a>
2	Penetapan Tipologi Wilayah Sebagai Kriteria Alternatif Pemekaran Kecamatan (Studi Kasus di Kabupaten Mesuji)	Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan "ADMINISTRATIO" Tahun 2011	Vol. 2 No. 2 (Juli – Desember 2011) ISSN : 2087-0825 Penerbit FISIP Unila H. 78-83 <a href="#">Penulis 1</a>

No	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Volume/Nomor/Tahun
3	Rasionalisasi Kelayakan, Opini Serta Aspirasi Masyarakat Terhadap Skenario Pemekaran Kabupaten Lampung Tengah.	Jurnal Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Bandar Lampung "PUBLICA" Tahun 2012	Vol. 2 No. 1 (Maret 2012) ISSN : 2087-796X Penerbit FISIP Universitas Bandar Lampung Hal. 84-97 <a href="#">Mandiri</a>
4	Penerapan <i>Good Governance</i> Dalam Pengadaan Barang/Jasa dan Pengelolaan Aset (Pengalaman Pemerintah Provinsi Lampung)	Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan "ADMINISTRATIO" Tahun 2013	Vol. 4 No.12 (Januari– Juni 2013) ISSN : 2087-0825 Penerbit FISIP Unila Hal. 17-26 <a href="#">Mandiri</a>
5	<i>Exogeneus Force Theory</i> , Sebuah Antitesis Teori Negara Otonom Dalam Formulasi Kebijakan Publik (Studi Kasus Kebijakan Adaptasi Perubahan Iklim di Bandar Lampung)	Jurnal "TAPIS" IAIN Raden Intan Lampung Tahun 2015	Vol. 11 No. 01 (Jan-Juni 2015) ISSN : 0216-4396 Penerbit Prodi IAIN Raden Intan Lampung Hal. 103-120 <a href="#">Mandiri</a>
6	Prioritas Strategi Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak Di Provinsi Lampung dalam Perspektif <i>Time Matrix Management</i>	Jurnal "WEDANA" Universitas Islam Riau Tahun 2015	Vol. 1 No. 2 (Okt. 2015) ISSN : 2460-965x Penerbit FISIP UIR Riau Hal. 229-248 <a href="#">Mandiri</a>
7	Menakar Peluang Munculnya Inovasi Daerah Pasca Undang-Undang 23 Tahun 2014 (Studi pada Hasil Diklatpim IV Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung)	Jurnal "COSMOGOV" FISIP Universitas Padjadjaran, Bandung Tahun 2016	Vol. 2 No.1 (April 2016) ISSN : 2442-5058 Penerbit FISIP Unpad Hal. 1-18 <a href="#">Mandiri</a>
8	Tata Kelola Pemerintahan Dalam Peningkatan Kapasitas Adaptif/Ketahanan Kota Bandar Lampung Terhadap Dampak Perubahan Iklim	Jurnal "JIPSI" FISIP Universitas Komputer Indonesia Bandung Tahun 2016	Vol. VI No. 2 (Desember 2016) ISSN : 2086-1109 Penerbit FISIP Unikom Hal. 1-16 <a href="#">Mandiri</a>
9	<i>Strengthening The Integrity Of Local</i>	Jurnal Ilmu Hukum "FIAT JUSTISIA"	Vol. 11 No. 2 (Juni 2017)

No	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Volume/Nomor/Tahun
	<i>Leadership And Its Relevance To The Effort To Run A Democratic Government</i>	Tahun 2017	p-ISSN : 1978-5186 e-ISSN : 2477-6238 Penerbit FH Unila Hal. 110-122 <a href="#">Penulis 1</a>
10	Analisa Kritis Atas Motif <i>Policy Community</i> dalam Kolaborasi (Studi Kasus Kebijakan Pemindahan Pusat Pemerintahan Provinsi Lampung)	Jurnal “AGREGASI” Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP UNIKOM Bandung Tahun 2017	Vol. 5 No. 2 (Tahun 2017) p-ISSN : 2337-5299 e-ISSN : 2579-3047 Penerbit Prodi IP FISIP Unikom Hal. 135-157 <a href="#">Mandiri</a>
11	<i>Strengthening The Ideational Functions of “Sastrawan” In The Effort Democratic Governance in Lampung Province</i>	<i>Advances in Social Science, Education and Humanities Research (ASSEHR)</i> Tahun 2017	Volume (163) Penerbit Atlantis Press Tahun 2017 Hal. 38-144 <a href="#">Penulis 2</a>
12	<i>A Long, Winding And Steep Road For Collaborative Governance In Indonesia</i>	Russian Journal of Agricultural and Socio-Economic Sciences (RJOAS) Tahun 2018	Issue 4 (76) April 2018 ISSN : 2226-1184 Hal. 173-183 <a href="#">Penulis 1</a>
13	<i>Collaboration versus Coordination: a Dilemma about State Actors’ Position in a Policy</i>	Russian Journal of Agricultural and Socio-Economic Sciences (RJOAS) Tahun 2018	Issue 8 (80) Agustus 2018 ISSN : 2226-1184 Hal. 113-119 <a href="#">Penulis 1</a>
14	<i>The Actor Domination In The Collaborative Governance In The Lampung Province Central Government Displacement Policy: An Ambivalent</i>	Jurnal Ilmiah “PEUREDEUN” <i>The International Journal of Social Sciences</i> Tahun 2018	Vol. 6, No. 3, September 2018 p-ISSN: 2338-8617 e-ISSN: 2443-2067 Hal. 507-524 <a href="#">Penulis 1</a>
15	<i>The Starting Condition Problem’s in the Collaboration for Lampung Province Central Government Displacement Policy</i>	Jurnal “MIMBAR” Universitas Islam Bandung Tahun 2019	Vol. 35, No. 1 (2019) Juni 2019 p-ISSN: 0215-8175 e-ISSN: 2303-2499 Hal. 1-10 <a href="#">Penulis 1</a>
16	Desentralisasi Fiskal dan Implikasinya Terhadap Kinerja Otonomi Daerah Pasca Pemekaran (Studi di Kabupaten Tulang	Jurnal “COSMOGOV” FISIP Universitas Padjadjaran, Bandung Tahun 2019	<b>Vol. 5 No. 2 Oktober 2019)</b> ISSN : 2442-5058 Penerbit FISIP Unpad <b>Hal. 1-18</b>

No	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Volume/Nomor/Tahun
	Bawang, Tuba Barat, dan Mesuji Lampung)		Penulis 1 ( <i>accepted</i> )
17	Implikasi Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Bagi Efisiensi Keuangan dan Optimalisasi Fungsi Pemerintahan	Jurnal "ARISTO" Universitas Muhammadiyah Ponorogo Tahun 2019	Vol. 8, No. 1 (Januari 2020) p-ISSN: 2338-8617 e-ISSN: 2443-2067 Hal. 42-61 Penulis 1

#### F. Pemakalah Seminar Ilmiah sebagai Pembicara (5 Tahun Terakhir)

No	Nama Temu Ilmiah/Seminar	Judul Artikel Ilmiah	Waktu & Tempat
1	Seminar Hasil-hasil Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat. Tahun 2011	Pemetaan Kepentingan dan Politik Kekuasaan dalam Kebijakan Pembangunan Kota Bandar Lampung.	September 2011 Bandar Lampung
2	Seminar Hasil-hasil Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat. Tahun 2011	Evaluasi Model Kebijakan Pelibatan Masyarakat pada Pelaksanaan Program PNPM Mandiri dalam Upaya Membangun Keberlanjutan Program Pengentasan Kemiskinan (Studi di Kecamatan Kedondong, Pesawaran)	September 2011 Bandar Lampung
3	Seminar Nasional Sains dan Teknologi (SATEK) IV Tahun 2011	Analisis Kegagalan Kebijakan Dalam Aplikasi <i>E-Government</i> (Studi Implementasi E-KTP di Kota Bandar Lampung Tahun 2011).	Oktober 2011 Bandar Lampung
4	Seminar Hasil-hasil Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat. Tahun 2012	Dampak Kebijakan Perlindungan Pelayanan Anak Terhadap Pengurangan Anak Terlantar, Anak Kalanan, Anak Nakal, dan Anak dengan Kedisabilitas di Kota Bandar Lampung.	September 2012 Bandar Lampung
5	Seminar Hasil-hasil Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.	Efektifitas Kebijakan Penerapan Bahan Ajar Pendidikan Perubahan Iklim Dalam Mewujudkan	September 2013 Bandar Lampung

No	Nama Temu Ilmiah/Seminar	Judul Artikel Ilmiah	Waktu & Tempat
	Tahun 2013	Pembangunan Berkelanjutan Di Bandar Lampung	
6	Seminar Hasil-hasil Penelitian FISIP Universitas Lampung. Tahun 2013	Dampak Kebijakan Pembangunan Kota Baru Lampung Terhadap Perubahan Sosial Budaya Masyarakat.	Oktober 2013 Bandar Lampung
7	Seminar Hasil-Hasil Penelitian Universitas Lampung. Tahun 2015	Analisis Inovasi Pemerintahan Daerah Dalam <i>Best Practice</i> Aksi Adaptasi Perubahan Iklim Pada Delapan Kota Percontohan ACCCRN di Indonesia	September 2015 Bandar Lampung
8	Seminar Nasional “Kepemimpinan dalam Politik dan Pemerintahan” FISIP Universitas Komputer Indonesia. Tahun 2017	Analisa Kritis Atas Motif <i>Policy Community</i> dalam Kolaborasi (Studi Kasus Kebijakan Pemindahan Pusat Pemerintahan Provinsi Lampung)	Mei 2017 Bandung
9	2 <sup>nd</sup> SHIELD Conference 2017 – International Conference University of Lampung	<i>Strengthening The Integrity Of Local Leadership And Its Relevance To The Effort To Run A Democratic Government</i>	September 2017 Bandar Lampung
10	Seminar Nasional FISIP Unila (SEFILA) 2017 ”Membangun Etika Sosial Politik Menuju Masyarakat yang Berkeadilan”	Model Advokasi Organisasi Masyarakat Sipil Dalam Mendorong Kebijakan Distribusi Penguasaan Lahan Upaya Mewujudkan Masyarakat Yang Berkeadilan	Oktober 2017 Bandar Lampung
11	International Conference on Democracy Accountability and Governance (ICODAG)	<i>Strengthening The Ideational Functions of “Sastrawan” In The Effort Democratic Governance in Lampung Province</i>	November 2017 Pekan Baru, Riau
12	Konferensi Nasional Hukum Tata Negara (KNHTN) Ke-5	Mengembalikan Kedaulatan Partai Politik Melalui Perubahan Sistem Pemilu	November 2018 Batusangkar, Sumbar
13	3 <sup>rd</sup> SHIELD Conference 2018 – International Conference Post Graduate Programmer University of Lampung	<i>Degrees of Appropriateness, Fairness, and Rationality in The Amount of Housing Allowance for Members of Regional House of Representative in Mesuji</i>	November 2018 Bandar Lampung

No	Nama Temu Ilmiah/Seminar	Judul Artikel Ilmiah	Waktu & Tempat
		<i>District of Lampung Province</i>	
14	<i>The Annual International Conference on Social Sciences and Humanities (AICoSH) in UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta</i>	<i>The Urgency of Starting Condition in the Religion Deradicalization Policy Collaboration: The Pesantren Perspectif in Lampung Province.</i>	Juni 2019 Yogyakarta
15	Seminar Nasional FISIP Unila (SEFILA) 2018 "Agenda Baru Pembangunan"	Implikasi Desentralisasi Fiskal Terhadap Kemandirian, Kesejahteraan, dan Kemiskinan: Sebuah Hubungan Yang Tak Selalu Sejalan	Agustus 2019 Bandar Lampung

#### G. Pengalaman Penulisan Buku Dalam 5 Tahun Terakhir

No	Judul Buku	Tahun	Jumlah Halaman	Penerbit
1	Buku Aksi dan Inspirasi Rektor Unila	2015	218	Unila Press
2				
dst				

#### H. Pengalaman Perolehan HKI Dalam 5 Tahun Terakhir

No	Judul/Tema HKI	Tahun	Jenis	Nomor P/IP
1	HKI Disertasi	2019	Surat Pencatatan Ciptaan	000134811
2				
dst				

#### I. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial

No	Judul/Tema/Jenis Rekayasa Sosial Lainnya yang Telah Diterapkan	Tahun	Tempat	Respon
1	Perda Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Bangunan Gedung	2014	Provinsi Lampung	Peraturan Daerah
2	Perda Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Ketertiban Umum, Kebersihan, dan Keindahan	2017	Kota Metro	Peraturan Daerah
3	Perda Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan	2018	Kota Metro	Peraturan Daerah
4	Perda Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Tuntutan Perbendaharaan	2018	Kota Metro	Peraturan Daerah

No	Judul/Tema/Jenis Rekayasa Sosial Lainnya yang Telah Diterapkan	Tahun	Tempat	Respon
	dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah			
5	Perda Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Inovasi Daerah	2019	Kota Metro	Peraturan Daerah

### **I . Penghargaan dalam Sepuluh Tahun Terakhir**

No	Jenis Penghargaan	Institusi Pemberi Penghargaan	Tahun
1			
2			
dst			

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Bandar Lampung, 30 Oktober 2019

Yang Membuat Pernyataan



**Dr. Maulana Mukhlis, S.Sos, M.IP**  
NIP. 19780430 200812 1 001

## **LAMPIRAN DAFTAR RIWAYAT HIDUP ANGGOTA PENELITI**

Nama : **Dr. Syarief Makhya, M.Si**  
Tempat dan Tanggal Lahir : Bandung, 03 Agustus 1959  
Pekerjaan : Pengajar Jurusan Ilmu Pemerintahan, Magister Ilmu  
Pemerintahan dan Magister Ilmu Administrasi  
Pascasarjana FISIP Universitas Lampung  
Pangkat/Golongan : Lektor Kepala/IV C  
Alamat Rumah : Jalan Melati 246 Perumahan Bataranila,  
Desa Haji Mena, Lampung Selatan  
No HP : 081274581441  
Email : [syarief.makhya@fisip.unila.ac.id](mailto:syarief.makhya@fisip.unila.ac.id)

### **A. Pendidikan**

1. SD Negeri Sejahtera IV Bandung (1972)
2. SMP Negeri IX Bandung (1975)
3. SMA Negeri II Bandung (1979)
4. S1 Ilmu Pemerintahan FISIP Unpad (1985)
5. Kursus Singkat Studi Kawasan dan Ilmu Politik, PAU UGM (1987)
6. S2 Kebijakan Publik Pascasarjana Universitas Brawijaya (1997)
7. S3 Studi Pemerintahan Pascasarjana FISIP Universitas Padjadjaran (2012)

### **B. Penelitian (sepuluh tahun terakhir )**

1. Indonesia Rapid Decentralization appraisal (IRDA) di Kota Metro,tahun 2002 sd th2004
2. Proses Pengambilan Keputusan dan Kebijakan di Era Desentralisasi (Studi di Kota Metro), 2005.
3. Model Alternatif Otonomi Daerah Dalam Membangun Hubungan Pemerintah Pusat-Provinsi Dan Kabupaten/Kota Studi di Provinsi Lampung di Provinasi Lampung (2010), Penelitian Hibah Strategis
4. Survey Kepuasan Masyarakat di Kabupaten Lampung Utara (2007), Program SCBD Kabupaten Lampung Utara
5. Survey Kepuasan Masyarakat di Kabupaten Lampung Selatan (2009, 2011), Program SCBD Kabupaten Lampung Selatan
6. The Formulation of Lampung Provincial Budget Policy of 2011”
7. Inovasi Kebijakan dan Pemerintahan Antisipatif di Provinsi Lampung, 2014
8. Free Public Service in The Perspective of Government’s, 2014
9. Analisis Kebijakan Pembangunan Jembatan Layang Di Jalan Teuku Umar Kota Bandar Lampung : Perspektif Etika Kebijakan Publik, Tahun 2017
10. Model Kerjasama Antar Pemerintah Desa, 2018
11. Social Media and Public Policy, 2019

### C. Karya Tulis yang Dipublikasikan Dalam Buku

1. Implikasi Struktur Pemerintah Daerah terhadap Perneran DPRD Menurut UU No.5/1974 dalam Buku Fungsi Badan Legislatif, Rajawali Press, Jakarta, 1985.
2. Reformasi Kebijakan Publik di Daerah dalam Buku Menembus Arus, Pustaka Pelajar, 1999.
3. Mewujudkan pemerintahan yang bersih dari Perspektif Kebijakan, Prosiding Pemda Propinsi Lampung, 1999.
4. Link and Match Ilmu-Ilmu Sosial, Unila Press, 1993.
5. Catatan Kritis Peran DPRD Dalam Kebijakan Publik, dalam Buku Lampung 2001, Pembangunan Tanpa VISI, Ganesha Baru, Bandar Lampung 2002.
6. (a) Evaluasi Proses Pelaksanaan Pemilu 1999 dalam buku Pemilu 1999 di Lampung, Penerbit Universitas Lampung, Bandar Lampung 2002.
7. *Money Politics* dan Demokrasi Yang Bermasalah, dalam Buku Pola Money Politics, Kontroversi Pemilihan Gubernur Lampung, Penerbit Universitas Lampung, Bandar Lampung 2002
8. Kecelakaan Politik, dalam buku “ Alzier Sukses Masa Transisi, Sped, Bandar Lampung, 2004.
9. *Muhamamdiyah dan Dinamika Demokrasi Lokal*, Lembaga Hikmah PWM Lampung, Jakarta. 2005.
10. *Ilmu Pemerintahan Lama dan Kybernologi*,. dalam buku *Kebernologi Sebuah Rekonstruksi Ilmu Pemerintahan*, Talizuduhu Ndraha, Jakarta, Rineka Cipta. 2005.
11. *Ilmu Pemerintahan : Telahaan Awal (Buku Ajar)*, FISIP Universitas Lampung, 2006.
12. Demokratisasi Bermasalah : Catatan Dinamika Politik Lampung, Penerbit Universitas Lampung. Bandar Lampung, 2011.
13. Dimensi Kritis Dalam Memahami Politik Lokal, dalam Buku AHMAD IMAM GHOZALI, Senarai Pemikiran Hukum, HAM, Demokrasi, Pembangunan dan Kisah-Kisah Pergulatan. Lampung Media Center (LMC), Bandar Lampung. 2011.

### D. Seminar International

1. Seminar Internasional dan Konferensi Tahunan IAPA 2012(International Seminar and IAPA Annual Conference 2012) 12 – 14 Juni 2012, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
2. Prosiding.” The Formulation of Lampung Provincial Budget Policy of 2011” , International Confrence of Decentralization, 2012, IPDN
3. Prosiding, “ Free Public Service in The Perspective of Government’s Management” International Confrence on Public Management, 2014. Di Bali .
4. Phenomenon of democracy in the region ( Study Of Identification Issues Of Democracy In Lampung), BICSS (Bangkok International Confrence on Social Science), 2015
5. The Use Of Social Media And Implications On The Change Of Public Policy In The City Of Bandar Lampung, Internatonal Indonesia Conference On Interdisciplinary Studies (IICIS) “ State and Digital Society, FISIP Unila 2018.

6. From Jakarta to Palangkaraya and The Future Of Government in Indonesia, 2018, The 1 International Seminar and Annual Meeting Fields of Social Sciences of BKS-PTN Barat

#### **E. Artikel/Opini**

Menulis opini/artikel di koran : Harian Umum Merdeka, Media Indonesia, Pikiran Rakyat, Lampung Post, Sriwijaya Post, Radar Lampung, Trans Sumatra, Teknokra, Jurnal Bijak (Pussbik), dan Jurnal YPBHI.

#### **F. Penghargaan**

1. Dosen Teladan I FISIP Unila (1992)
2. Cendikia Award (Dosen Terbaik) dari BEM FISIP Unila (2000)
3. Komarudin Award dari PWI Lampung (2008)
4. AJI Award dari AJI Bandar Lampung (2009)

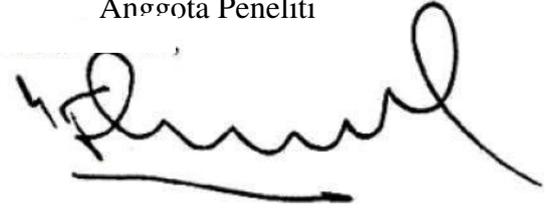
#### **G. Lain-lain (Pengalaman Manajerial):**

1. 1990-1994 (sekertaris II Persiapan/PD III FISIP Unila)
2. 1997-2001 (Ketua Jurusan IP FISIP Unila)
3. 2001-2005 (Ketua Jurusan IP FISIP Unila)
4. 2005-2009 ( Pembantu Dekan I FISIP Unila)
5. Anggota Senat FISIP Unila dan Anggota Senat Unila (2015-2019)
6. Staf ahli Pansus DPRD Kota Metro Untuk Pembahasan Struktur Organisasi Pemerintah Kota Metro, 2001.
7. Anggota Tim pewawancara Test Pegawai Pemerintah Daerah untuk mengikuti Spamen, yang diselenggarakan oleh Diklatda Propinsi Lampung, tahun 2002.
8. Konsultan Manajemen pemerintahan Kabupaten Way Kanan (2000)
9. Anggota Tim Seleksi Pemilihan anggota KPU Propinsi Lampung (2003)
10. Tim Seleksi Panwas Kota Bandar Lampung (2005)
11. Tim Seleksi Panwas Kota Bandar Lampung, Kota Metro, Lamsel, Pesawaran, Lamteng dan Kab Way Kanan (2015)
12. Staf Ahli Pansus DPRD Kota Metro Pembuatan Perda Partisipasi dan Transparansi Kota Metro, 2004
13. Staf Ahli Pansus DPRD Provinsi Lampung, dalam pembuatan Pokok-Pokok Pikiran DPRD dalam Pembuatan AKU APBD, 2004.
14. Staf ahli DPRD Kabupaten Way Kanan, 2005
15. Tim Pakar DPRD Kab Lampung Timur (2012, 2013,2015)
16. Tim Ahli Pemda Prov Lampung, 2006-2013
17. Tim Ahli program SCBD Kabupaten Lamtim, 2006
18. Tim Ahli Program SCBD Provinsi Lampung, 2012
19. Tenaga Ahli Pemprov Lampung (2006-2013)
20. Tenaga Ahli Pemkot Bandar Lampung 2013-2018
21. Pansel Pejabat Eselon II Kota Bandar Lampung (2016)
22. Pansel Pejabat Eselon II Kabupaten Way Kanan (2016)
23. Dekan FISIP Unila (2016-2020)

Demikian, daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, 30 Oktober 2019

Anggota Peneliti

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Syarief Makhya', written over a horizontal line.

**Dr. Syarief Makhya, M.Si**  
NIP. 19590803 198603 1 003